



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 314 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Disdik yang selanjutnya disebut Renstra Disdik adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Disdik yang selanjutnya disebut Renja Disdik adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II RUANG LINGKUP RENSTRA DISDIK

Pasal 2

Dokumen Renstra Disdik merupakan dokumen perencanaan strategis Disdik untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Disdik yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Disdik yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Disdik bertujuan untuk:

- a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Disdik dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Disdik dalam implementasinya;
- b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Disdik agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
- c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Disdik;
- d. menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Disdik;
- e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
- f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Disdik.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA DISDIK

Pasal 4

- (1) Renstra Disdik Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Disdik dalam menyusun Renja Disdik.
- (2) Renstra Disdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.
 - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Disdik paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan Disdik; dan
 2. permasalahan dan isu strategis Disdik.
 - c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra Disdik Tahun 2025-2029;
 2. strategi Disdik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan Disdik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
 - d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Disdik; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

- e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 - 1. kesimpulan;
 - 2. kaidah pelaksanaan; dan
 - 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Dokumen Renstra Disdik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISDIK

Pasal 5

- (1) Disdik melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Disdik dan evaluasi hasil Renstra Disdik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
- (2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Disdik terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Disdik.
- (3) Kepala Disdik menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Disdik.
- (4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENSTRA DISDIK

Pasal 6

Perubahan Renstra Disdik dapat dilakukan apabila :

- a. perubahan Renstra Disdik mempedomani perubahan RPJMD;
- b. perubahan Renstra Disdik dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
- c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Disdik, maka Renstra Disdik dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Disdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Disdik Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Disdik terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Disdik.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
- (4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025


BUPATI BANDUNG,
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 314

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 314 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) salah satunya dapat dilakukan melalui upaya pembangunan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) yang menyatakan bahwa (1) setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka menghidupkan kecerdasan bangsa; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Demikian pula UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Bupati/Walikota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun 2026-2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten yang memiliki daya topang pada aspek pendidikan, telah melaksanakan konsep pendidikan untuk semua (*Education For All*) yang menyentuh level usia masyarakat Kabupaten Bandung dari nol sampai dengan usia harapan hidup. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Bandung diarahkan pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 13 tahun sebagai prioritas. Berkaitan dengan pencapaian ASTA CITA yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dan program prioritas penguatan pendidikan, sains, dan teknologi serta digitalisasi menuntut pembangunan pendidikan memfokuskan program pada digitalisasi pendidikan dengan tidak mengesampingkan budi pekerti, pendidikan yang menggabungkan

antara qolbu, akal dan jasadiyah. Tidak hanya pendidikan yang sekedar menstransfer ilmu tapi juga membangun manusia yang memiliki karakter sehingga mutu lulusannya mampu menjadi cerdas, berdaya saing serta memiliki iman dan takwa. Selain itu, perumusan strategi baru Pengembangan Anak Usia Dini holistik-integratif (PAUD-HI) 2025-2029 dengan fokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas layanan PAUD.

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu menyusun Renstra DISDIK Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Bandung jangka menengah RPJMD. Selain itu diselaraskan pula dengan Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah yang menekankan pada 3 pilar (tantangan utama) untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan 5 tahun ke depan yaitu: (1) peningkatan kualitas pendidikan; (2) pemerataan akses pendidikan; (3) peningkatan kompetensi guru.

Agar tujuan Renstra DISDIK dicapai dengan efektif maka pengembangan program perlu didasarkan pada persoalan-persoalan prioritas yang secara substantif memiliki peluang lebih besar untuk berkembang baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian visi Kabupaten Bandung "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" dipandang perlu mengembangkan program-program yang bersifat inovatif.

Pembangunan dan pelaksanaan program pendidikan di Kabupaten Bandung periode tahun 2025-2029 diharapkan menghasilkan insan-insan yang memiliki tingkat kecerdasan dan karakter yang berlandaskan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mengembangkan potensi jasmaniah dan rohaniyah yang dimiliki oleh setiap insan. Oleh karena itu, perlu disusun kerangka program pendidikan yang utuh dan rinci dalam bentuk Renstra DISDIK Bandung periode Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra DISDIK Kabupaten Bandung disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri no 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPjMD dan renstra tahun 2025-2029
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan; (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 86, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 86;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra DISDIK Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh potensi kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Bandung baik sektoral maupun lintas sektor berkenaan dengan fungsi-fungsi pendidikan. Renstra sebagai pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan pembangunan pendidikan serta pelaksanaan pelayanan publik di daerah. Renstra DISDIK Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 juga disusun untuk menyelaraskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dinamika situasi, strategi, arah kebijakan baik pusat maupun provinsi, dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, serta menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sesuai visi dan misi Bupati Bandung .

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DISDIK Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 ini yaitu sebagai pedoman dan arah dalam menyusun Rencana Kerja tahunan urusan pendidikan dan capaian indikator yang berorientasi pada hasil, berdasarkan penjabaran visi dan misi daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra DISDIK Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 , sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya DISDIK, Kinerja Pelayanan DISDIK, Kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan Pelayanan DISDIK dan Isu Strategis.

BAB III I TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah DISDIK serta Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DISDIK.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif serta Target IKU DISDIK.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan, kaidah pelaksanaan, Pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi terhadap perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pendidikan

Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

(1) Dinas pendidikan , terdiri dari:

- a. Kepala Dinas, yang membawahkan
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum;
 3. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengendalian Perizinan Pendidikan;
 5. Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra; dan
 6. Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Perencana;
 3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 4. Pelaksana.
- c. Bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 3. Widyaprada; dan
 4. Pelaksana.
- d. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 3. Widyaprada; dan

4. Pelaksana.
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, membawahkan / mengkoordinasikan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 3. Widyaprada; dan
 4. Pelaksana.
- f. Bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
 3. Widyaprada; dan
 4. Pelaksana.
- g. UPTD Pendidikan Formal
UPTD Pendidikan Formal terdiri dari :
 1. Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri;
 2. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri; dan
 3. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

UPTD Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Guru yang di beri tugas tambahan.
- h. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar
Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan fungsional, yang menjalankan fungsi :
 1. Pelayanan Pendidikan Nonformal
 2. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 3. pelaksanaan administrasi pada Sanggar Kegiatan Belajar.
- i. Korbidik
Korbidik mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengarahkan dan membuat laporan kegiatan dengan cara penerimaan dan mencatat, mengelompokkan, dan

melaporkan pelayanan UPTD satuan pendidikan taman kanak-kanak, UPTD satuan pendidikan sekolah dasar, dan UPTD satuan pendidikan menengah pertama di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, optimal dan tepat sasaran.

j. Jabatan Fungsional

1. Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

k. Pelaksana

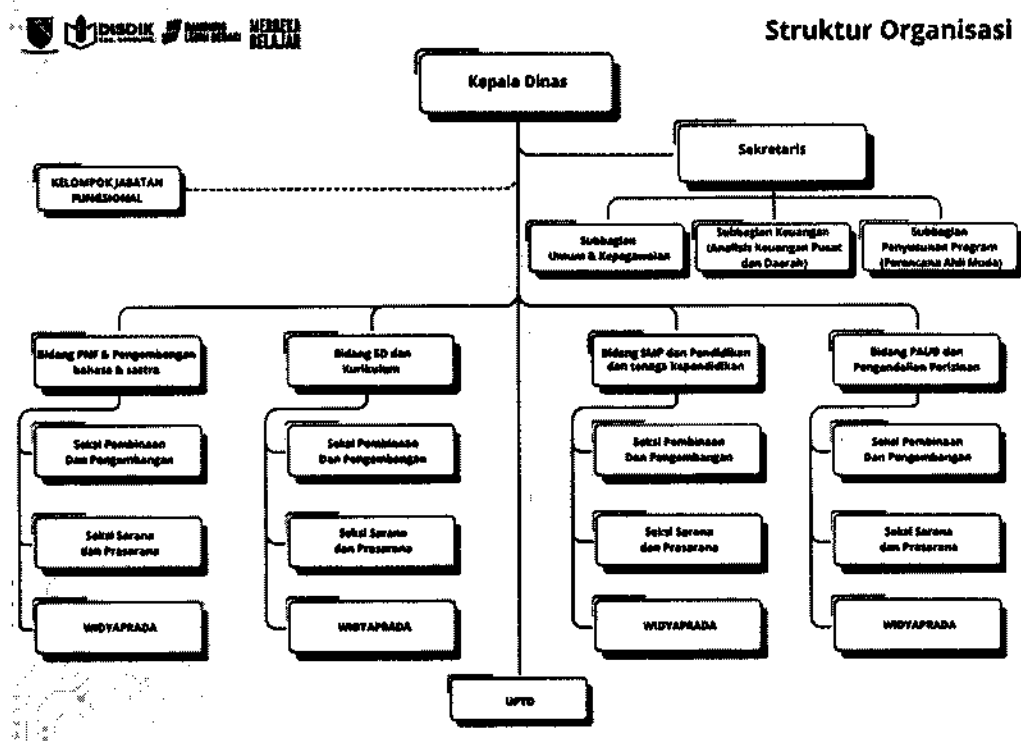
Pada Disdik terdapat Pelaksana, meliputi:

1. Sekretariat, meliputi:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Pengadministrasi Perkantoran
 - b) Penelaah Teknis Kebijakan;
 - c) Pengolah Data dan Informasi; dan
 - d) Pengadministrasi Perkantoran.
2. Bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum, meliputi:
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi;
 - Pengadministrasi Perkantoran;
 - Operator Layanan Operasional; dan
 - Pengelola Umum Operasional.
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;

- Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Pengadministrasi Perkantoran.
- c) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
- d) Pengolah Data dan Informasi.
3. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, meliputi:
- a) Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:
- Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi;
 - Pengadministrasi Perkantoran;
 - Operator Layanan Operasional; dan
 - Pengelola Umum Operasional.
- b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan, meliputi:
- Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Pengadministrasi Perkantoran.
- c) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
- d) Pengolah Data dan Informasi.
4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, meliputi:
- a) Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:
- Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi;
 - Pengadministrasi Perkantoran;
 - Operator Layanan Operasional; dan
 - Pengelola Umum Operasional.
- b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan, meliputi:
- Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Pengadministrasi Perkantoran.
- c) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
- d) Pengolah Data dan Informasi.
5. Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra, meliputi:
- a) Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:

- Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi;
 - Pengadministrasi Perkantoran;
 - Operator Layanan Operasional; dan
 - Pengelola Umum Operasional.
- b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan, meliputi:
- Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Pengadministrasi Perkantoran.
- c) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
- d) Pengolah Data dan Informasi.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan



Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan

mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Dinas mempunyai subtugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum, Bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra berdasarkan visi dan misi Daerah serta dokumen perencanaan Dinas;
- b. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Proses bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
- c. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

- d. menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- e. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Dinas;
- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
- g. memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Dinas;
- i. membina bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;
- j. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan sebelum ditandatangani;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas Dinas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- m. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya pengelompokan tugas berdasarkan fungsi diatur sebagai berikut:

- 1. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan dinas;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

- d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi Dan Sinkronisasi Sesuai Dengan Lingkup Tugasnya; Dan
 - f. penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat.
2. Bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang sekolah dasar dan kurikulum, meliputi seksi sarana dan prasarana, seksi pembinaan dan pengembangan dan pengembangan kurikulum;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum, meliputi seksi sarana dan prasarana , seksi pembinaan dan pengembangan dan pengembangan kurikulum;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum.
3. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang sekolah menengah pertama, pendidik, dan tenaga kependidikan, meliputi seksi sarana dan prasarana, seksi pembinaan dan pengembangan dan pengembangan kurikulum;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Sekolah Menengah pertama, pendidik, dan tenaga kependidikan, meliputi seksi sarana dan prasarana , seksi pembinaan dan pengembangan dan pengembangan kurikulum;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja bidang Sekolah Menengah pertama, pendidik, dan tenaga kependidikan.

4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, meliputi seksi sarana dan prasarana, seksi pembinaan dan pengembangan dan pengembangan kurikulum;
- b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, meliputi seksi sarana dan prasarana , seksi pembinaan dan pengembangan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan.

5. Bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra, meliputi seksi sarana dan prasarana, seksi pembinaan dan pengembangan dan pengembangan kurikulum;
- b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra, meliputi seksi sarana dan prasarana , seksi pembinaan dan pengembangan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian kinerja bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pendidikan memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks, mencerminkan peran vitalnya dalam mengelola sektor pendidikan di wilayah ini. Komposisi pegawai di seluruh tingkatan jabatan dan lini operasional menunjukkan keberagaman, baik dari sisi jenis kelamin maupun status kepegawaian.

Pada tingkat pimpinan, posisi Pejabat Eselon II diisi oleh 1 orang, di tingkat Pejabat Eselon IIIa terdapat 1 orang, pada tingkat Pejabat Eselon IIIb terdapat 4 orang. Sementara itu, pada level Eselon IVa, terdapat 9 pejabat. Selain itu Dinas Pendidikan juga memiliki Jabatan Fungsional yaitu Perencana 1 orang, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, serta Widyaprada dimana saat ini yang terisi hanya Jabatan Perencana saja.

Untuk pengawasan pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tenaga pengawas yang cukup besar, terutama di jenjang pendidikan dasar. Pengawas TK sebanyak 23 orang, didominasi oleh perempuan (22 perempuan, 1 laki-laki). Pengawas SD berjumlah 94 orang, terdiri dari 40 laki-laki dan 54 perempuan. Pengawas SMP sebanyak 7 orang, seluruhnya laki-laki. Pengawas PAI berjumlah 9 orang, dengan 7 laki-laki dan 2 perempuan. Sementara itu, Penilik, yang bertugas memantau dan mengevaluasi pendidikan nonformal, berjumlah 53 orang, didominasi oleh 37 laki-laki dan 16 perempuan. Di jajaran staf, terdapat 387 ASN dan 40 orang Non-ASN, yang terdiri dari 179 laki-laki dan 209 perempuan, dengan rincian 388 ASN. Untuk jenjang kepemimpinan satuan pendidikan, data menunjukkan adanya kekurangan kepala sekolah, Kepala TK Negeri hanya tersedia 3 orang, dengan kekurangan 2 orang. Kepala Sekolah SD berjumlah 953 orang, namun masih terdapat kekurangan 231 orang. Kepala Sekolah SMP sebanyak 75 orang, dengan kekurangan 13 orang. Kepala SPNF (Sanggar Kegiatan Belajar) terdapat 1 orang, yang merupakan perempuan.

Komposisi guru mencerminkan skala besar sektor pendidikan, Guru TK berjumlah 2.923 orang, terdiri dari 109 ASN dan 2.814 non-ASN, dengan 270 laki-laki dan 2.653 perempuan, menunjukkan dominasi perempuan dan tingginya ketergantungan pada tenaga non-

ASN. Guru SD mencapai 18.816 orang, dengan distribusi yang hampir seimbang antara ASN (11.304) dan non-ASN (7.512), serta 6.821 laki-laki dan 11.995 perempuan. Guru SMP sebanyak 9.809 orang, terdiri dari 3.799 ASN dan 6.010 non-ASN, serta 4.333 laki-laki dan 5.476 perempuan. Pamong Belajar, yang berperan dalam pendidikan nonformal, berjumlah 8 orang, dengan komposisi seimbang antara 4 laki-laki dan 4 perempuan.

Dinas Pendidikan memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks, mencerminkan peran vitalnya dalam mengelola sektor pendidikan di wilayah ini. Komposisi pegawai di seluruh tingkatan jabatan dan lini operasional menunjukkan keberagaman, baik dari sisi jenis kelamin maupun status kepegawaian.

Tabel 2.1 Rekap Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan

No.	Nama Jabatan	ASN	Non ASN	Jumlah
1	Pejabat Esselon II	1		1
2	Pejabat Esselon III a	1		1
3	Pejabat Esselon III b	4		4
4	Pejabat Esselon IV a	9		9
5	Pengawas TK	23		23
6	Pengawas SD	94		94
7	Pengawas SMP	7		7
8	Pengawas PAI	9		9
9	Penilik 53 orang	53		53
10	Staff	347	40	388
11	Kepala TK	3		3
12	Kepala Sekolah SD	953		953
13	Kepala Sekolah SMP	75		75
14	Kepala SPNF Sanggar Kegiatan Belajar	1		1
15	Guru TK	109	2.814	2.923
16	Guru SD	9.298	9.518	18.816
17	Guru SMP	3.447	6.362	9.809
18	Pamong Belajar	8		8
	Jumlah Total	14.442	18.734	32.788

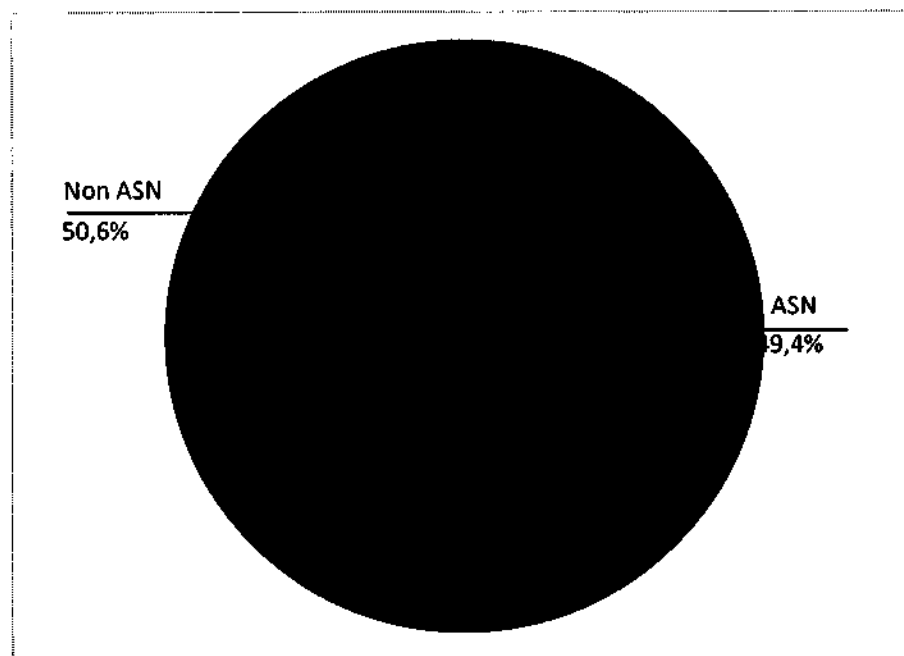
Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Jumlah seluruh pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, termasuk guru, berjumlah 32.788 orang, terdiri dari 14.442 pegawai ASN dan 18.734 pegawai non-ASN. Secara proporsional, pegawai non-ASN mencapai sekitar 50,18 persen dari total jumlah pegawai, yang menunjukkan bahwa komposisi tenaga kerja di lingkungan Dinas Pendidikan masih didominasi oleh pegawai non-ASN.

Kondisi tersebut menggambarkan adanya tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap tenaga non-ASN dalam mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan. Meskipun tenaga non-ASN memiliki kontribusi penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, dominasi proporsi ini juga menunjukkan adanya potensi kerentanan terhadap stabilitas sumber daya manusia, terutama terkait aspek keberlanjutan dan kepastian status kepegawaian.

Dengan demikian, komposisi tersebut menjadi indikator bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung masih memerlukan penambahan formasi ASN untuk memperkuat struktur kepegawaian yang lebih stabil, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan manajemen ASN dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan daerah.

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan status kepegawaian



Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

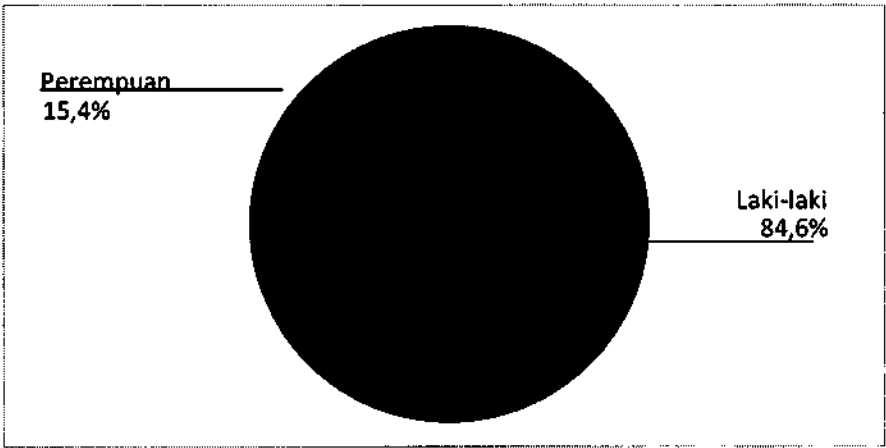
Pada tingkat pimpinan, posisi pejabat Eselon II diisi oleh 1 orang (laki laki), di tingkat Pejabat Eselon IIIa di isi oleh 1 orang (laki laki), pada tingkat Pejabat Eselon IIIb terdapat 4 orang (3 orang laki laki dan 1 orang perempuan), pada level Eselon IVa terdapat 9 pejabat (2 orang perempuan dan 7 orang laki laki). Sedangkan untuk Jabatan Fungsional Perencana di isi perencana ahli muda 1 orang (perempuan) hasil penyetaraan, Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah masih belum terisi karena belum ada pelaksanaan uji kompetensi untuk jabatan tersebut.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Struktural Dinas Pendidikan

No.	Nama Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pejabat Esselon II	1		1
2	Pejabat Esselon III a	1		1
3	Pejabat Esselon III b	3	1	4
4	Pejabat Esselon IV a	7	2	9
	Jumlah	11	2	13

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Struktural berdasarkan gender



Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Komposisi pegawai struktural pada Dinas Pendidikan menunjukkan adanya ketimpangan gender yang cukup menonjol. Berdasarkan data kepegawaian, proporsi pejabat struktural laki-laki mencapai 84,6%, sedangkan perempuan hanya sebesar 15,4%. Ketimpangan tersebut menggambarkan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural masih sangat terbatas, sehingga partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis di lingkungan Dinas Pendidikan relatif rendah.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan beberapa dampak, antara lain belum optimalnya penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam manajemen sumber daya manusia aparatur, serta terbatasnya keberagaman perspektif dalam perumusan

kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pendidikan. Ketidakseimbangan gender dalam jabatan struktural juga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif, mengingat peran dan pengalaman perempuan sering kali memberikan sudut pandang yang berbeda dan melengkapi dalam pengambilan kebijakan publik, termasuk di sektor pendidikan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi ini melalui penguatan kebijakan dan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Pendidikan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan sistem pembinaan karier yang lebih adil dan transparan, mendorong peningkatan kompetensi dan kepemimpinan perempuan, serta memastikan adanya kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses seleksi dan penempatan jabatan struktural.

Selain itu, diperlukan komitmen pimpinan dalam membangun budaya organisasi yang mendukung kesetaraan gender, termasuk dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dan peran strategisnya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proporsi jabatan struktural antara laki-laki dan perempuan dapat lebih seimbang, sehingga pengelolaan sumber daya manusia di Dinas Pendidikan menjadi lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

Untuk pengawasan pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki tenaga pengawas yang cukup besar, terutama di jenjang pendidikan dasar:

- Pengawas TK sebanyak 23 orang, didominasi oleh perempuan (22 perempuan, 1 laki-laki).
- Pengawas SD berjumlah 94 orang, terdiri dari 40 laki-laki dan 54 perempuan.
- Pengawas SMP sebanyak 7 orang, seluruhnya laki-laki.
- Pengawas PAI berjumlah 9 orang, dengan 7 laki-laki dan 2 perempuan.

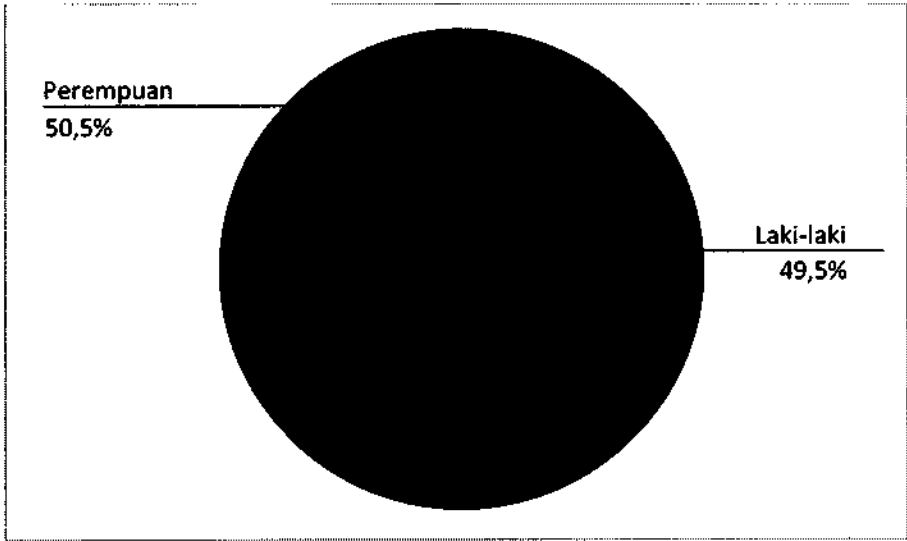
Sementara itu, penilik, yang bertugas memantau dan mengevaluasi pendidikan nonformal, berjumlah 53 orang, didominasi oleh 37 laki-laki dan 16 perempuan.

Tabel 2.3 Jumlah Pengawas dan Penilik Dinas Pendidikan

No.	Nama Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pengawas TK	1	22	23
2	Pengawas SD	40	54	94
3	Pengawas SMP	7		7
4	Pengawas PAI	7	2	9
5	Penilik 53 orang	37	16	53
	Jumlah	92	94	186

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Gambar 2.4 Jumlah Pegawai JFT berdasarkan gender



Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Berdasarkan data pengawas dan penilik pada Dinas Pendidikan, secara umum proporsi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kondisi yang relatif seimbang. Namun, jika ditinjau lebih rinci menurut jenjang pendidikan, masih terdapat ketimpangan gender pada posisi tertentu. Misalnya, jabatan Pengawas TK didominasi oleh perempuan, sedangkan Pengawas SMP seluruhnya laki-laki. Ketimpangan tersebut menunjukkan adanya pola peminatan dan persebaran karier yang belum sepenuhnya merata antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi ini berimplikasi terhadap potensi ketimpangan kesempatan karier dan keterwakilan gender dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pengawasan. Keterbatasan representasi gender tertentu dapat berpengaruh terhadap sensitivitas dan keberpihakan dalam pembinaan satuan pendidikan, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan pendidikan.

Sebagai upaya perbaikan, perlu dilakukan penguatan kebijakan afirmasi gender dalam proses rekrutmen, penempatan, dan promosi jabatan pengawas maupun penilik. Dinas Pendidikan juga perlu mendorong pengembangan kompetensi secara setara bagi seluruh pegawai tanpa memandang gender, melalui pelatihan, bimbingan karier, dan mekanisme seleksi yang transparan dan berkeadilan. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap keterwakilan gender dalam jabatan fungsional dan struktural perlu terus dilakukan untuk memastikan prinsip kesetaraan dan inklusivitas terwujud secara berkelanjutan.

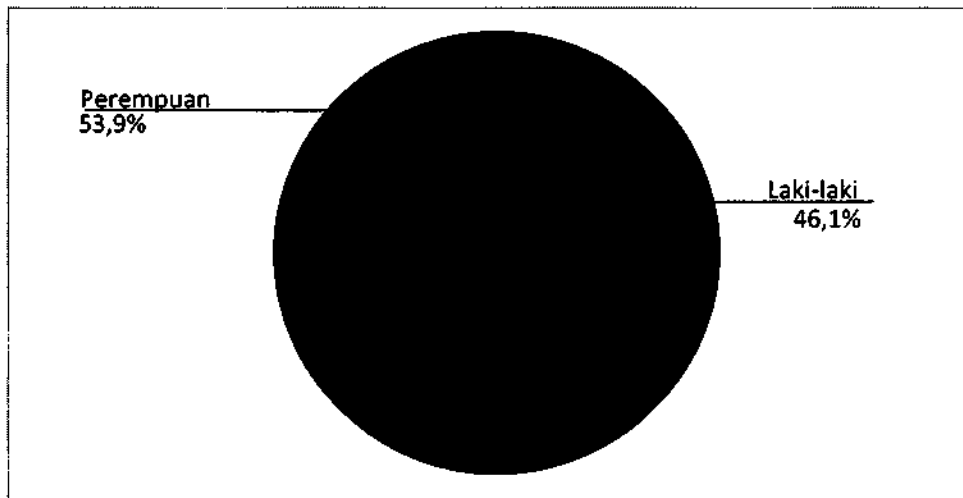
Di jajaran staf, terdapat 387 orang, yang terdiri dari 179 laki-laki dan 208 perempuan, dengan rincian 347 ASN (Aparatur Sipil Negara) dan 40 non-ASN.

Tabel 2.4 Jumlah Staff Dinas Pendidikan

No.	Nama Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	ASN	Non ASN	Jumlah
1	Staff	179	209	388	347	40	388

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Gambar 2.5 Staff/Pelaksana berdasarkan Gender



Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Jumlah staf Dinas Pendidikan sebanyak 388 orang, terdiri atas 179 laki-laki dan 209 perempuan, dengan status kepegawaian 348 ASN dan 40 non-ASN. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki proporsi sedikit lebih besar dibandingkan laki-laki dalam jajaran staf. Kondisi ini mencerminkan bahwa Dinas Pendidikan telah memberikan peluang yang relatif setara bagi laki-laki dan perempuan dalam proses perekrutan dan penempatan staf, terutama pada jabatan-jabatan fungsional dan administrasi yang tidak terlalu dipengaruhi oleh stereotip gender.

Namun demikian, pemerataan peluang belum dapat sepenuhnya dianggap selesai, mengingat keseimbangan kuantitatif belum tentu menggambarkan kesetaraan kualitas dan akses terhadap jenjang karier. Masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam memastikan bahwa perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi, pelatihan, dan promosi jabatan.

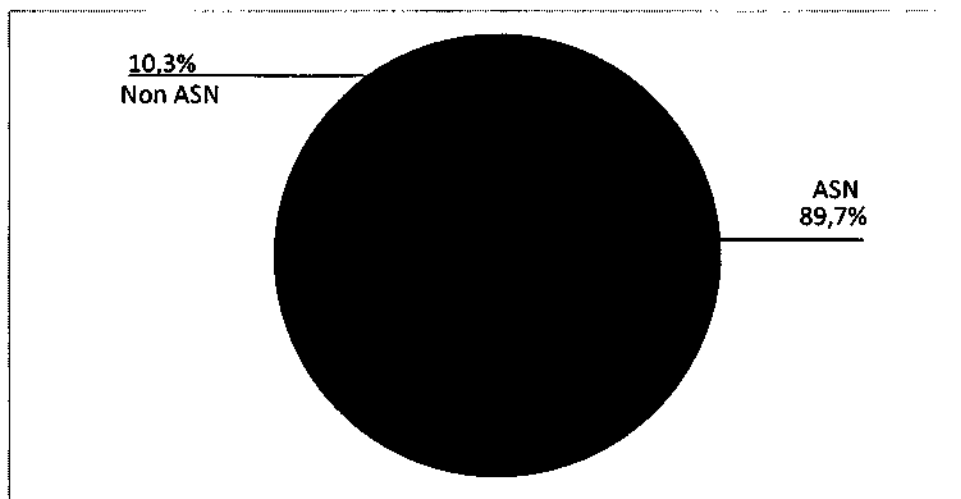
Upaya yang perlu diperkuat meliputi:

1. Penerapan prinsip gender equality dalam setiap tahapan rekrutmen, mutasi, dan promosi.

2. Penyusunan kebijakan internal sensitif gender, termasuk peningkatan kapasitas pegawai perempuan pada jabatan strategis.
3. Pemantauan dan evaluasi rutin terhadap komposisi staf berdasarkan gender di berbagai level jabatan untuk mencegah ketimpangan baru.

Dengan langkah-langkah tersebut, Dinas Pendidikan dapat lebih optimal dalam mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan dalam manajemen sumber daya manusia.

Gambar 2.6 Staff/Pelaksana berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Komposisi staf atau pelaksana pada Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa sebanyak 89,7 persen merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10,3 persen merupakan non-ASN. Proporsi ini menggambarkan bahwa sebagian besar tenaga pelaksana telah berstatus ASN, yang mencerminkan tingkat stabilitas dan keberlanjutan sumber daya manusia yang relatif tinggi. Sementara itu, keberadaan tenaga non-ASN dengan proporsi yang lebih kecil berperan sebagai pendukung pelaksanaan tugas operasional dan pelayanan teknis. Meskipun demikian, perlu tetap dilakukan pengelolaan dan pengembangan kapasitas bagi seluruh tenaga, baik ASN maupun non-ASN, agar kualitas layanan pendidikan tetap

terjaga dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi serta kebijakan reformasi birokrasi.

Untuk jenjang kepemimpinan satuan pendidikan, data menunjukkan adanya kekurangan kepala sekolah:

- Kepala TK Negeri hanya tersedia 3 orang, dengan kekurangan 2 kepala TK.
- Kepala Sekolah SD berjumlah 953 orang, namun masih terdapat kekurangan 231 kepala sekolah.
- Kepala Sekolah SMP sebanyak 75 orang, dengan kekurangan 13 orang.
- Kepala SPNF (Sanggar Kegiatan Belajar) terdapat 1 orang, yang merupakan perempuan.

Komposisi guru mencerminkan skala besar sektor pendidikan:

- Guru TK berjumlah 2.923 orang, terdiri dari 109 ASN dan 2.814 non-ASN, dengan 270 laki-laki dan 2.653 perempuan, menunjukkan dominasi perempuan dan tingginya ketergantungan pada tenaga non-ASN.
- Guru SD mencapai 18.816 orang, dengan distribusi yang hampir seimbang antara ASN (9.298) dan non-ASN (9.518), serta 6.821 laki-laki dan 11.995 perempuan.
- Guru SMP sebanyak 9.809 orang, terdiri dari 3.447 ASN dan 6.362 non-ASN, serta 4.333 laki-laki dan 5.476 perempuan.
- Pamong Belajar, yang berperan dalam pendidikan nonformal, berjumlah 8 orang, dengan komposisi seimbang antara 4 laki-laki dan 4 perempuan.

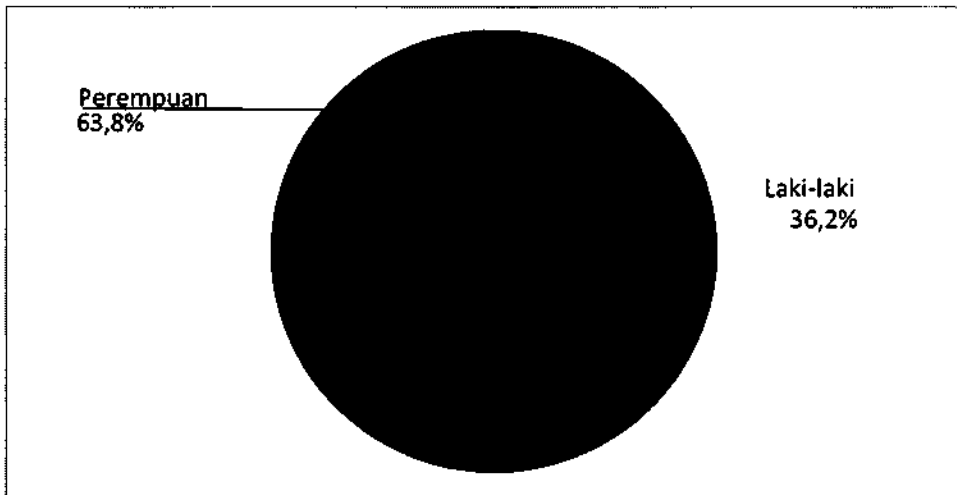
Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan menunjukkan struktur yang besar dan kompleks, dengan keterlibatan tenaga kerja dari berbagai latar belakang. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti kekurangan kepala sekolah di beberapa jenjang serta tingginya proporsi tenaga non-ASN, terutama pada level guru TK dan SMP. Isu-isu ini memerlukan perhatian strategis untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan pendidikan di wilayah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Guru

N o.	Nama Jabatan	Laki- laki	Perempu an	Juml ah	ASN	Non ASN	Juml ah
1	Kepala TK			-	3		3
2	Kepala Sekolah SD			-	953		953
3	Kepala Sekolah SMP			-	75		75
4	Kepala SPNF Sanggar Kegiatan Belajar		1	1	1		1
5	Guru TK	270	2.653	2.923	109	2.814	2.923
6	Guru SD	6.821	11.995	18.816	11.304	7.512	18.816
7	Guru SMP	4.333	5.476	9.809	3.799	6.010	9.809
8	Pamong Belajar	4	4	8	8		8
	Jumlah	11.428	20.129	31.557	16.452	16.336	32.588

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Gambar 2.7 Guru berdasarkan Gender



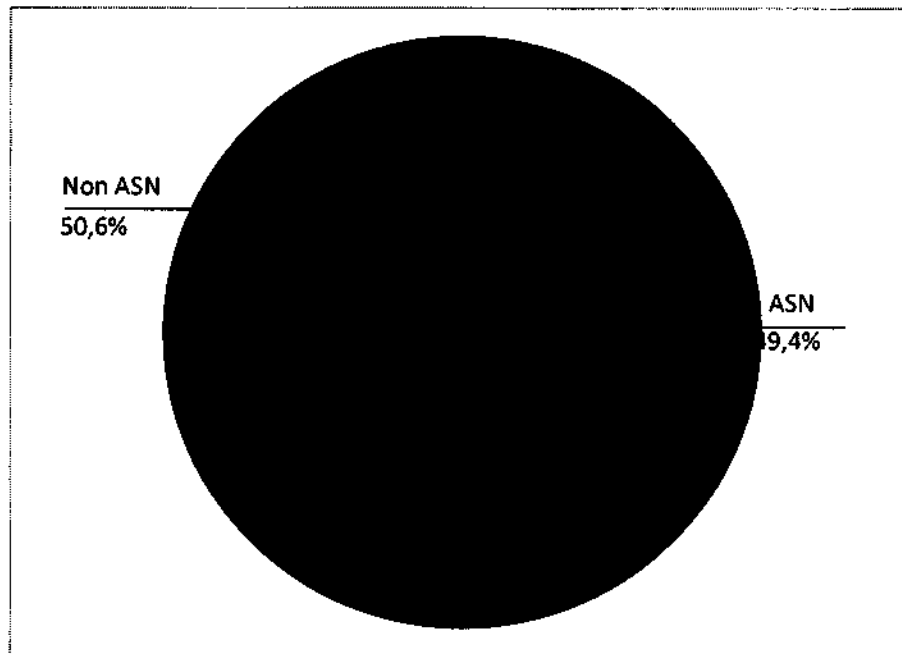
Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.5, jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Bandung mencapai 32.588 orang, yang terdiri atas 16.252 guru berstatus ASN dan 16.336 guru berstatus non-ASN. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi guru di Kabupaten Bandung seimbang dari total keseluruhan.

Dari aspek gender, tenaga guru dan kepala satuan pendidikan didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 20.129 orang (63,8%), sedangkan guru laki-laki berjumlah 11.428 orang (36,2%). Dominasi perempuan terlihat jelas pada jenjang pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, sementara pada jenjang SMP dan jabatan struktural seperti kepala sekolah masih relatif seimbang.

Komposisi tersebut menggambarkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung telah memiliki keterwakilan gender yang cukup baik di level pelaksana, namun perlu diperkuat dalam pengembangan karier dan distribusi jabatan strategis, agar kesetaraan gender dapat lebih merata di seluruh jenjang pendidikan. Selain itu, tingginya proporsi tenaga non-ASN menunjukkan pentingnya strategi peningkatan status dan kesejahteraan guru, serta penataan kebutuhan formasi ASN untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas tenaga pendidik di masa mendatang.

Gambar 2.8 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan status kepegawaian



Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Proporsi guru berdasarkan status kepegawaian menunjukkan bahwa sebanyak 50,6% guru berstatus non-ASN, sedangkan 49,4% berstatus ASN. Komposisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar tenaga pendidik masih belum memiliki status kepegawaian yang tetap dan terjamin secara hukum. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada tenaga non-ASN, yang berimplikasi pada kerentanan dalam stabilitas sumber daya manusia (SDM) pendidikan, baik dari sisi kesejahteraan, kepastian karier, maupun motivasi kerja jangka panjang.

Dari perspektif kesempatan akses terhadap status ASN atau PPPK, proporsi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan untuk menjadi ASN atau PPPK masih belum merata di kalangan guru. Perlu adanya kebijakan afirmatif yang memperluas peluang bagi guru non-ASN untuk memperoleh status kepegawaian yang lebih tetap melalui mekanisme seleksi ASN/PPPK yang transparan, objektif, dan

berkeadilan, terutama bagi guru yang telah lama mengabdikan diri di satuan pendidikan.

Selain itu, apabila dilihat dari aspek gender, apabila kelompok guru perempuan mendominasi jumlah total guru namun sebagian besar masih berstatus non-ASN, maka hal ini dapat menjadi indikasi ketimpangan dalam status formal dan keamanan kerja antara guru laki-laki dan perempuan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pengembangan SDM guru agar pemberian akses dan kesempatan peningkatan status kepegawaian tidak bias gender dan tetap menjamin kesetaraan dalam memperoleh perlindungan profesi, kesejahteraan, serta jenjang karier yang layak.

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan memiliki sarana dan prasarana yang menjadi aset dinas. Aset tersebut dibagi menjadi aset tetap dan aset lainnya. Aset tetap yang dimiliki berupa: i) tanah; ii) peralatan dan mesin; iii) gedung dan bangunan; iv) jalan, jaringan, dan instalasi; v) aset tetap lainnya; vi) konstruksi dalam pengerjaan, serta vii) akumulasi penyusutan.

Total aset tetap dimiliki Dinas Pendidikan Rp. 1.721.787.650.346, dimana Aset yang nilainya paling besar adalah aset gedung dan bangunan yaitu sebesar Rp 1.588.664.999.597. Sementara aset konstruksi dalam pengerjaan adalah aset dengan nilai paling kecil yaitu sebesar Rp 134.404.450. Seluruh aset ini telah tercatat di dalam KIB Dinas.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pendidikan

2.1.3.1 Data-data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan program, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan senantiasa mengacu pada data dan informasi yang valid sebagai dasar

perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya pendidikan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan urusan ini adalah pemahaman dan pengelolaan data demografi jumlah penduduk yang menjadi sasaran layanan pendidikan. Berdasarkan proyeksi demografi, jumlah penduduk yang menjadi target layanan Dinas Pendidikan diperkirakan akan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Data tersebut menjadi acuan utama dalam penentuan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel 2.6 Proyeksi Perubahan Jumlah Penduduk Kelompok Umur
Usia Sekolah

KELOMPOK UMUR	2025 (BASELINE)	PERIODE RENSTRA				
		2026	2027	2028	2029	2030
0	40121	39910	39699	39488	39277	39064
1	55555	55262	54969	54676	54383	54091
2	61608	61283	60959	60634	60309	59985
3	66592	66241	66241	66241	66241	64837
4	67354	66999	66644	66289	65934	65579
5	58043	57737	57431	57125	56819	56513
6	57148	56847	56545	56244	55943	55642
7	57676	57372	57068	56764	56460	56156
8	58335	58027	57720	57412	57105	56797
9	60030	59713	59397	59080	58764	58448
10	58077	57771	57465	57159	56853	56547
11	58576	58267	57958	57650	57341	57032
12	58657	58348	58039	57730	57421	57112
13	59319	59006	58694	58381	58068	57756
14	56601	56303	56005	55706	55408	55110
15	71797	71419	71041	70662	70284	69905
16	87120	85197	83275	81353	79430	77508
17	78408	76678	74948	73217	71847	69757
18	95831	93717	91602	89488	87373	85259

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah menggambarkan perubahan jumlah penduduk dalam kelompok usia pendidikan dasar dan menengah pada suatu wilayah selama periode tertentu. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan komponen demografis utama, yaitu laju kelahiran, laju kematian, serta pergerakan migrasi penduduk

Seiring dengan pertumbuhan penduduk usia sekolah, data eksisting ruang kelas di wilayah juga menjadi indikator bagi Dinas Pendidikan untuk mengetahui kapasitas saat ini dan merencanakan alokasi ruang kelas baru guna memenuhi standar nasional pendidikan. Saat ini, data ruang kelas menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan sesuai dengan proyeksi jumlah peserta didik agar pelayanan pendidikan dapat berlangsung optimal dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Dengan demikian, pengelolaan data demografi dan data sarana prasarana ruang kelas secara terpadu menjadi dasar strategis dalam pengembangan pendidikan di wilayah, mendukung tercapainya layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Tabel 2.7 Data Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMP status Negeri di Kabupaten Bandung

NO	NAMA SEKOLAH	RUANG KELAS				
		JUMLAH	RUSAK			
			JUMLAH	berat	sedang	ringan
1	SMPN 1 ARJASARI	30	8		2	6
2	SMPN 2 ARJASARI	0	12		5	7
3	SMPN 1 BALEENDAH	0	6	3	3	
4	SMPN 3 BALEENDAH	32	7			7
5	SMPN 4 BALEENDAH	4				4
6	SMPN 1 BANJARAN	35	0			
7	SMPN 2 BANJARAN	33	6			
8	SMPN 1 CANGKUANG	20	4		4	
9	SMPN 2 CANGKUANG	3				
10	SMPN 1 CICALENGKA	33	7		7	
11	SMPN 2 CICALENGKA	6	2		2	
12	SMPN 1 CIKANCUNG	0	9		9	
13	SMPN 2 CIKANCUNG	13	13		6	7
14	SMPN 3 CIKANCUNG	20	5		5	
15	SMPN 1 CILENGKRANG	9	3		3	
16	SMPN 2 CILENGKRANG	31	6	3	3	
17	SMPN 1 CILEUNYI	33	7	1	6	
18	SMPN 2 CILEUNYI	12	5		5	
19	SMPN 3 CILEUNYI	30	11		11	
20	SMPN 4 CILEUNYI	11	7	4	3	0
21	SMPN 5 CILEUNYI	30	0			

22	SMPN 1 CIMAUNG	31	14			
23	SMPN 2 CIMAUNG	2	0			
24	SMPN 1 CIMENYAN	17	6		6	
25	SMPN 2 CIMENYAN	30	4		4	
26	SMPN 3 CIMENYAN	0				
27	SMPN 4 CIMENYAN	25	4		4	
28	SMPN 1 CIPARAY	30	19		10	9
29	SMPN 2 CIPARAY	30	5		5	
30	SMPN 3 CIPARAY	24	5	5		
31	SMPN 1 CIWIDEY	30		4	2	2
32	SMPN 2 CIWIDEY	26	7		7	
33	SMPN 3 CIWIDEY	14	8		8	
34	SMPN 1 IBUN	33	14	2	11	1
35	SMPN 2 IBUN	24	3		3	
36	SMPN 3 IBUN	23	5	3	2	
37	SMPN 1 KATAPANG	31	8	2	6	
38	SMPN 2 KATAPANG	16	13		7	6
39	SMPN 3 KATAPANG	18				
40	SMPN 1 KERTASARI	33	5	3	2	
41	SMPN 2 KERTASARI	15	3	0	3	
42	SMPN 1 KUTAWARINGIN	20	6		6	
43	SMPN 2 KUTAWARING	7	0			
44	SMPN 1 MAJALAYA	10	0		4	
45	SMPN 1 MARGAASIH	32	0			
46	SMPN 2 MARGAASIH	4	0			
47	SMPN 1 MARGAHAYU	33	4		4	
48	SMPN 2 MARGAHAYU	24			2	
49	SMPN 3 MARGAHAYU	9			6	
50	SMPN 4 MARGAHAYU	33	0			
51	SMPN 1 NAGREG	5	5	5		
52	SMPN 1 PACET	2			2	
53	SMPN 2 PACET	31	31		3	
54	SMPN 3 PACET	7	6	6	1	
55	SMPN 1 PANGALENGAN	27	9			
56	SMPN 2 PANGALENGAN	27	10			
57	SMPN 3 PANGALENGAN	20	4			
58	SMPN 4 PANGALENGAN	3	5	5		
59	SMPN 1 PASIRJAMBU	1	2		11	
60	SMPN 2 PASIRJAMBU	10			10	
61	SMPN 1 RANCABALI	19			10	9
62	SMPN 2 RANCABALI	7	2		2	

63	SMPN 3 RANCABALI	24	2		2	
64	SMPN 1 RANCAEKEK	31			3	27
65	SMPN 2 RANCAEKEK	11	10		5	5
66	SMPN 3 RANCAEKEK	20	0		10	10
67	SMPN 4 RANCAEKEK	30	9	1	8	
68	SMPN 5 RANCAEKEK	0				
69	SMPN 2 SOLOKAN JERUK	33	2		2	
70	SMPN 3 SOLOKANJERUK	33	17		2	
71	SMPN 1 SOREANG	13	7			7
72	SMPN 2 SOREANG	0	9			9
73	SMPN 3 SOREANG	11	11		6	5
74	SMPN 4 SOREANG	12	5		5	
75	SMPN 5 SOREANG	20	8			
	Total	1406	405	47	258	121

Berdasarkan rekapitulasi data kondisi ruang kelas pada 75 SMP Negeri di Kabupaten Bandung, tercatat sebanyak 405 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan bervariasi, terdiri dari: 258 ruang kelas rusak sedang, 121 ruang kelas rusak ringan, dan 47 ruang kelas rusak berat. Sebagian besar ruang kelas yang mengalami kerusakan berada pada kategori rusak sedang, menunjukkan bahwa bangunan masih dapat difungsikan namun memerlukan rehabilitasi struktural atau non-struktural agar layak digunakan. Sementara ruang kelas rusak ringan membutuhkan pemeliharaan rutin agar tidak berkembang menjadi kerusakan lebih berat. Dari aspek persebaran, kondisi kerusakan tidak merata. Sekolah dengan jumlah ruang rusak tertinggi antara lain: SMPN 1 Ciparay (19 ruang rusak), SMPN 2 Arjasari (12 ruang rusak), SMPN 3 Cileunyi (11 ruang rusak), SMPN 1 Pacet (31 ruang rusak berat), yang mengindikasikan adanya kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, terdapat beberapa sekolah dengan kondisi ruang kelas yang relatif baik atau tidak mengalami kerusakan berarti, seperti SMPN 1 Banjaran, SMPN 5 Cileunyi, SMPN 1 Margaasih, dan SMPN 4 Margahayu. Sekolah-sekolah ini dapat menjadi contoh pengelolaan sarana prasarana yang baik dalam hal perawatan rutin bangunan.

Tabel 2.8 Data Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Ruang Kelas		
		Kondisi		
		Jumlah Ruang	Baik	Rusak
1	Arjasari	314	269	45
2	Baleendah	367	305	62
3	Banjaran	281	232	49
4	Bojongsoang	189	155	34
5	Cangkuang	118	92	26
6	Cicalengka	300	254	46
7	Cikancung	257	216	41
8	Cilengkrang	82	46	36
9	Cileunyi	223	186	37
10	Cimaung	214	178	36
11	Cimenyan	225	197	28
12	Ciparay	373	336	37
13	Ciwidey	217	178	39
14	Dayeuhkolot	218	176	42
15	Ibun	271	224	47
16	Katapang	175	145	30
17	Kertasari	263	221	42
18	Kutawaringin	226	199	27
19	Majalaya	357	316	41
20	Margaasih	249	206	43
21	Margahayu	151	100	51
22	Nagreg	163	135	28
23	Pacet	310	262	48
24	Pameungpeuk	193	154	39
25	Pangalengan	489	429	60
26	Paseh	330	274	56
27	Pasirjambu	258	212	46
28	Rancabali	190	164	26
29	Rancaekek	388	340	48
30	Solokanjeruk	241	208	33
31	Soreang	233	201	32
JUMLAH		7,865	6,610	1,255

Berdasarkan data kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan di Kabupaten Bandung, tercatat sebanyak 7.865 ruang kelas. Dari total ruang kelas tersebut, sebanyak 6.610 ruang (84,1%) berada dalam kondisi baik, sementara 1.255 ruang (15,9%) tercatat mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.

Secara umum, kondisi sarana ruang kelas menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan masih memiliki fasilitas belajar yang layak. Namun demikian, masih terdapat 1.255 ruang kelas yang memerlukan penanganan, baik melalui rehabilitasi maupun pembangunan baru, terutama di kecamatan dengan jumlah ruang rusak yang relatif tinggi seperti Pangalengan (60 ruang), Baleendah (62 ruang), dan Paseh (56 ruang).

Tabel 2.9 Penyajian Gap (Kebutuhan) Ruang Kelas jenjang Sekolah Dasar

Lokasi wilayah Kecamatan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Ruang kelas yang tersedia	Kebutuhan ruang kelas
Arjasari	389	319	70
Baleendah	845	494	351
Banjaran	414	292	122
Bojongsoang	356	246	110
Cangkuang	243	181	62
Cicalengka	482	350	132
Cikancung	354	286	68
Cilengkrang	194	101	93
Cileunyi	646	477	169
Cimaung	284	232	52
Cimencyan	361	278	83
Ciparay	571	455	116
Ciwidey	308	245	63
Dayeuhkolot	418	269	149
Ibun	323	302	21
Katapang	451	258	193
Kertasari	305	278	27
Kutawaringin	359	270	89
Majalaya	569	449	120
Margaasih	372	264	108
Margahayu	410	245	165

Lokasi wilayah Kecamatan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Ruang kelas yang tersedia	Kebutuhan ruang kelas
Nagreg	252	207	45
Pacet	407	373	34
Pameungpeuk	257	206	51
Pangalengan	571	535	36
Paseh	488	400	88
Pasirjambu	338	267	71
Rancabali	231	195	36
Rancaekek	703	550	153
Solokanjeruk	318	293	25
Soreang	399	266	133
Grand Total	12618	9583	3035

Sumber data : dapodikdasmen, kemdikdasmen , cut off desember 2024

Data menunjukkan kondisi ketersediaan ruang kelas dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar (rombel) di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Total Jumlah rombel: 12.618, Jumlah ruang kelas tersedia: 9.583, Kebutuhan ruang kelas tambahan: 3.035. Artinya, masih terdapat kekurangan 3.035 ruang kelas (sekitar 24% dari total kebutuhan) untuk dapat mengakomodasi seluruh rombel yang ada.

Rata-rata rasio ruang kelas terhadap rombel saat ini sekitar 0,76, artinya hanya tersedia 76 ruang untuk setiap 100 rombel. Gap sebesar 3.035 ruang kelas menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas infrastruktur pendidikan, yang dapat berdampak pada kepadatan siswa di ruang kelas, menurunkan kualitas pembelajaran, penggunaan sistem *shift* (pagi-siang) di beberapa sekolah, keterbatasan akses pendidikan bagi wilayah yang berkembang pesat.

Tabel 2.10 Penyajian Gap (Kebutuhan) Ruang Kelas jenjang Sekolah Menengah Pertama

NO	Nama Satuan Pendidikan	Total Rombel	Jumlah Ruang Kelas	Total Kebutuhan Ruang Kelas
1	SMPN 1 ARJASARI	26	29	-
2	SMPN 2 ARJASARI	14	14	-
3	SMP NEGERI 4 BALEENDAH	16	8	8
4	SMP NEGERI 5 BALEENDAH	14	15	-
5	SMPN BALEENDAH 1	36	36	-
6	SMPN BALEENDAH 2	33	33	-
7	SMPN BALEENDAH 3	33	23	10
8	SMPN 1 BANJARAN	40	24	16
9	SMPN 2 BANJARAN	31	31	-
10	SMPN BOJONGSOANG 1	29	30	-
11	SMPN BOJONGSOANG 2	24	23	1
12	SMP NEGERI 2 CANGKUANG	3	4	-
13	SMPN CANGKUANG 1	32	20	12
14	SMPN CICALENGKA 1	39	33	6
15	SMPN CICALENGKA 2	18	15	3
16	SMPN CIKANCUNG 1	29	28	1
17	SMPN CIKANCUNG 2	10	15	-
18	SMPN CIKANCUNG 3	21	23	-
19	SMPN CILENGKRANG 1	12	12	-
20	SMPN CILENGKRANG 2	26	20	6
21	SMP NEGERI 4 CILEUNYI	9	9	-
22	SMP NEGERI 5 CILEUNYI	21	10	11
23	SMPN 1 CILEUNYI	33	33	-
24	SMPN 2 CILEUNYI	33	34	-
25	SMPN 3 CILEUNYI	33	24	9
26	SMP NEGERI 2 CIMAUNG	3	3	-
27	SMPN 1 CIMAUNG	26	30	-

NO	Nama Satuan Pendidikan	Total Rombel	Jumlah Ruang Kelas	Total Kebutuhan Ruang Kelas
28	SMP NEGERI 4 CIMENYAN	6	5	1
29	SMPN 1 CIMENYAN	31	32	-
30	SMPN 2 CIMENYAN	10	10	-
31	SMPN 3 CIMENYAN	18	7	11
32	SMPN 1 CIPARAY	33	30	3
33	SMPN 2 CIPARAY	30	30	-
34	SMPN 3 CIPARAY	22	24	-
35	SMPN 1 CIWIDEY	31	31	-
36	SMPN 2 CIWIDEY	18	22	-
37	SMPN 3 CIWIDEY	13	13	-
38	SMPN 1 DAYEUKOLOT	35	31	4
39	SMPN 2 DAYEUKOLOT	35	37	-
40	SMPN 1 IBUN	33	33	-
41	SMPN 2 IBUN	24	24	-
42	SMPN 3 IBUN	18	15	3
43	SMP NEGERI 3 KATAPANG	17	8	9
44	SMPN 1 KATAPANG	32	31	1
45	SMPN 2 KATAPANG	31	26	5
46	SMPN 1 KERTASARI	26	28	-
47	SMPN 2 KERTASARI	26	23	3
48	SMP NEGERI 1 KUTAWARINGIN	35	33	2
49	SMPN 2 KUTAWARINGIN	15	6	9
50	SMPN 1 MAJALAYA	38	33	5
51	SMP NEGERI 3 MARGAASIH	5	3	2
52	SMPN 1 MARGAASIH	35	32	3
53	SMPN 2 MARGAASIH	30	20	10
54	SMP NEGERI 4 MARGAHAYU	5	3	2
55	SMPN 1 MARGAHAYU	33	36	-
56	SMPN 2 MARGAHAYU	30	29	1
57	SMPN 3 MARGAHAYU	29	29	-
58	SMPN 1 NAGREG	38	34	4
59	SMPN 1 PACET	33	31	2
60	SMPN 2 PACET	21	18	3

NO	Nama Satuan Pendidikan	Total Rombel	Jumlah Ruang Kelas	Total Kebutuhan Ruang Kelas
61	SMPN 3 PACET	15	14	1
62	SMPN PAMEUNGPEUK 1	35	35	-
63	SMPN PAMEUNGPEUK 2	24	23	1
64	SMPN PANGALENGAN 1	38	27	11
65	SMPN PANGALENGAN 2	30	30	-
66	SMPN PANGALENGAN 3	18	17	1
67	SMPN PANGALENGAN 4	26	24	2
68	SMPN 1 PASEH	33	34	-
69	SMPN 2 PASEH	26	27	-
70	SMPN 3 PASEH	20	18	2
71	SMPN PASIRJAMBU 1	42	30	12
72	SMPN PASIRJAMBU 2	11	11	-
73	SMPN 1 RANCABALI	29	29	-
74	SMPN 2 RANCABALI	8	0	8
75	SMPN 3 RANCABALI	9	10	-
76	SMP NEGERI RANCAEKEK 5	4	4	-
77	SMPN RANCAEKEK 1	32	31	1
78	SMPN RANCAEKEK 2	29	27	2
79	SMPN RANCAEKEK 3	39	33	6
80	SMPN RANCAEKEK 4	28	28	-
81	SMP NEGERI SOLOKANJERUK 3	3	3	-
82	SMPN SOLOKANJERUK 1	33	33	-
83	SMPN SOLOKANJERUK 2	29	30	-
84	SMP NEGERI SOREANG 2	7	2	5
85	SMP NEGERI SOREANG 4	4	8	-
86	SMP NEGERI SOREANG 5	2	2	-
87	SMPN 1 SOREANG	33	33	-
88	SMPN 3 SOREANG	33	33	-

NO	Nama Satuan Pendidikan	Total Rombel	Jumlah Ruang Kelas	Total Kebutuhan Ruang Kelas
	Total	2120	1942	178

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penyajian gap kebutuhan ruang kelas pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), diketahui bahwa jumlah keseluruhan rombongan belajar (rombel) mencapai 2.120, sementara jumlah ruang kelas yang tersedia hanya sebanyak 1.942 ruang. Dengan demikian, terdapat kekurangan atau gap sebanyak 178 ruang kelas yang perlu segera mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan sarana prasarana pendidikan.

Secara umum, ketersediaan ruang kelas di jenjang SMP di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan ideal untuk mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar yang optimal. Masih terdapat sejumlah satuan pendidikan dengan kekurangan ruang kelas yang cukup signifikan. Beberapa sekolah yang memiliki gap tertinggi antara lain SMPN 1 Banjaran dengan kekurangan 16 ruang kelas, SMPN 1 Pasirjambu dan SMPN 1 Cangkuang masing-masing kekurangan 12 ruang kelas, SMPN 3 Cimenyan dan SMPN 1 Pangalengan masing-masing kekurangan 11 ruang kelas, serta SMPN 5 Cileunyi dan SMPN 2 Rancabali yang masing-masing kekurangan 11 dan 8 ruang kelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekurangan ruang kelas terjadi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan pertumbuhan peserta didik yang pesat.

Jika dilihat secara keseluruhan, rasio ketersediaan ruang kelas terhadap jumlah rombel berada pada angka 0,92, yang berarti setiap 100 rombel hanya tersedia 92 ruang kelas. Kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan kapasitas ruang belajar sekitar 8 persen yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan proses pembelajaran. Dalam praktiknya, kekurangan ruang kelas dapat menyebabkan penggunaan ruang secara bergantian (double

shift), penggunaan ruang non-belajar untuk kegiatan belajar mengajar, serta menurunkan kenyamanan dan mutu pembelajaran.

Sebaran kebutuhan ruang kelas tidak merata di seluruh wilayah. Sekolah-sekolah yang berlokasi di kecamatan dengan konsentrasi penduduk tinggi seperti Baleendah, Banjaran, Cileunyi, Pangalengan, dan Pasirjambu menjadi wilayah dengan tingkat kebutuhan tambahan ruang kelas yang lebih besar dibanding wilayah lainnya. Hal ini mencerminkan adanya tekanan terhadap kapasitas sarana pendidikan akibat pertumbuhan jumlah peserta didik yang tidak seimbang dengan pembangunan ruang belajar baru.

Ketersediaan dan kelayakan ruang kelas memiliki pengaruh langsung terhadap capaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP. Kekurangan ruang kelas menyebabkan terbatasnya daya tampung sekolah, sehingga sebagian anak usia sekolah menengah pertama tidak dapat tertampung dalam sistem pendidikan formal di wilayahnya. Kondisi ini berdampak pada rendahnya APM karena sebagian peserta didik usia 13-15 tahun terpaksa menempuh pendidikan di luar wilayah, menunda sekolah, atau bahkan tidak melanjutkan pendidikan.

Selain itu, ruang kelas yang tidak layak atau rusak juga berpengaruh terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran peserta didik, dan kenyamanan guru dalam mengajar. Kualitas sarana yang rendah dapat menurunkan efektivitas pembelajaran dan secara tidak langsung menghambat peningkatan APK, karena minat masyarakat terhadap pendidikan formal dapat menurun akibat persepsi terhadap keterbatasan fasilitas sekolah.

Sebaliknya, apabila kebutuhan ruang kelas dapat terpenuhi dan kondisi ruang belajar terjaga dalam kategori layak dan aman, maka daya tampung sekolah akan meningkat secara signifikan. Peningkatan ini akan mendorong bertambahnya jumlah peserta didik yang dapat diterima di sekolah negeri, sehingga berdampak langsung pada peningkatan APK sebagai indikator partisipasi keseluruhan, serta APM sebagai indikator partisipasi murni sesuai kelompok usia. Dalam

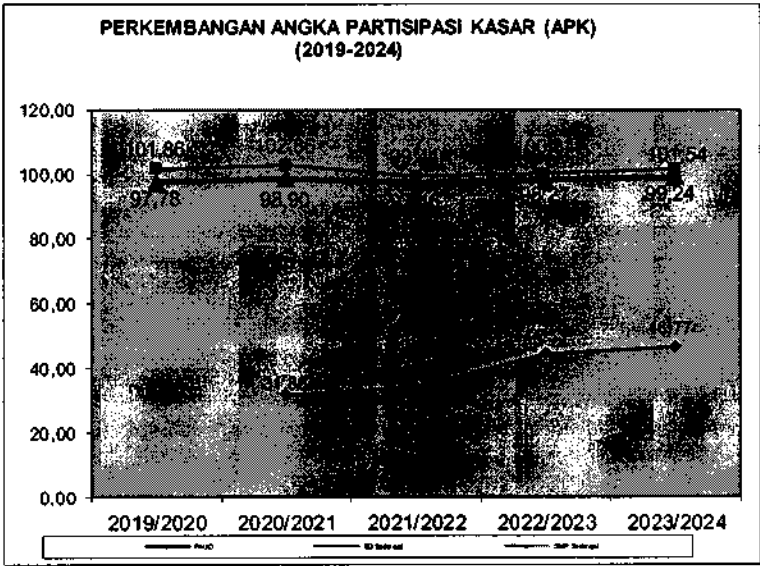
jangka menengah, peningkatan ketersediaan dan kelayakan ruang kelas juga berkontribusi terhadap pemerataan kesempatan belajar antarwilayah, pengurangan angka putus sekolah, serta peningkatan mutu layanan pendidikan dasar.

Tabel 2.11 Perkembangan APK dan APM menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019/2020 – 2023/2024

No.	Jenjang Pendidikan	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	APK					
	PAUD		31.86	34.25	44.53	46.77
	SD Sederajat	101.86	102.86	99.41	100.34	101.54
	SMP Sederajat	97.78	98.90	97.46	98.27	99.24
2	APM					
	SD Sederajat	92.42	95.37	93.62	94.57	94.93
	SMP Sederajat	77.55	76.32	76.68	77.83	78.16

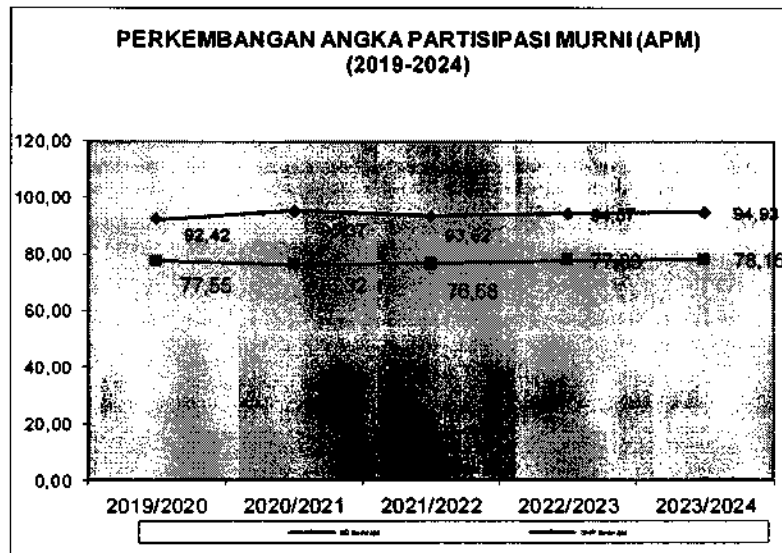
Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Gambar 2.9 Data Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)



Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Gambar 2.10 Data Perkembangan angka Partisipasi Murni (APM)



Tabel 2.11 dan Gambar 2.9 dan 2.10 menyajikan data perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan PAUD, SD sederajat, dan SMP sederajat selama periode enam tahun, dari tahun ajaran 2019/2020 hingga 2023/2024. Secara rinci pada bagian APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD mengalami peningkatan dari 31,86 pada tahun 2020/2021 menjadi 46,77 pada tahun 2023/2024. SD sederajat juga meningkat dari 101,86 pada tahun 2019/2020 menjadi 101,54 pada tahun 2023/2024, dengan angka fluktuasi di tahun-tahun tengah tapi tetap stabil di atas 99. SMP sederajat menunjukkan kenaikan dari 97,78 pada tahun 2019/2020 menjadi 99,24 pada tahun 2023/2024. Pada bagian APM (Angka Partisipasi Murni):

- SD sederajat meningkat dari 92,42 pada tahun 2019/2020 menjadi 94,93 pada tahun 2023/2024.
- SMP Sederajat relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari 77,55 pada tahun 2019/2020 menjadi 78,16 pada tahun 2023/2024.

Secara keseluruhan, tabel menunjukkan tren peningkatan partisipasi pendidikan dari tahun ke tahun baik pada tingkat kasar maupun murni, dengan kenaikan yang paling signifikan pada jenjang PAUD. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan akses dan partisipasi siswa dalam pendidikan dasar dan menengah selama periode tersebut.

Penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang terjadi pada seluruh jenjang pendidikan dari tahun 2020/2021 ke tahun 2021/2022 merupakan fenomena yang berkaitan erat dengan dinamika sosial, ekonomi, serta kondisi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Pada periode tersebut, sebagian besar satuan pendidikan masih berada dalam masa transisi dari sistem pembelajaran daring menuju pembelajaran tatap muka terbatas. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan interaksi belajar, menurunnya motivasi peserta didik, serta meningkatnya risiko putus sekolah, khususnya di wilayah dengan akses internet dan perangkat belajar yang terbatas.

Selain faktor pandemi, penurunan APK juga dipengaruhi oleh tekanan ekonomi keluarga akibat menurunnya pendapatan rumah tangga selama masa krisis. Sebagian peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah terpaksa menunda atau menghentikan pendidikan untuk membantu perekonomian keluarga. Di sisi lain, perubahan pola migrasi penduduk dan perpindahan tempat tinggal pascapandemi juga berkontribusi terhadap ketidaksesuaian data peserta didik aktif pada tahun ajaran berikutnya, sehingga tercermin sebagai penurunan angka partisipasi.

Faktor lain yang turut berpengaruh adalah keterbatasan kapasitas daya tampung sekolah, terutama di jenjang Sekolah Menengah Pertama, yang belum sepenuhnya mampu menampung seluruh lulusan dari jenjang sebelumnya. Kekurangan ruang kelas, keterbatasan sarana belajar, serta belum meratanya akses pendidikan di beberapa kecamatan menyebabkan sebagian peserta didik usia sekolah tidak dapat segera melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Dengan demikian, penurunan APK pada periode tersebut merupakan dampak kumulatif dari kondisi pandemi, tekanan ekonomi, serta keterbatasan infrastruktur pendidikan. Kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem ketahanan pendidikan, memperluas akses sarana prasarana yang layak, serta meningkatkan program intervensi bagi anak usia sekolah agar tidak terhenti dari jalur pendidikan formal.

Meskipun Angka Partisipasi Kasar (APK) pada seluruh jenjang pendidikan mengalami penurunan antara tahun 2020/2021 dan 2021/2022, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) justru mampu mempertahankan tren positif dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah sesuai kelompok umur 13–15 tahun yang bersekolah tepat waktu dan menyelesaikan pendidikan dasarnya di jenjang SMP.

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan APM meskipun di tengah kondisi pandemi dan penurunan APK secara umum antara lain adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan layanan pendidikan dasar. Implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh yang adaptif, pemberian bantuan kuota internet dan perangkat belajar bagi peserta didik kurang mampu, serta dukungan sosial melalui program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mampu mempertahankan keterlibatan peserta didik usia SMP dalam proses pembelajaran.

Selain itu, APM SMP meningkat karena sebagian besar peserta didik pada kelompok usia wajib belajar tetap melanjutkan pendidikan meskipun dalam kondisi pembatasan aktivitas sekolah. Hal ini didukung oleh meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan dasar sembilan tahun, serta pengawasan aktif dari sekolah dan pemerintah terhadap potensi putus sekolah. Dengan kata lain, meskipun jumlah keseluruhan peserta didik di sekolah (APK) menurun karena sebagian siswa yang berusia di atas atau di bawah rentang usia ideal tertunda melanjutkan sekolah, namun proporsi anak usia tepat (13–15 tahun) yang bersekolah justru meningkat.

Tabel 2.12 Rasio Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun
2023/2024

No.	Jenjang Pendidikan	Sekolah/Siswa	Guru/Siswa	Rombel/ Siswa	R.Kls / Rombel	Guru/ Sekolah
1	TK + RA	39	13	14	1	3
	a. TK	39	16	14	1	2

	b. RA	44	10	13	1	4
2	c. PAUD	37	15	15	1	2
3	SD + MI	247	24	28	1	10
	a. SD	257	25	29	1	10
	b. MI	186	18	21	1	10
4	SMP + MTs	300	18	29	1	17
	a.SMP	390	20	34	1	19
	b.MTs	167	12	19	1	14

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Berikut adalah analisa data dari tabel "Rasio Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023/2024":

1. Jumlah Sekolah/Siswa:

Indikator rasio (jumlah) sekolah terhadap siswa menggambarkan tingkat ketersediaan dan daya tampung satuan pendidikan dibandingkan dengan jumlah peserta didik di suatu wilayah. Jika rasio sekolah rendah (banyak siswa per sekolah), hal ini menunjukkan beban daya tampung tinggi, potensi kelebihan murid, dan perlunya penambahan sekolah baru atau ruang belajar. Sebaliknya, rasio sekolah tinggi (sedikit siswa per sekolah) dapat menunjukkan pemerataan sekolah sudah baik, atau di sisi lain, daya serap siswa rendah akibat menurunnya jumlah penduduk usia sekolah. Tidak ada angka baku nasional untuk rasio sekolah terhadap siswa, tetapi secara umum Untuk jenjang SD, 1 sekolah idealnya menampung sekitar 150–250 siswa. Untuk jenjang SMP, sekitar 300–500 siswa per sekolah dianggap masih proporsional.

Jenjang SMP + MTs memiliki jumlah siswa terbanyak (300 orang untuk gabungan SMP + MTs), yang diikuti oleh SD + MI (247 siswa). TK + RA memiliki jumlah siswa paling sedikit (39 siswa). PAUD memiliki jumlah sekolah/siswa paling rendah dibandingkan jenjang lain (37 siswa).

2. Rasio Guru/Siswa:

Indikator rasio guru terhadap siswa menggambarkan ketersediaan tenaga pendidik dibandingkan jumlah peserta didik, yang berpengaruh langsung pada kualitas proses belajar mengajar. Rasio rendah (lebih sedikit siswa per guru) menunjukkan layanan pendidikan lebih individual dan efektif, namun bisa juga menandakan inefisiensi jika jumlah siswa terlalu sedikit. Rasio tinggi (terlalu banyak siswa per guru) menunjukkan beban kerja guru berat dan berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran. Sebagai acuan umum dari standar nasional pendidikan SD idealnya sekitar 1 guru untuk 20–25 siswa. SMP idealnya sekitar 1 guru untuk 25–30 siswa. Rasio ini membantu pemerintah menilai pemerataan distribusi guru, kecukupan tenaga pendidik, serta prioritas kebijakan rekrutmen dan penempatan guru agar mutu layanan pendidikan tetap terjaga. di Kabupaten Bandung , rasio guru terhadap siswa relatif bervariasi di tiap jenjang. Paling tinggi rasio guru/siswa ada di SD (25 siswa) dan PAUD (15 siswa), menunjukkan jumlah guru yang cukup memadai dibandingkan jumlah siswa. Jenjang MI dan MTs memiliki rasio guru/siswa yang lebih rendah (18 dan 12), ini bisa menunjukkan beban guru lebih besar per siswa.

3. Rasio Siswa Per Kelas (Rombel Siswa):

Indikator rasio siswa per kelas (rombongan belajar) menggambarkan tingkat kepadatan ruang belajar dan efisiensi pemanfaatan ruang kelas dalam suatu satuan pendidikan. Rasio yang tinggi (terlalu banyak siswa dalam satu kelas) menunjukkan kepadatan belajar tinggi, yang dapat menurunkan kualitas interaksi guru-siswa dan efektivitas pembelajaran. Rasio yang terlalu rendah bisa menandakan daya tampung ruang tidak optimal atau jumlah siswa menurun. Sebagai acuan dari Standar Nasional Pendidikan (Permendikbud No. 22 Tahun 2016):

Jenjang SD: idealnya 20–28 siswa per kelas.

Jenjang SMP: idealnya 28–32 siswa per kelas.

Indikator ini penting untuk menilai kualitas proses belajar, kebutuhan penambahan atau pengurangan ruang kelas, serta efisiensi penggunaan sarana pendidikan di tiap wilayah.

Rasio siswa per kelas rata-rata berkisar antara 13 (RA) hingga 14 (TK), dengan rata-rata sekitar 20–30 siswa per kelas di sebagian besar jenjang.

TK memiliki nilai tertinggi rasio siswa per kelas (14), yang menunjukkan kelas TK cenderung lebih besar dibanding jenjang lain.

4. Rombel/Kelas

Indikator rasio rombongan belajar (rombel) terhadap ruang kelas menggambarkan tingkat kecukupan sarana fisik pendidikan, khususnya ketersediaan ruang kelas dibandingkan jumlah rombel yang ada. Rasio > 1 (rombel lebih banyak daripada ruang kelas) menunjukkan kekurangan ruang kelas, yang biasanya menyebabkan penggunaan ruang bergantian (shift) atau kepadatan belajar tinggi.

Rasio < 1 berarti ruang kelas lebih banyak dari rombel, yang bisa menunjukkan daya tampung berlebih atau penurunan jumlah siswa.

Secara umum, rasio ideal rombel terhadap ruang kelas adalah 1:1, artinya setiap rombongan belajar memiliki satu ruang kelas yang layak digunakan. Indikator ini penting untuk menilai kesiapan sarana pendidikan, prioritas rehabilitasi atau pembangunan ruang kelas baru, serta efisiensi penggunaan fasilitas sekolah dalam mendukung mutu pembelajaran. Rata-rata kelas per rombongan belajar (RJKs) adalah 1 di seluruh jenjang, yang menandakan pengelolaan kelas yang konsisten. (penjelasan ada di sub bab mengenai gap antara rombongan belajar dan ruang kelas)

5. Rasio Guru/Sekolah

Indikator rasio guru terhadap sekolah menggambarkan ketersediaan tenaga pendidik di setiap satuan pendidikan. Indikator ini menunjukkan apakah jumlah guru di suatu wilayah sudah memadai untuk mendukung proses pembelajaran di setiap sekolah.

Rasio rendah (sedikit guru per sekolah) menandakan kekurangan tenaga pendidik, yang dapat berdampak pada beban mengajar tinggi dan menurunnya kualitas pembelajaran. Rasio tinggi (banyak guru per sekolah) bisa menunjukkan kecukupan atau kelebihan tenaga pendidik, tergantung pada jumlah rombel dan siswa yang dilayani. Secara umum, rasio ideal bervariasi menurut jenjang:

SD: sekitar 10–15 guru per sekolah, menyesuaikan dengan jumlah rombel (kelas I–VI).

SMP: sekitar 15–25 guru per sekolah, tergantung jumlah mata pelajaran dan rombel.

Indikator ini penting untuk analisis distribusi dan kebutuhan guru, serta menjadi dasar perencanaan rekrutmen, redistribusi, atau pemenuhan formasi ASN/PPPK di sektor pendidikan.

Jumlah guru per sekolah paling tinggi ada di SMP (19), menunjukkan beban administratif dan pengajaran yang lebih besar dibanding jenjang lain.

2.1.3.2. Hasil evaluasi capaian pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020-2024

Tabel 2.13 Capaian Indikator Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	RLS	8.96	9.07	9.08	9.10	9.15
2	HLS	12.69	12.70	12.71	12.73	12.74
3	IPM	72.69	73.03	73.46	74.03	74.59
4	IP	10.83	10.89	10.90	10.92	10.95
5	SPM Pendidikan	70	77.75	84.91	100	100
6	Nilai AKIP	-	80.87	81.15	83.35	83.56
7	Nilai BMD	92.00	93.00	93.00	94.11	94.11

Sumber : Manajemen Data Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2020 - 2024

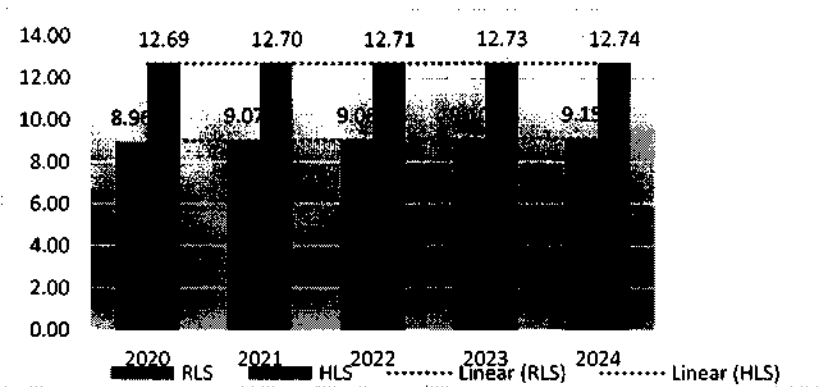
Peningkatan kualitas SDM ditandai oleh semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dapat terlihat dari tiga indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Dalam indikator pendidikan dapat diukur dari Angka Harapan Lama Sekolah serta rata-rata lama sekolah. Faktor lain yang berpengaruh

terhadap kualitas pendidikan adalah belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah. Pencermatan atas data sebaran RLS dan HLS menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan RLS dan HLS. Peningkatan signifikan HLS dan RLS terjadi di daerah/wilayah yang berkarakter urban, sementara kondisi di wilayah rural, akibat berbagai sebab mengalami perlambatan.

Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata Rata Lama Sekolah (RLS). Indikator Index Pendidikan menggambarkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang Diukur dari aspek Pendidikan. Index pendidikan dapat diukur dari Angka Harapan Lama Sekolah serta rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lama sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk umur yang sama saat ini, angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pemerintah telah mencanangkan program lanjutan dari Wajib belajar 9 Tahun yaitu Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau wajib belajar 12 Tahun sehingga diharapkan anak-anak usia sekolah mampu mengikuti pendidikan hingga tamat setara jenjang SMA. Apabila program ini sudah ditindaklanjuti juga oleh pemerintah daerah, maka diharapkan sebagian besar penduduk Kabupaten Bandung minimal berpendidikan setara jenjang SMA Sederajat. Hal ini menjadi tugas bersama untuk mewujudkan keberhasilan program wajib belajar 12 tahun yang akan tercermin dari indikator dari rata-rata lama sekolah harus setara dengan telah menyelesaikan jenjang pendidikan SMA.

Tabel 2.14 Capaian HLS dan RLS Di kabupaten Bandung Tahun 2020-2024



Sumber : Manajemen Data Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Tabel 2.14 memperlihatkan bahwa kondisi capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan walaupun belum signifikan. Pada Tahun 2020 RLS sebesar 8,96; pada tahun 2021 RLS sebesar 9,07; pada tahun 2022 RLS sebesar 9,08; pada tahun 2023 RLS sebesar 9,10; pada tahun 2024 RLS sebesar 9,15.

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bandung pada Tahun 2020 mencapai 12,69; pada Tahun 2021 mencapai 12,70 ; Pada tahun 2022 mencapai 12,71; pada tahun 2023 mencapai 12,73; dan terus meningkat pada tahun 2024 mencapai 12,74.

Pencapaian pembangunan manusia dari komponen pendidikan diperlihatkan bahwa laju pertumbuhan komponen pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata Rata Lama Sekolah (RLS) terus mengalami peningkatan.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu Pelayanan Dasar			
			2021	2022	2023	2024
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
		Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)			67.36	82.17
		Rasio pengawas sekolah untuk PAUD			11	11.15
		Kecukupan formasi guru ASN			N/A	N/A
		Indeks distribusi guru			N/A	0.29

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu Pelayanan Dasar			
			2021	2022	2023	2024
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
2	Pendidikan Dasar	Proporsi PTK bersertifikat			43.7	54.13
		Proporsi PTK penggerak			2.95	4.49
		Angka partisipasi kasar			103.34	101.53
		Angka partisipasi sekolah			99.99	99.94
		Angka partisipasi murni			94.57	0
		Kemampuan literasi			66.46	77.4

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu Pelayanan Dasar			
			2021	2022	2023	2024
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
		Kemampuan numerasi			48.65	69.15
		Perbedaan Skor Literasi			2.39	2.62
		Perbedaan Skor numerasi			1.31	1.1
		Indeks iklim keamanan			68.97	74.54
		Indeks iklim kebinekaan			61.66	72.76
		Indeks iklim inklusivitas			N/A	56.78

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu Pelayanan Dasar			
			2021	2022	2023	2024
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
		Kecukupan formasi guru ASN			19	16.11
		Indeks distribusi guru			0.34	0.23
		Proporsi PTK bersertifikat			85.45	26.89
		Proporsi PTK penggerak			0.07	N/A
		Pengalaman pelatihan guru			48.2	N/A

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu Pelayanan Dasar			
			2021	2022	2023	2024
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
		Angka partisipasi kasar			98.27	99.23
		Angka partisipasi sekolah			91.34	93.83
		Angka partisipasi murni			77.83	0
		Kemampuan literasi			66.39	93.83
		Kemampuan numerasi			44.74	67.84
		Perbedaan Skor Literasi			2.2	3.5
		Perbedaan Skor numerasi			0.69	1.73

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu Pelayanan Dasar			
			2021	2022	2023	2024
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
		Indeks iklim keamanan			67.4	69.57
		Indeks iklim kebinekaan			64.77	71.04
		Indeks iklim inklusivitas			64.77	55.77
		Kecukupan formasi guru ASN			44	10.44
		Indeks distribusi guru			0.31	0.37

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu Pelayanan Dasar			
			2021	2022	2023	2024
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
		Proporsi PTK bersertifikat			87.1	38.98
		Proporsi PTK penggerak			0.16	N/A
		Pengalaman pelatihan guru			N/A	N/A
		Angka partisipasi kasar			65.58	N/A
		Angka partisipasi sekolah			65.58	10.64
3	Pendidikan Kesetaraan					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu Pelayanan Dasar			
			2021	2022	2023	2024
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
		Angka partisipasi murni			N/A	N/A
		Kemampuan literasi			45.7	57.5
		Kemampuan numerasi			32.31	52.62
		Perbedaan skor literasi			2.8	1.2
		Perbedaan skor numerasi			2.12	1.03
		Indeks iklim keamanan			68.34	68.47

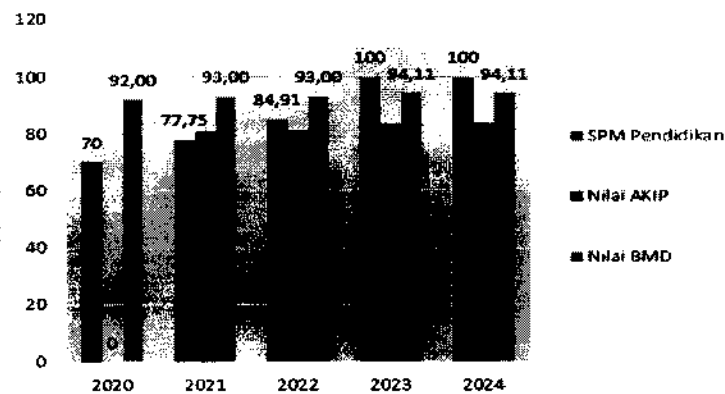
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu Pelayanan Dasar			
			2021	2022	2023	2024
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
		Indeks iklim kebinekaan			64.48	62.14
		Indeks iklim inklusivitas			64.48	54.58
		Kecukupan formasi guru ASN			N/A	N/A
		Indeks distribusi guru			N/A	N/A
		Proporsi PTK bersertifikat			N/A	N/A

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Mutu Pelayanan Dasar			
			2021	2022	2023	2024
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
		Proporsi PTK penggerak			N/A	N/A
		Pengalaman pelatihan guru			N/A	N/A

Sumber : Monitoring dan Evaluasi SPM Kabupaten Bandung Tahun 2024, 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Permendagri 59 tahun 2021. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik. Contoh Indikator: Literasi, Numerasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas.

Tabel 2.16 Capaian SPM Pendidikan, Nilai AKIP dan Nilai BMD Tahun 2020-2024



Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Berikut tabel capaian indikator prioritas SPM Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2022-2024.

Tabel 2.17 Realisasi Capaian Indikator Prioritas

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan	Realisasi Capaian Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Skor Kemampuan Literasi SD	n/a	54.69	60.96	63.63
Skor Kemampuan Literasi SMP	n/a	60.69	68.7	71.12
Skor Kemampuan Numerasi SD	n/a	28.50	48.86	56.77

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan	Realisasi Capaian Tahun			
Skor Kemampuan Numerasi SMP	n/a	39.64	60.95	62.74
Angka Partisipasi Sekolah (APS)Penduduk Usia 7-15 Tahun	n/a	97.55	98.00	98.48
Angka Partisipasi Sekolah (APS)Penduduk Usia 5- 6 Tahun	n/a	31.29	73.54	61.41
Angka Partisipasi Sekolah (APS)Penduduk Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan	n/a	10.64	10.64	14.64
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	n/a	70.16	67.24	67.90
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	n/a	38.89	82.17	82.17
Iklim Inklusivitas SD	n/a	1.98	56.78	61.29
Iklim Inklusivitas SMP	n/a	1.91	55.77	57.01
Iklim Keamanan SD	n/a	2.26	74.54	77.05
Iklim Keamanan SMP	n/a	2.32	69.58	70.43
Iklim Kebinekaan SD	n/a	2.18	72.77	72.96
Iklim Kebinekaan SMP	n/a	2.21	71.04	68.79

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Tabel capaian indikator kinerja SPM Pendidikan menunjukkan perkembangan kinerja dari tahun 2021 sampai rencana 2024 pada berbagai aspek utama pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan kesetaraan dan PAUD. Skor kemampuan literasi dan numerasi baik di SD maupun SMP mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2024. Contohnya, skor literasi SD meningkat dari 54,69 pada 2022 menjadi 63,63 pada 2024, dan skor literasi SMP dari 60,69 menjadi 71,12 dalam rentang waktu yang sama. Skor numerasi SD juga naik dari 28,50 menjadi 56,77, sedangkan numerasi SMP naik dari 39,64 menjadi 62,74 (2022-2024).

Partisipasi sekolah (APS) untuk usia 7-15 tahun menunjukkan angka yang tinggi dan sedikit meningkat, dari 97,55% tahun 2022 menjadi 98,48% tahun 2024, sedangkan APS usia 5-6 tahun naik tajam dari 31,29% tahun 2022 menjadi 73,54% tahun 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 61,41% pada 2024, mengindikasikan fluktuasi partisipasi PAUD pada kelompok usia dini. APS pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun mengalami kenaikan kecil dari 10,64% menjadi 14,64% (2022-2024).

Proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B mengalami sedikit penurunan dari 70,16% tahun 2022 ke 67,90% tahun 2024, namun proporsi guru PAUD berkualifikasi S1/D4 naik signifikan dari 38,89% pada 2022 ke 82,17% pada 2023-2024.

Indikator iklim sekolah seperti inklusivitas, keamanan, dan kebinekaan di SD dan SMP menunjukkan lonjakan nilai yang signifikan dari angka sekitar 2 (pada 2022) hingga di atas 55-70 pada 2024, menandakan perbaikan kondisi dan suasana sekolah dalam hal inklusivitas, keamanan, dan keragaman.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan tren positif dalam pencapaian indikator pendidikan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dari 2022 hingga 2024, dengan berbagai capaian utama seperti peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa, peningkatan kualitas guru, serta perbaikan iklim sekolah, walaupun pada beberapa indikator seperti APS PAUD dan akreditasi PAUD terdapat fluktuasi yang perlu mendapat perhatian.

Peningkatan iklim keamanan dan iklim inklusivitas sekolah memiliki implikasi positif yang signifikan terhadap capaian literasi dan numerasi siswa. Berikut adalah beberapa poin utama yang menunjukkan hubungan ini: Iklim Keamanan Sekolah yang kondusif dan memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis membantu siswa merasa nyaman dan fokus dalam proses pembelajaran, sehingga memungkinkan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Peningkatan iklim keamanan sekolah dari tahun 2022 ke 2023 berkorelasi dengan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi yang cukup besar. Iklim Inklusivitas yang tinggi berarti sekolah menyediakan layanan pendidikan yang ramah dan terbuka bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Kondisi ini

mendukung semua siswa memperoleh kesempatan belajar optimal sesuai kebutuhan mereka, yang meningkatkan pencapaian literasi dan numerasi. Data menunjukkan peningkatan iklim inklusivitas juga berhubungan dengan peningkatan capaian kompetensi dasar tersebut, walaupun peningkatannya terkadang lebih kecil dibanding aspek lain. Lingkungan sekolah yang aman dan inklusif mendorong partisipasi aktif siswa dan mencegah gangguan serta diskriminasi, yang jika terjadi dapat menghambat kemajuan belajar. Sehingga, suasana yang kondusif tersebut menjadi faktor kunci dalam mendorong keberhasilan pembelajaran terutama dalam literasi dan numerasi. Kualitas pembelajaran yang didukung oleh iklim sekolah yang positif merupakan prediktor kuat keberhasilan siswa dalam kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, sebagaimana didukung oleh berbagai laporan pendidikan yang menilai faktor-faktor lingkungan belajar sebagai penentu capaian siswa. Singkatnya, peningkatan iklim keamanan dan inklusivitas sekolah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara fisik, psikologis, dan sosial, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa secara signifikan. Penurunan proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut berdasarkan informasi dari berbagai sumber terkini.

Perubahan Metode dan Kebijakan Akreditasi: Sistem akreditasi yang diterapkan kini menggabungkan akreditasi *compulsory* dengan *sampling* acak, serta akreditasi *voluntary*, dimana metode *sampling* acak bertujuan memberikan gambaran representatif. Pergantian instrumen dan metode evaluasi akreditasi dapat menyebabkan fluktuasi dalam jumlah satuan PAUD yang tercatat terakreditasi minimal B, termasuk penurunan proporsi akibat penyaringan yang lebih ketat atau pemilihan acak yang berbeda dari tahun sebelumnya. Keterbatasan Fasilitas dan Mutu Layanan PAUD: Satuan PAUD yang belum dapat memenuhi standar kualitas layanan dan pengelolaan lingkungan belajar yang baik cenderung tidak bisa mempertahankan akreditasi minimal B, sehingga proporsi terakreditasi menurun. Hal ini terkait kapasitas manajemen PAUD dalam meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Proses Perpanjangan dan Validasi Akreditasi: Sertifikat akreditasi perlu diperpanjang secara periodik. Jika proses perpanjangan akreditasi tertunda atau tidak terpenuhi (misalnya karena administrasi, kurangnya persiapan, atau verifikasi data yang belum lengkap), maka satuan PAUD tersebut bisa kehilangan status akreditasi minimal B untuk sementara waktu.

Dukungan Pemerintah Daerah: Variasi dalam dukungan pemerintah daerah baik dari segi anggaran, pembinaan guru, pendampingan akreditasi, dan pengawasan, dapat mempengaruhi kemampuan satuan PAUD untuk mempertahankan dan meningkatkan akreditasi mereka. Jika dukungan berkurang, proporsi PAUD terakreditasi minimal B bisa menurun.

Konteks Evaluasi dan Perencanaan Berbasis Data: Akreditasi juga digunakan sebagai instrumen untuk evaluasi dan perencanaan berbasis data (PBD). Fluktuasi angka akreditasi mungkin juga merefleksikan proses evaluasi kritis dan restrukturisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas jangka panjang, meskipun untuk sementara menurunkan jumlah PAUD yang terakreditasi minimal B. Secara ringkas, penurunan proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B bisa merupakan hasil dari perubahan metode akreditasi, tantangan peningkatan mutu layanan dan fasilitas PAUD, masalah administratif dalam perpanjangan sertifikat, tingkat dukungan pemerintah daerah, serta penyesuaian sistem evaluasi yang sedang berlangsung demi kualitas pendidikan anak usia dini yang lebih baik.

2.1.3.4. Hasil evaluasi capaian SDG's Tahun 2022-2024

SDGs TPB 4 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 4) berfokus pada pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata serta peningkatan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua orang. Tujuan ini memiliki misi memastikan semua anak dan remaja menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis dan berkualitas, menambah akses pendidikan pra-sekolah, pendidikan teknik dan kejuruan yang terjangkau, serta meningkatkan jumlah tenaga pendidik berkualitas.

Tujuan/Goals		Indikator Metadata 1	Satuan Data Target	Data 2021 (Baseline)	2022			2023			2024			Detail Data Capaian
(PERPRES No 111 Tahun 2022)					Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	
														Jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B : 1.328 Sekolah
														Jumlah SD/MI pada periode yang sama (2024) : 1.371 Sekolah
TPB 4 (Pendidikan Berkualitas) Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	48.89	51.33	85.71	Tercapai	53.9	96.51	Tercapai	56.6	88.19	Tercapai	*Data Tahun 2023 : Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B : 504 sekolah

Tujuan/Goals	Indikator Metadata 1	Satuan Data Target	Data 2021 (Baseline)	2022			2023			2024			Detail Data Capaian
				Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	
(PERPRES No 111 Tahun 2022)													Jumlah SMP/MTs pada periode yang sama (2023) : 588 sekolah
													*Data Tahun 2024 :
													Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B : 321 Sekolah
													Jumlah SMP/MTs pada periode yang sama (2024) : 364 Sekolah

Tujuan/Goals		Indikator Metadata 1		Satuan Data Target	Data 2021 (Baseline)	2022			2023			2024			Detail Data Capaian
(PERPRES No 111 Tahun 2022)						Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	
TPB 4 (Pendidikan Berkualitas) Meningkatkan APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs / sederajat.	Persen	95,77	97,69	97,46	Akan Tercapai	99,64	98,27	Akan Tercapai	100	99,24	Akan Tercapai	*Data Tahun 2023 : Jumlah murid tingkat SMP/MTs sederajat umur 13-15 : 184.910 siswa/siswi Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama : (2023) : 188.167 APK perempuan di tingkat SMP/MTs/ sederajat pada periode

Tujuan/Goals	Indikator Metadata 1	Satuan Data Target	Data 2021 (Baseline)	2022			2023			2024			Detail Data Capaian
				Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	
(PERPRES No 111 Tahun 2022)													tertentu (2023) : 100.22
													APk laki-laki di tingkat SMP/MTs/ sederajat pada periode yang sama (2023) : 97.23
													*Data Tahun 2024 :
													Jumlah murid tingkat SMP/MTs sederajat umur 13-15

Tujuan/Goals	Indikator Metadata 1	Satuan Data Target	Data 2021 (Baseline)	2022			2023			2024			Detail Data Capaian
				Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	
(PERPRES No 111 Tahun 2022)													: 196.770 siswa/siswi
													Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama : 198.283 (2024) :
													APK perempuan di tingkat SMP/MTs/ sederajat pada periode tertentu (2024) : N/A
													APK laki-laki di tingkat SMP/MTs/

Tujuan/Goals		Indikator Metadata 1	Satuan Data Target	Data 2021 (Baseline)	2022			2023			2024			Detail Data Capaian
(PERPRES No 111 Tahun 2022)					Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	
													sederajat pada periode yang sama (2024) : N/A	
TPB 4 (Pendidikan Berkualitas) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat	Persen	99.43	99.61	93.62	Akan Tercapai	99.97	94.57	Akan Tercapai	100	94.93	Akan Tercapai	*Data Tahun 2023 : Jumlah murid tingkat SD/MI /sederajat umur 7-12 : 381.403 siswa/siswi Jumlah penduduk umur 7-12 tahun pada periode yang sama : (2023) : 403.318

Tujuan/Goals	Indikator Metadata 1	Satuan Data Target	Data 2021 (Baseline)	2022			2023			2024			Detail Data Capaian
				Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	
(PERPRES No 111 Tahun 2022)													SD/MI /sederajat umur 7-12 : 382.088 siswa/siswi Jumlah penduduk umur 7-12 tahun pada periode yang sama : (2024) : 402.488 APM perempuan di tingkat SD/MI/sederajat pada periode tertentu (2024) : N/A

Tujuan/Goals		Indikator Metadata 1	Satuan Data Target	Data 2021 (Baseline)	2022			2023			2024			Detail Data Capaian
(PERPRES No 111 Tahun 2022)					Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	
														APM laki-laki di tingkat SD/MI/seed erajat pada periode yang sama (2024) : N/A

Sumber : Monitoring dan Evaluasi TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2024, 2025

Capaian indikator SDGs pendidikan berdasarkan PERPRES No. 111 Tahun 2022 Sasaran nasional pertama adalah meningkatnya persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2%, naik dari 68,7% pada tahun 2015. Pada periode pengukuran 2021 hingga 2023, capaian persentase tersebut sudah melampaui target secara signifikan. dengan capaian tahun 2023 sebesar 99,35% (melebihi target 71,28%). Data rinci menunjukkan jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B pada 2023 sebanyak 2.903 sekolah dari total 1.621 sekolah; tahun 2024 capaian tetap tinggi yakni 96,86% dari target 74,84%, dengan jumlah sekolah berakreditasi A dan B menurun menjadi 1.328 dari 1.371 sekolah. Sasaran kedua adalah peningkatan persentase SMP/MTs yang berakreditasi minimal B pada 2019 menjadi 81% dari 62,5% pada 2015. Pada 2021-2024, capaian akreditasi SMP/MTs juga telah melampaui target dengan capaian pada 2023 sebesar 96,51% dan pada 2024 sebesar 88,19%. Data pendukung menunjukkan pada 2023 terdapat 504 SMP/MTs berakreditasi A dan B dari 588 sekolah, dan pada 2024 sebanyak 321 dari 364 sekolah.

2.1.3.5 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pendidikan pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Data indikator kinerja Dinas Pendidikan menunjukkan perkembangan positif pada tingkat partisipasi, kualitas guru pada SD dan SMP, serta capaian skor literasi dan numerasi. Namun, masih ada kendala di beberapa aspek seperti peningkatan Harapan Lama Sekolah, partisipasi usia dini, dan kualitas guru PAUD yang perlu perhatian lebih serius untuk mencapai target Renstra.

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen			1 0 0	10 10 0	10 0 0	0 0 0		
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen							
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen							
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan							

Percentase Aset BMD dalam Kondisi Baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	4 laporan			1	0	10	0	67	0	0	0
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	4 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	3	0	30	0	80	8	0	0
Percentase ketersediaan dokumen kepegawain yang diselesaikan tepat waktu			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang		50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	48 orang	50 orang				0	10	0	0	0
Percentase ketersediaan dokumen kepegawain yang			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				0	0	96	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4818 unit		514 unit	514 unit	514 unit	514 unit	514 unit	514 unit	873 unit				0	17	0	0	0	
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			-	-	-	-	-	-					0	0	0	0	0	
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	24 paket		-	-	-	-	-	-	10 sekolah	85 paket			0	0	0	0	0	
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelengar akan Proses Belajar dan Ujian	1408 satuan pendidika n	300 satuan pendidika n	300 satuan pendidika n	1412 satuan pendidika n	1412 satuan pendidika n	1412 satuan pendidika n	1412 satuan pendidika n	1400 satuan pendidika n				4	7	46	1	7	0	0
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	169 satuan pendidika n	120 satuan pendidika n	120 satuan pendidika n	120 satuan pendidika n	120 satuan pendidika n	120 satuan pendidika n	120 satuan pendidika n						1	0	0	0	0	
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lo mba	51 peserta didik	188 peserta didik	200 peserta didik	200 peserta didik	200 peserta didik	200 peserta didik	200 peserta didik	86 peserta	100 peserta didik	188 peserta didik		3	9	2	43	50	9	4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	971.34 m2	5 dokumen	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	463 m2	203 M2	204 unit	5 unit			0	20	20	5	0	0
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	18 unit	11 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	408 m2	368 M2	435 unit	11 unit			0	36	43	1	1	0
Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat			10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit							0	79	50	0	0	0
Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	65 ruang	23 ruang	43 ruang	43 ruang	43 ruang	43 ruang	43 ruang	43 ruang	43 ruang	45 ruang	8 ruang	22 ruang	23 ruang			1	0	51	5	3	0
Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 lokal		-	-	-	-	-	-	-		3 lokal					0	0	0	0	0	0
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	10 Ruang	10 Ruang	10 Ruang	10 Ruang	10 Ruang	10 Ruang							0	0	0	0	0	0
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	2 lokal		-	-	-	-	-	-	-		2 lokal	5 ruang				0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	833 peserta didik	833 peserta didik	833 peserta didik	833 peserta didik	715 peserta didik	2150 peserta didik	40 peserta didik	1 0 0 25 8 5 0
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	0 0 0 0 0 0
Jumlah Alat Praktis dan Peraga Siswa yang Tersedia	16 paket	77 paket	103 peserta didik	1583 peserta didik	1583 peserta didik	1583 peserta didik	1279 peserta didik	16 paket 7 paket 47 unit
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan	294 satuan pendidikan	200 satuan pendidikan	200 satuan pendidikan	200 satuan pendidikan	200 satuan pendidikan	200 satuan pendidikan	1 0 0 0 0 0 0 0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	174 lembaga	80 paket	200 paket	30 paket	30 paket	30 paket	30 paket	30 paket	400 paket	399 paket	400 paket	80 paket		200	1330	2670
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	9500 siswa		50 paket	40 paket	40 paket	40 paket	40 paket	40 paket	40 paket	113 paket				80	2830	000
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			-	-	-	-	-	-						0	000	000
Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	240 paket										40 paket			80	1010	000
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	55 peserta didik		50 paket	150 peserta didik	150 peserta didik	150 peserta didik	150 peserta didik	150 peserta didik	40 paket	156 peserta didik	135 lembaga	156 peserta didik		100	1040	000
Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			-	100 satuan pendidikan	100 satuan pendidikan	100 satuan pendidikan	100 satuan pendidikan	100 satuan pendidikan	100 satuan pendidikan	46 satuan pendidikan				0	4600	000
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		2704 orang	5416 orang	5416 orang	5416 orang	5416 orang	5416 orang	5416 orang	3872 orang	5142 orang	5252 orang	2704 orang		71	9597	500

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golo ngan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	86 orang	181 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100 orang	65 orang	84 orang	181 orang	3	3	22	28	6	0	0
Kualifikasi																				
Jumlah PAUD	323	116		200	200	200	200	200	200	2 satuan	55 satuan	60 satuan	116					5	8	0
yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidik an	satuan pendidik an	satuan pendidika n	satuan pendidika n	satuan pendidika n	satuan pendidika n	satuan pendidika n	satuan pendidika n	satuan pendidika n	pendidika n	pendidika n	pendidika n	satuan pendidika n		0	28	30			
Jumlah PAUD	900	6 satuan	##### ##### ####	1170	2000	2000	2000	2000	2000	1687	31	##### ##### ####	6 satuan pendidika n	1	4	4	15			
yang Mengelola Dana BOP	an	an		satuan pendidika n	satuan pendidika n	satuan pendidika n	satuan pendidika n	satuan pendidika n	satuan pendidika n	satuan pendidika n	kecamata n	##### ##### ####				3	0	0	0	0
Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD																				
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,												1 dokumen		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 lokal																	0	0	0	0	0	0
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat																		0	0	0	0	0	0
Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun																		0	0	0	0	0	0
Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat																		0	0	0	0	0	0
Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Ke setaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan																		0	0	0	0	0	0
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian																		0	0	0	0	0	0
Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di																		0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun					3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen									0	10	0	0	0	0	0
Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun					2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen									0						
Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia					500 buku	500 buku	500 buku	500 buku	500 buku									0	50	0	0	0	0	0
Index pemerataan guru				0,34 %	0,34 %	0,34 %	0,34 %	0,34 %	0,34 %									0	0	0	0	0	0	0
Index pemerataan guru kelas SD				0,22 poin	0,22 poin	0,22 poin	0,22 poin	0,22 poin	0,22 poin									0	0	0	0	0	0	0
index pemerataan guru matpel SD				0,46 poin	0,46 poin	0,46 poin	0,46 poin	0,46 poin	0,46 poin									0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel II.22 Anggaran dan Realisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke										Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2	2	2	2	2	2	2	2	Anggaran	Realisasi		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.464.73 7.969.86 2,24	1,293,97 4,369,68 4	1,292,00 6,195,92 4	1,402,07 9,193,15 7	1,469,22 6,527,89 6	1.291.45 0.202.95 7,00	1,205,47 4,530,08 0	1,147,78 7,291,47 1	1,260,07 9,279,98 4	737,900 335,22 1								1,364,321 571,665. 25	1,087,810 359,189. 00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	947.376. 274,00	956,336, 375	641,337, 355	758,163, 793	934,267, 509	877.070. 887,00	653,633, 400	614,290, 100	711,063, 600	260,442 348								822,526,2 58.00	559,857,3 62.00			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	317.455. 639,00	346,993, 300	263,814, 280	317,570, 718	289,318, 194	315.570. 277,00	272,746, 200	251,678, 100	306,913, 600	118,480 800								304,424,1 23.00	237,454,6 75.00			
Koordinasi dan Penyusunan	16.512.0 25,00	45,750,0 00	-	20,750,0 00	45,166,8 00	16.165.5 00,00	42,613,9 00	-	17,100,0 00	26,644, 500								27,916,70 0.00	21,589,60 0.00			

[illegible]

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										103,505,800									56,170,848	-	-	-	-	54	103,505,799.56	56,170,848.00
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										181,681,907									-					-	181,681,907.44	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.458.628.754.848,24	1.287,328,767,495	1.285,751,061,205	1.395,556,036,284	1.462,105,574,205	1.285.880.613.594,00	1.199,779,372,262	1,141,784,794,617	1,254,043,390,109	734,936,809,086	88	93	89	90	50	1,357,685,359,797.25	1,082,636,091,518.50									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.458.577.122.848,24	1.287,248,767,495	1.285,671,061,205	1.395,476,036,284	1.462,025,280,205	1.285.831.256.594,00	1.199,713,525,687	1,141,705,191,367	1,253,964,348,909	734,886,697,486		93	89	90	50	1,357,605,286,297.25	1,082,567,440,862.25									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanannya/Semes teran SKPD	51.632.00,00	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,294,000	49.357.00,00	65,846,575	79,603,250	79,041,200	50,111,600		10	08	92	62	80,073,500.00	68,650,656.25									
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	350.000.000,00	476,000,000	1,145,152,839	655,039,080	1,021,138,328	347.953.600,00	452,759,200	1,142,713,460	652,542,680	275,208,600	99	95	00	10	27	824,332,561.75	630,805,985.00									

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		325,000,000	994,152,839	300,000,000	322,364,000		303,258,900	992,121,760	298,755,600	18,327,000	-	9 3	1 0 0 0	1 0 0 6	485,379,209.75	403,115,815.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	350.000.	151,000,000	151,000,000	355,039,080	698,774,328	347.953.600,00	149,500,300	150,591,700	353,787,080	256,881,600	9 9	9 0	1 0 0 0	3 7	338,953,352.00	227,690,170.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.	701,347,261	253,045,000	300,000,000	470,170,322	274.650.000,00	471,142,781	244,258,100	288,260,700		9 2	6 7	9 7 6		431,140,645.75	334,553,860.33
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					50,000,000						-	-	-	-	50,000,000.00	#DIV/0!
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					187,541,414						-	-	-	-	187,541,414.00	#DIV/0!
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					53,220,000						-	-	-	-	53,220,000.00	#DIV/0!

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	701,347,261	253,045,000	300,000,000	179,408,908	274.650.000,00	471,142,781	244,258,100	288,260,700		9 2	6 7	9 7	9 6	-	358,450,292.25	334,553,860.33
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.251.063.398,00	2,108,257,036	1,587,611,205	1,654,034,500	1,092,010,495	2.012.313.946,00	1,869,656,725	1,500,525,426	1,463,783,108	626,522,696	8 8	9 9	8 5	8 8	5 7	1,610,478,309.00	1,365,121,988.75
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	25,000,000	25,000,000	24,989,200	30,792,100	19.999.000,00	24,998,600	24,208,800	24,985,900	6,846,500	1 0	1 0	0 9	0 7	2 2	26,445,325.00	20,259,950.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.385.868.000,00	1,150,289,436	730,047,800	882,947,500	542,737,400	1.357.556.250,00	1,108,627,100	726,739,600	852,026,750	438,900,383	9 8	9 6	0 0	0 6	8 1	826,505,534.00	781,573,458.25
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.070.398,00	285,908,500	221,649,005	133,097,800	244,223,495	123.772.273,00	249,508,500	198,774,276	125,376,284	52,421,625	8 2	8 7	9 0	9 4	2 1	221,219,700.00	156,520,171.25
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000,00	60,000,000	160,914,400	100,000,000	80,193,000	74.834.100,00	59,997,950	160,267,250	99,300,489	79,820,988	1 0	1 0	1 0	1 9	1 0	100,276,850.00	99,846,669.25
Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	52,944,100				29.992.723,00	52,856,775				1 0	1 0	-	-	-	52,944,100.00	52,856,775.00

Fasilitas Kunjungan Tamu	100.000.000,00	155,795,000	150,000,000	200,000,000	126,890,000	45.537.100,00	101,519,000	136,403,500	117,997,200	38,167,700	465	91	59	30	158,171,250.00	98,521,850.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	489.125.000,00	378,320,000	300,000,000	313,000,000	67,174,500	360.622.500,00	272,148,800	254,132,000	244,096,485	10,365,500	742	85	78	15	264,623,625.00	195,185,696.25
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.819.818.000,00	1,976,780,000	2,111,163,280	2,856,958,000	3,074,939,832	1.691.031.265,00	1,883,301,683	2,072,428,960	2,696,428,555	1,762,049,391	935	98	94	57	2,504,960,278.00	2,103,552,147.25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	200,000,000	175,000,000	200,000,000	200,000,000	112.531.805,00	134,705,723	165,525,844	156,672,903	90,320,391	567	95	78	45	193,750,000.00	136,806,215.25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.619.818.000,00	1,776,780,000	1,936,163,280	2,656,958,000	2,874,939,832	1.578.499.460,00	1,748,595,960	1,906,903,116	2,539,755,652	1,671,729,000	978	98	96	58	2,311,210,278.00	1,966,745,932.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.957.342,00	426,881,517	516,825,040	298,961,500	528,427,205	366.569.665,00	364,664,029	428,280,808	223,811,232	39,303,100	83	83	75	7	442,773,815.50	264,014,792.25

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.000. 000,00	226,881, 517	182,450, 000	98,961,5 00	55,559,8 00	102.476. 965,00	165,682, 179	94,721,6 08	34,269,2 82	11,997, 500	5 9	7 3	5 2	3 5	2 2	140,963,2 04.25	76,667,64 2.25
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			134,375, 040					133,942, 000		-			1 0 0			134,375,0 40.00	66,971,00 0.00
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	265.957. 342,00	200,000, 000	200,000, 000	150,000, 000	150,000, 000			133,942, 000		-		6 7				175,000,0 00.00	66,971,00 0.00
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50,000,0 00	322,867, 405	264.092. 700,00	198,981, 850	199,617, 200	139,854, 450	27,305, 600	-	-	-	2 8 0	8	186,433,7 02.50	141,439,7 75.00
PROGRAM PENGELOLAAN	633.263. 722.800, 00	863,054, 445,314	910,642, 927,880	958,373, 034,864	916,494, 560,975	582.549. 923.571, 00	827,560, 332,413	886,536, 477,818	944,653, 191,075		9 2	9 6	9 7	9 9	4 6	912,141,2 42,258.25	769,263,7 47,912.75

[illegible]

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.315.13 2.380,00	4.379,56 7,503	596,068, 200				2.172.24 8.988,00	4,305,34 9,073	521,963, 694						9 9 8 4 8 8			2,487,817 ,851.50	2,413,656 ,383.50
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	403.343. 075,00						401.167. 300,00								9 9 9 9				
Pengadaan Mebel Sekolah	2.883.28 7.963,00	9,723,09 2,000	6,652,77 9,700	5,906,61 6,460			1.980.57 7.908,00	9,634,82 7,600	6,547,12 5,014	5,625,71 5,200					6 9 9 9 9 5			7,427,496 ,053.33	7,269,222 ,604.67
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	440.000. 000,00	6,200,00 0,000	2,375,00 0,350	2,341,91 4,250			423.852. 200,00	6,117,63 0,000	1,618,00 0,000	2,206,78 9,200					9 9 6 6 9 4			3,638,971 ,533.33	3,314,139 ,733.33
Pengadaan Perlengkapan Siswa	389.556. 700,00		525,166, 000				370.067. 790,00		482,350, 000						9 5 5 2			525,166,0 00.00	482,350,0 00.00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.390.00 0.000,00	21,081,5 00,000	13,776,3 60,000	26,500,0 00,000			5.380.83 9.800,00	20,579,7 54,800	13,744,4 85,000	26,406,4 80,000					1 1 1 0 9 0 0 8 0			20,452,62 0,000.00	20,243,57 3,266.67
Penyelengaran Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	800.000. 000,00						787.314. 600,00								1 1 9 0 0 8 0 0			54,481,27 3,910.00	54,343,81 9,167.50

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	150.000.000,00					149.999.895,00	149,619,500					1 0 0	1 0 0	- 	- 	150,000,000.00	149,619,500.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	592.500.000,00				435,000,000	589.748.832,00	578,969,700	875,985,000	435,000,000			1 0 0	1 0 0	5 0 4	1 0 0	877,895,400.00	629,984,900.00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					31,299,579,520		32,618,371,450	31,486,928,148	30,929,238,880			1 0 0	1 0 0	1 0 0	9 0 9	31,847,162,031.00	31,678,179,492.67
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					515,454,180		681,834,800	1,318,745,600	470,526,400				9 6	0 0	9 1	838,879,386.67	814,449,000.00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	320.000.000,00				200,000,000	320.000.000,00	517,611,000	476,124,400	199,840,600			1 0 0	1 0 0	1 0 0	1 0 0	398,713,603.33	397,858,666.67

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	322.049.712.846,00	339,856,325,186	345,556,480,000	342,750,800,000		294.332.531.910,00	335,851,593,201	345,393,942,865	342,679,663,872			91	99	11	00	342,721,201,728.67	341,308,399,979.33
Pemeliharaan Mebel Sekolah	1.146.000.000,00					1.126.161.570,00						98	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			5,708.153,690	4,313.184,000				4,256,950,943	3,665,869,000			-	-	75	85	5,010,668,845.00	3,961,409,971.50
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				150,000,000				30,564,700	149,199,580			-	-	10	99	90,282,465.00	89,882,140.00
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				100,000,000					99,999,500			-	-	10	00	100,000,000.00	99,999,500.00
Pembangunan Ruang Kelas Baru				8,613,498,800					7,509,806,754			-	-	87	-	8,613,498,800.00	7,509,806,754.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2,526,313,667					2,440,102,658			-	-	97	-	2,526,313,667.00	2,440,102,658.00

[illegible]

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	546.774.000,00		564,954,750	395,760,000		400.048.844,00			562,249,000	345,254,082				73	100	87		480,357,375.00	453,751,541.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	489.494.400,00	248,514,748	687,771,000	92,344,000		486.439.590,00		197,884,974	683,840,700	91,553,933				99	80	99	-	342,876,582.67	324,426,535.67
Pengadaan Mebel Sekolah	15.910.772.000,0	2,628,520	6,463,020,800	5,224,063,460	14,382,739,300	15.121.379,040,0	2,010,514,700	9,811,916,229	6,265,326,500	5,148,710,500				95	76	99	68	7,174,587,937.50	5,809,116,982.25
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.600.000.000,00				9,597,126,370	1.994.708.100,00		4,937,087,000						7	-	-	51	9,597,126,370.00	4,937,087,000.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.170.600.000,00	1,600,000,000	1,467,789,150	1,500,000,000	1,500,000,000	896.400.000,00	1,597,332,900	82,786,200	1,260,319,000	1,466,046,950		1	89	70	86	86		1,516,947,287.50	1,101,621,262.50
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	5.150.000.000,00	5,547,579,200	17,085,740,000	45,712,325,000	2,623,333,500	5.102.770.200,00	5,524,177,000	583,654,996	16,327,057,800	45,468,407,000		1	90	99	66	22		17,742,244,425.00	16,975,824,199.00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	20.639.400.000,0	12,690,458,400	20,852,954,790			16.949.592.600,0	12,392,566,600		16,854,235,770					82	98	1-		16,771,706,595.00	14,623,401,185.00

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	832.182.000,00	612,182,000				831.272.800,00	608,636,000	-										100	9	-	-			612,182,000.00	304,318,000.00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	870.218.000,00	514,000,000			537,597,500	423,737,500	795.554.000,00	501,130,800	693,376,100	484,625,000								91	97	47	03			739,296,960.75	455,091,536.75
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		16,128,134,400			17,806,400,000	18,399,035,100		15,081,347,500	17,452,197,300	17,604,137,150								94	98	99				17,517,099	14,805,891,087.50
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	1.394.298.784,00	583,298,784			249,405,000	461,662,000	1.205.738.600,00	458,720,550	285,804,200	229,861,700								86	79	92	37			395,448,392.00	285,737,987.50

[illegible]

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55.145.1 45.244,0 0	81,276,9 22,944	81,161,0 97,810	95,846,4 97,737	103,371, 351,176	52.016.5 31.871,0 0	74,621,2 19,902	79,191,2 89,618	94,523,7 53,500	37,156, 992,638	9 4	9 2	9 8	9 9	3 6	90,413,96 7,416.75	71,373,31 3,914.50
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.379.94 7.588,00	2,043,73 9,000	1,808,11 7,912			1.299.09 1.632,00	2,004,59 4,300	1,798,63 6,795			9 4	9 8	9 9	- -	-	1,925,928 ,456.00	1,901,615 ,547.50
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	275.649. 300,00	469,368, 800	1,497,83 6,098	2,541,82 7,000	701,898, 730	271.925. 478,00	467,243, 000	1,481,09 7,673	2,515,53 2,400		1 9	0 0	9 9	9 9	-	1,302,732 ,657.00	1,487,957 ,691.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		127,306, 000					109,954, 000				-	8 6	-	-	-	127,306,0 00.00	109,954,0 00.00
Pengadaan Mebel PAUD	9.288.43 5.000,00	7,000,10 2,000	66,728,0 00	6,093,76 6,687	6,138,46 0,000	9.218.10 5.635,00	6,987,84 0,320	64,610,0 00	6,089,77 9,000		1 9	0 0	1 9	0 0	-	4,824,764 ,171.75	4,380,743 ,106.67
Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.776.57 0.000,00	8,497,73 2,144	3,194,18 9,470	2,036,91 4,935	8,194,79 4,100	1.703.12 3.900,00	8,455,61 1,600	3,154,96 2,700	2,027,20 2,000	8,184,8 79,340	1 9	0 0	1 9	0 0	1 0	5,480,907 ,662.25	5,455,663 ,910.00
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	905.273. 500,00	2,284,91 0,000	2,522,58 7,900			189.525. 000,00	2,252,35 0,000	1,431,32 4,700			2 1	9 9	5 7	-	-	2,403,748 ,950.00	1,841,837 ,350.00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2.442.65 4.700,00	268,263, 200	3,895,92 8,870	12,279,3 72,990		2.424.72 8.607,00	266,411, 700	3,850,69 7,340	12,195,4 99,200		9 9	9 9	9 9	9 9	-	5,481,188 ,353.33	5,437,536 ,080.00

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	175.260.000,00	1.008,500,000	150,000,000	469,214,600		175.259.800,00	886,731,234	129,491,800	331,700,200		108080	8861			542,571,533,33	449,307,744,67
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD			79,855,520					69,790,410							79,855,520,00	69,790,410,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				22,988,320,000			19,001,541,150	22,621,353,900	22,512,035,600	11,481,340,200	997	998			22,166,100,850,00	18,904,067,712,50
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	450.508.719,00	405,000,000	309,785,000	244,504,080	422,621,200	450.508.719,00	262,672,400	201,186,600	190,281,000	254,673,500	10605	678			345,477,570,00	227,203,375,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	534.466.437,00	580,000,000	591,558,510	2,250,000,000	382,621,200	534.466.400,00	424,206,200	513,934,100	2,223,862,732	221,094,100	1073	899			951,044,927,50	845,774,283,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	37.916.380.000,00	39,010,780,000	43,907,404,000	42,979,320,040	42,767,850,600	35.749.796.700,00	33,502,063,998	43,843,638,700	42,569,028,600	134,547,698	984	809			42,166,330,8,660,00	30,012,319,749,00

Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan	4.425.00 0.000,00	3.653,62 5,000						4.090.73 6.050,00	3.638,50 7,000						1 9 2 0 0				3.653,625 ,000.00	3.638,507 ,000.00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan	2.180.21 2.500,00	2.472,00 0,000						2.180.21 2.500,00	2.472,00 0,000						1 0 0 0 0				2.472,000 ,000.00	2.472,000 ,000.00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Ke setaraan	200.000. 000,00					3.430,72 9,000	5.417,39 8,324	199.900. 000,00	5.268,50 2,200	3.367,51 8,600					1 0 0 0 0				4.424,063 ,662.00	4.318,010 ,400.00
Penyelenggar aan Proses Belajar Nonformal/Ke setaraan	5.987.53 7.750,00	11.960,0 00,000					10.524,9 57,900	5.987.45 2.500,00	11.812,8 46,134	10.524,4 86,412					1 0 0 0 0				11,242,47 8,950.00	11,168,66 6,273.00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan						15,105,5 00,000				15,105,5 00,000									15,346,86 3,000.00	12,899,59 2,800.00
Penyiapan dan Tindak Lanjut	497.477. 000,00	200,000, 000				614,665, 003	2,159,35 0,718	497.372. 000,00	193,627, 200	2,135,23 2,800	559,253, 600				1 9 7 9 1				991,338,5 73.67	962,704,5 33.33

Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		100,000,000						99,999,600										100,000,000.00	99,999,600.00
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		100,000,000	100,000,000		99,684,750	95,953,800												100,000,000.00	97,819,275.00
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			300,000,000			299,376,000												300,000,000.00	299,376,000.00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	40.456.902.384,00		275,000,000		319,333,600	258,735,800												337,500,000.00	289,034,700.00
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga	40.456.902.384,00		275,000,000		319,333,600	258,735,800												337,500,000.00	289,034,700.00

PROGRAM																				
PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		300,272,161		416,071,200	600,000,000		299,716,408	260,573,290	329,209,640	505,681,400	-	100	794	8	438,781,120.33	348,795,184.50				
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				99,129,640	200,000,000				99,029,640	181,348,000	-	-	100	9	149,564,820.00	140,188,820.00				
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				99,129,640	200,000,000				99,029,640	181,348,000	-	-	100	9	149,564,820.00	140,188,820.00				
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		300,272,161		316,941,560	400,000,000		299,716,408	260,573,290	230,180,000	324,333,400	-	100	731	8	339,071,240.33	278,700,774.50				
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan		150,347,161		167,587,560	200,000,000		150,011,983	148,827,160	95,280,000	172,995,200	-	0	57	86	172,644,907.00	141,778,585.75				

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah dibandingkan dengan total penduduk usia tersebut. APS mengukur tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan pada usia dan jenjang tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menilai akses dan keberhasilan pendidikan di suatu wilayah. Secara umum, APS sebagai indikator utama menggambarkan akses pendidikan APS tinggi menunjukkan lebih banyak anak usia sekolah yang bersekolah dan peluang akses pendidikan yang baik. APS menurun seiring bertambahnya usia anak, yang mencerminkan penurunan partisipasi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa meskipun hampir semua anak usia sekolah dasar bersekolah, partisipasi menurun pada jenjang menengah dan atas, yang biasanya disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi, akses, dan kualitas pendidikan. APS sering digunakan bersama indikator lain seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai partisipasi pendidikan.

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pendidikan

Kelompok sasaran pelayanan pendidikan merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan di bidang pendidikan. Sasaran pelayanan ini difokuskan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pendidikan di wilayah kerja Dinas Pendidikan.

Kelompok sasaran utama terdiri dari anak usia dini yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), peserta didik jenjang pendidikan dasar seperti Sekolah Dasar (SD), serta jenjang pendidikan menengah pertama, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, pelayanan juga diperuntukkan bagi peserta pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat yang meliputi pendidikan nonformal sebagai upaya meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan.

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi fokus penting dalam pelayanan, mengingat peran sentral mereka dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan pengembangan mutu

pendidikan. Dinas Pendidikan juga memberikan perhatian kepada masyarakat umum sebagai bagian dari penerima manfaat program pendidikan nonformal serta pendukung pembangunan pendidikan di lingkungan masyarakat.

Dengan sasaran pelayanan yang komprehensif ini, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas, pemerataan, dan relevansi pendidikan sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Berikut perkembangan jumlah sekolah/lembaga, siswa dan guru di Kabupaten Bandung sesuai kewenangan dari tahun 2021 sampai 2024 :

Tabel 2.20 Perkembangan sekolah/lembaga menurut jenjang

No.	Jenjang Pendidikan	2020 /21	2021 /22	2022/ 23	2023 /24	2024/2 5
	TK + RA	2,561	2,689	2,790	2,638	2,689
	TK	534	604	635	644	677
	RA	667	689	722	734	750
	PAUD	1,360	1,396	1,433	1,260	1,262
	SD + MI	1,616	1,616	1,628	1,619	1,612
	SD	1,418	1,411	1,411	1,395	1,371
	MI	198	205	217	224	241
	SMP + MTs	542	554	573	587	614
	SMP	338	338	349	349	364
	MTs	204	216	224	238	250

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Tabel 2.21 Perkembangan Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

No.	Jenjang Pendidikan	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
1	TK + RA	4,227	4,420	4,546	4,662	4,888
	TK	1,384	1,544	1,548	1,584	1,710
	RA	2,843	2,876	2,998	3,078	3,178
	PAUD	1,713	2,917	2,894	3,092	3,340
2	SD + MI	15,903	17,225	17,681	16,426	17,318
	SD	13,754	15,011	15,384	14,118	14,579
	MI	2,149	2,214	2,297	2,308	2,739
3	SMP + MTs	9,164	9,543	9,872	10,048	10,228
	SMP	6,159	6,457	6,673	6,759	6,771
	MTs	3,005	3,086	3,199	3,289	3,457

Tabel 2.22 Perkembangan Siswa Menurut Pendidikan Tahun
2021/2022 - 2024/2025

No	Jenjang Pendidikan	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
1	TK + RA	51,668	52,997	55,901	57,126	58,747
	TK	19,879	21,167	24,029	25,150	25,975
	RA	31,789	31,830	31,872	31,976	32,772
	PAUD	38,347	43,473	46,251	46,125	45,915
2	SD + MI	402,144	402,475	400,238	400,564	403,541
	SD	362,269	362,241	359,251	358,885	357,972

No	Jenjang Pendidikan	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	MI	39,875	40,234	40,987	41,679	45,569
3	SMP + MTs	175,469	175,162	173,025	175,867	181,080
	SMP	137,236	136,397	133,901	136,007	139,658
	MTs	38,233	38,765	39,124	39,860	41,422

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

2.1.5 Mitra Dinas Pendidikan dalam pemberian pelayanan

Mitra Dinas Pendidikan dalam pemberian pelayanan berperan sebagai mitra strategis yang mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai kolaborasi dan kemitraan dengan pihak lain, termasuk organisasi mitra seperti PGRI, IGTK, FPKBM, FKPLKP,UPA, Organisasi non profit seperti *save the children*, HAKI, APKASI yayasan adiluhung nusantara, Perusahaan komersil seperti PT.Geodipa Energy, PT Indonesia power, dll. serta *stakeholder* lain seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, DPMD, DP2KBP3A.

Dinas Pendidikan berperan dalam mengawasi, mendukung, dan melaksanakan program kemitraan yang bertujuan pemerataan mutu pendidikan dengan ber sinergi dan kolaborasi dengan berbagai instansi dan mitra pembangunan, seperti mengadakan sosialisasi dan kegiatan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara holistik, termasuk PAUD holistik integratif yang meliputi aspek perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak usia dini dengan organisasi mitra HIMPAUDI. Dalam konteks kemitraan lintas dinas, misalnya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan berperan dalam sosialisasi pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada pelajar dari berbagai jenjang, guna memudahkan pendataan dan pemberian hak anak, sekaligus meningkatkan kualitas administrasi pendidikan. Meski ada tantangan seperti sumber daya manusia dan administrasi, peran Dinas Pendidikan dipandang penting dalam memperkuat kemitraan tersebut.

Model kemitraan ini kerap melibatkan berbagai aktor pendidikan seperti tenaga pendidik, orang tua, masyarakat, dan organisasi mitra yang bekerja bersama dalam meningkatkan mutu dan

pelayanan pendidikan melalui sinergi, koordinasi, dan komunikasi yang baik.

Singkatnya, Mitra Dinas Pendidikan dalam pemberian pelayanan adalah peran kolaboratif dan sinergis Dinas Pendidikan dengan berbagai pihak untuk mendukung pemerataan, peningkatan mutu, dan kualitas layanan pendidikan di berbagai aspek dan jenjang pendidikan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 bidang pendidikan menekankan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing global. Secara lebih luas, RPJMN 2025-2029 untuk bidang pendidikan juga mengarah pada peningkatan rata-rata lama sekolah, kualitas hasil belajar, dan investasi pada kesehatan serta gizi anak untuk mendukung penguatan modal manusia. Pembangunan pendidikan diarahkan bersamaan dengan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang mendukung peningkatan kesempatan belajar dan penyelesaian jenjang pendidikan menengah serta tinggi. Fokus RPJMN 2025-2029 bidang pendidikan dalam menekankan peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar meliputi beberapa aspek utama:

1. Memperluas akses pendidikan dasar yang merata, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi penting, dengan target meningkatkan Angka Partisipasi Kasar PAUD yang saat ini masih rendah sekitar 36%.
2. Program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pra SD dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah, menjadi strategi pemerintah untuk mengatasi anak tidak sekolah (ATS) yang masih tinggi dan memastikan semua anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
3. Peningkatan mutu pendidikan dasar melalui penguatan kurikulum, profesionalisme guru, dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, termasuk pelatihan

berkelanjutan bagi guru dan tenaga pendidik sebagai kunci mutu pembelajaran.

4. Penguatan tata kelola dan pembinaan kelembagaan pendidikan dasar agar pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah dapat berjalan efektif dan efisien.
5. Pengembangan kurikulum lokal yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta pelaksanaan evaluasi, ujian, dan akreditasi pendidikan dasar untuk memastikan standar kualitas pendidikan yang tinggi.

Secara keseluruhan, RPJMN 2025-2029 menjadikan pendidikan dasar yang inklusif dan berkualitas sebagai fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul yang akan menopang visi Indonesia Emas 2045.

Dengan demikian, fokus utama dalam pendidikan dasar adalah memastikan akses yang luas dan merata mulai dari PAUD hingga tamat pendidikan dasar, sembari terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan kapasitas pendidik sehingga hasil pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas SDM nasional.

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Renstra Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 memiliki fokus strategis yang saling mendukung namun dengan lingkup kewenangan yang berbeda. Renstra Kemendikdasmen 2025-2029 Disusun untuk mendukung visi besar RPJPN 2025-2045 "Indonesia Emas 2045" dengan tujuan menjadikan pendidikan tulang punggung transformasi sosial guna menciptakan manusia Indonesia unggul. Arah kebijakan utama Kemendikdasmen mencakup:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun.
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
4. Penguatan tata kelola pendidikan.

5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta produktivitas tenaga kerja.
6. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa, termasuk pengembangan bahasa dan sastra daerah.
7. Mendukung agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi, termasuk pengembangan budaya beragama maslahat dan budaya maju.

Prioritas program tahun 2025 meliputi peningkatan kompetensi guru, pembelajaran mendalam, pengembangan talenta dan prestasi, penguatan pendidikan berbasis literasi, numerasi, sains, teknologi, dan kecerdasan buatan. Program strategis juga menyoroti pemerataan guru, transformasi penerimaan murid baru, dan penguatan pendidikan karakter melalui program seperti "7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat"

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2025-2029 Merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Barat. Fokus pada peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses layanan pendidikan, peningkatan profesionalisme guru, penguatan tata kelola pendidikan daerah, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan zaman, serta peningkatan sarana dan prasarana. Menangani isu strategis pendidikan di tingkat daerah, dengan perhatian khusus pada pemulihan pendidikan pasca-pandemi COVID-19 serta pembangunan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing. Menekankan kolaborasi lintas sektor di daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam sektor pendidikan. Menyusun program dan indikator kinerja yang mengukur pencapaian sasaran pendidikan secara terukur yang mendukung visi daerah Jawa Barat maju, adil, dan makmur, seraya berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan berkarakter.

Hubungan dan Sinergi

Renstra Kemendikdasmen memberikan arah kebijakan dan program strategis nasional yang dijabarkan secara lebih rinci di tingkat

daerah oleh Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kedua dokumen ini selaras dalam misi meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan serta penguatan aspek karakter dan budaya bangsa. Kemendikdasmen menetapkan kerangka kerja dan prioritas strategis yang menjadi landasan bagi perencanaan strategi di tingkat provinsi, sehingga pelaksanaan program pendidikan di Jawa Barat dapat mendukung target pembangunan nasional dan tujuan RPJPN 2025-2045.

Kombinasi Renstra Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat periode 2025-2029 menegaskan komitmen bersama membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada mutu serta hasil konkret untuk menciptakan sumber daya manusia unggul sebagai pilar kemajuan Indonesia dan Jawa Barat pada khususnya.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Dengan mempertimbangkan visi Bupati Kabupaten Bandung tahun 2025- 2029, visi pembangunan pada dokumen RPJP tiap level pemerintahan, serta isu-isu strategis, maka visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut Adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Berkelanjutan:

Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Berdasarkan visi pembangunan yang telah dirumuskan, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak

Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Sebagai bagian integral dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam mengoptimalkan tata ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sub bab ini menguraikan tujuan penataan ruang yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan dan strategi yang dirumuskan tidak hanya memperhatikan aspek lokal, tetapi juga keterkaitan regional dengan kabupaten/kota sekitar, serta keselarasan dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Melalui pendekatan terpadu, penataan ruang Kabupaten Bandung diarahkan untuk menciptakan kawasan yang kompetitif, layak huni, dan berwawasan

lingkungan, sekaligus menjawab isu-isu strategis di tingkat regional. Rekomendasi zonasi pendidikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung mengacu pada pengaturan pemanfaatan ruang untuk fasilitas pendidikan sebagai bagian dari Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU). Zona ini diperuntukkan bagi kegiatan pelayanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, dan diatur agar fungsi ruangnya optimal dan terintegrasi dengan jaringan prasarana wilayah. Secara spesifik, dalam RTRW Kabupaten Bandung.

Pemetaan wilayah pendidikan merupakan instrumen strategis dalam perencanaan tata ruang wilayah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan di seluruh daerah. Penetapannya tidak hanya difokuskan pada satu wilayah administratif tertentu, tetapi berlaku secara menyeluruh sebagai upaya penguatan sistem pelayanan publik berbasis spasial. Dalam konteks ini, pemetaan wilayah pendidikan ditempatkan dalam kawasan sarana pelayanan umum yang berfungsi sebagai ruang pengembangan fasilitas pendidikan di berbagai tingkat wilayah, baik perdesaan maupun perkotaan agar setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Pengaturan pemetaan wilayah pendidikan juga mempertimbangkan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan wilayah dengan jaringan permukiman, transportasi, dan fasilitas sosial lain, sehingga keberadaan lembaga pendidikan dapat berfungsi optimal dalam mendukung layanan dasar masyarakat. Selain berorientasi pada pemerataan akses, kebijakan pemetaan wilayah pendidikan disusun dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan tata ruang, yakni memastikan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tidak menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan tetap sejalan dengan pola ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.

Dengan demikian, penerapan pemetaan wilayah pendidikan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatur penempatan fisik sekolah atau lembaga

pendidikan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan arah pembangunan wilayah secara menyeluruh.

Zonasi pendidikan di RTRW ini merupakan bagian dari strategi tata ruang yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang RTRW, yang mengawal tata ruang agar fungsi wilayah dan layanan publik, termasuk pendidikan, terselenggara efektif dan sesuai dengan standar perundang-undangan penataan ruang di Indonesia

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas Pendidikan

RPJMD Kabupaten Bandung harus disusun berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan. KLHS memberikan rekomendasi kebijakan yang wajib dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD agar rencana pembangunan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan tujuan global Sustainable Development Goals (SDGs). Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial, KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, KLHS tidak hanya relevan secara nasional, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target SDGs. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 fokus isu strategi pendidikan yaitu rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitasn hidup masyarakat.

2.2.6 Permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap

kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada. Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya.

Perkembangan isu dan tren global saat ini menimbulkan tantangan yang semakin kompleks bagi pembangunan pendidikan nasional dan daerah. Globalisasi yang ditandai dengan semakin intensifnya interaksi antarbangsa telah menembus batas-batas negara, sehingga menuntut sistem pendidikan untuk mampu menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya berdaya saing secara global, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat, berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal dan kewarganegaraan global. Permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya internalisasi nilai global citizenship, toleransi, dan solidaritas kemanusiaan dalam proses pembelajaran di berbagai satuan pendidikan.

Tren urbanisasi global dan dinamika demografi juga berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang relatif besar memiliki potensi bonus demografi sebagai kekuatan pemerataan akses dan mutu pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta ketimpangan ketersediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang berkualitas, serta potensi bonus demografi belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi potensi sumber daya manusia sebagai modal pembangunan jangka panjang.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi digital berpotensi mempercepat pencapaian target pendidikan, memperluas akses layanan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mempercepat distribusi pengetahuan. Namun demikian, di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan seperti kesenjangan akses teknologi (digital divide), rendahnya literasi digital, risiko kecanduan internet, penyebaran informasi palsu (hoaks), serta

meningkatnya kasus cybercrime dan cyberbullying di lingkungan peserta didik yang memerlukan perhatian serius dari sistem pendidikan.

Perubahan lanskap dunia kerja akibat kemajuan teknologi juga menjadi tantangan besar bagi pendidikan. Otomatisasi dan penggunaan mesin telah menyebabkan berkurangnya kebutuhan terhadap tenaga kerja pada jenis pekerjaan tertentu, khususnya pekerjaan berkeahlian dasar, sementara kebutuhan tenaga kerja baru justru meningkat pada sektor konstruksi, transportasi, pariwisata, dan industri ritel. Permasalahan yang muncul adalah masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link and match), sehingga pendidikan dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan keterampilan abad ke-21.

Selain itu, dunia juga menghadapi tiga krisis global, yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta penurunan keanekaragaman hayati. Ketiga krisis tersebut diproyeksikan akan terus berlangsung dan berdampak luas terhadap kehidupan manusia. Permasalahan pendidikan yang muncul adalah belum optimalnya pendidikan lingkungan dan pendidikan perubahan iklim dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku berkelanjutan pada peserta didik. Padahal pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang peduli lingkungan, tangguh terhadap bencana, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan

Pembangunan pendidikan di tingkat nasional hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang bersifat kompleks dan saling terkait. Meskipun akses pendidikan telah mengalami peningkatan secara signifikan, namun pemerataan dan mutu layanan pendidikan antarwilayah masih belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta antara satuan pendidikan negeri dan swasta masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan pendidikan.

Dari sisi mutu, capaian hasil belajar peserta didik secara nasional masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar global. Hal ini tercermin dari hasil berbagai asesmen nasional dan

internasional yang menunjukkan bahwa kompetensi literasi membaca, numerasi, dan sains peserta didik Indonesia masih perlu ditingkatkan secara serius. Selain itu, penerapan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter, kompetensi abad 21, dan pemanfaatan teknologi digital belum sepenuhnya merata di seluruh satuan pendidikan.

Permasalahan lain yang masih menonjol adalah keterbatasan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Distribusi guru yang belum proporsional, ketidaksesuaian kualifikasi dengan mata pelajaran yang diampu, serta masih terbatasnya kompetensi pedagogik dan profesional guru di beberapa daerah menjadi faktor penghambat dalam peningkatan mutu pendidikan. Di sisi lain, kesejahteraan dan motivasi kerja pendidik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga masih memerlukan perhatian khusus.

Dari aspek sarana dan prasarana, masih terdapat satuan pendidikan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal, baik dari kondisi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Keterbatasan infrastruktur pendidikan ini berdampak langsung terhadap efektivitas proses pembelajaran dan kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik.

Selain itu, tata kelola dan pembiayaan pendidikan di tingkat nasional juga masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain dalam hal efektivitas pemanfaatan anggaran, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan. Transformasi kebijakan pendidikan juga memerlukan kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan budaya organisasi agar dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh daerah.

Dengan demikian, permasalahan pendidikan di tingkat nasional tidak hanya mencakup aspek akses, mutu, dan relevansi, tetapi juga menyangkut pemerataan, tata kelola, serta kesiapan sistem pendidikan dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai permasalahan strategis yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Dari sisi pemerataan akses, masih terdapat kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah, khususnya di wilayah perdesaan, pegunungan, dan kawasan dengan tingkat sosial ekonomi rendah, yang ditandai dengan masih ditemukannya anak tidak sekolah, angka putus sekolah, serta keterbatasan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal. Dari aspek mutu, capaian kompetensi peserta didik belum merata antar satuan pendidikan, yang dipengaruhi oleh variasi kualitas pembelajaran, keterbatasan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi pembelajaran. Selain itu, distribusi guru belum sepenuhnya proporsional baik dari sisi jumlah, kualifikasi, maupun bidang keahlian. Sementara itu, dari aspek tata kelola, masih terdapat tantangan dalam perencanaan berbasis data, sinkronisasi program antar pemangku kepentingan, efektivitas penganggaran, serta pengawasan mutu layanan pendidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut secara keseluruhan berdampak pada belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang perlu segera di atasi guna mendukung terwujudnya visi “Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan.”

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pendidikan pada masing masing aspek sesuai dengan kondisi objektif global, nasional dan regional beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama pendidikan di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23 Permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum meratanya akses layanan pendidikan yang berkualitas	Masih terdapat anak tidak sekolah, putus sekolah, dan risiko putus sekolah di wilayah tertentu	- Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah - Keterbatasan akses transportasi di wilayah perdesaan /pegunungan - Rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan

			- Belum optimalnya intervensi lintas sektor (pendidikan–sosial–kependudukan) - potensi bonus demografi belum dimanfaatkan secara optimal
		Kesenjangan / ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai SPM antar wilayah	- Keterbatasan anggaran pembangunan fisik - Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang beragam - Perencanaan berbasis kebutuhan belum sepenuhnya optimal
2	Capaian Mutu pembelajaran masih rendah	Capaian kompetensi literasi dan numerasi antar satuan pendidikan masih timpang	- Pembelajaran belum berorientasi pada student-centered learning - Kompetensi pedagogik guru belum merata - minimnya pemanfaatan teknologi pembelajaran - Kualitas pembelajaran belum seragam - Supervisi akademik belum optimal
		Implementasi kurikulum dan pembelajaran belum optimal	- Keterbatasan pelatihan berkelanjutan bagi guru - Beban administrasi guru yang tinggi - Pendampingan implementasi kurikulum masih terbatas
		Rendahnya kesadaran dan kepedulian lingkungan di kalangan peserta didik	- Materi pendidikan lingkungan belum menjadi prioritas dalam kurikulum operasional sekolah. - Minimnya pelatihan pendidik terkait pendidikan perubahan iklim. - Keterbatasan sarana pendukung sekolah berwawasan lingkungan.
		Pendidikan karakter belum terintegrasi secara optimal	- Pembelajaran masih dominan kognitif - Keteladanan dan ekosistem sekolah belum terbentuk kua
		Belum optimalnya transformasi digital pendidikan	- Keterbatasan jaringan internet di daerah tertentu - Keterbatasan perangkat TIK di sekolah - Rendahnya literasi digital peserta didik dan pendidik. - Belum optimalnya sistem pengawasan dan edukasi etika digital (Risiko kecanduan internet, hoaks, cybercrime, dan cyberbullying di lingkungan pendidikan).
3	Belum Meratanya	Ketimpangan distribusi guru antar wilayah dan jenjang	- Ketidakseimbangan formasi ASN

	Kualitas dan Distribusi Guru		- Minimnya regulasi redistribusi guru - Preferensi penempatan guru di wilayah tertentu - Rekrutmen dan pemetaan guru belum optimal - Minimnya insentif di daerah terpencil
		Sebagian guru belum sesuai kualifikasi dan kompetensi	- Perencanaan kebutuhan guru belum berbasis data mutakhir - Terbatasnya akses pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) - Keterbatasan anggaran peningkatan kompetensi

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

2.2.7 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pendidikan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. sehingga isu strategis merupakan suatu peluang atau atntangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Perumusan isu isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan.

Isu tren global yang memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan diantaranya kemanusiaan universal dan kewarganegaraan global. Isu lain yaitu urbanisasi global , Demografi penduduk dunia dimana Indonesia masih memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dengan potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi besar di masa depan di saat negara negara maju sedang menghadapi penuaan populasi dan penurunan angka kelahiran. isu global lain yang menjadi tren adalah pendidikan di tengah perkembangan teknologi, Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dapat mempercepat pencapaian target, memperluas akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mempercepat distribusi materi. Perubahan iklim , kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keaneka ragaman hayati tiga krisis global secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari.

Pembangunan pendidikan nasional masih menghadapi tantangan utama berupa kesenjangan akses dan mutu layanan pendidikan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat, khususnya di wilayah 3T dan kelompok rentan, yang berdampak pada masih terjadinya angka putus sekolah. Mutu hasil pembelajaran, belum optimal akibat pembelajaran yang belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik, implementasi kurikulum yang belum merata, serta kompetensi guru yang bervariasi. Ketimpangan distribusi dan kualifikasi guru, keterbatasan sarana prasarana serta akses TIK, dan belum optimalnya tata kelola serta efektivitas pembiayaan pendidikan turut memperkuat permasalahan sektor pendidikan. Selain itu, penguatan karakter dan kompetensi abad 21, termasuk relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja, masih belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan secara menyeluruh.

Isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung masih dihadapkan pada pemerataan akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu serta kesenjangan ketersediaan sarana dan prasarana antarwilayah sebagai dampak kondisi sosial ekonomi, geografis, dan belum optimalnya intervensi lintas sektor. Peningkatan mutu pembelajaran juga belum merata, ditandai oleh masih terjadinya disparitas capaian literasi dan numerasi serta belum optimalnya implementasi kurikulum dan pembelajaran berdiferensiasi. Dari aspek sumber daya pendidik, masih terdapat ketimpangan distribusi guru antarwilayah serta keterbatasan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi. Selain itu, tata kelola penyelenggaraan pendidikan belum sepenuhnya efektif dan berbasis data, tercermin dari belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antarlevel pemerintahan, pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta efektivitas penganggaran dan pengawasan berbasis kinerja.

Tabel 2.24 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pendidikan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar dan menengah yang disesuaikan dengan potensi lokal Kabupaten Bandung	Belum meratanya akses layanan pendidikan yang berkualitas	Belum optimalnya pelayanan pendidikan di masyarakat	Globalisasi yang ditandai dengan semakin intensifnya interaksi antarbangsa	Akses dan mutu layanan pendidikan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat	pemerataan akses terhadap layanan pendidikan yang bermutu	Pemerataan akses pendidikan
	Capaian mutu pembelajaran masih rendah	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	Demografi penduduk dunia	Mutu hasil pembelajaran	ketersediaan sarana dan prasarana antarwilayah	Capaian mutu pembelajaran
	Belum meratanya distribusi dan kualitas guru		Pendidikan di tangan perkembangan teknologi	Ketimpangan distribusi dan kualifikasi guru,	Peningkatan mutu pembelajaran juga belum merata	tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan
			Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati	keterbatasan sarana prasarana serta akses TIK,	ketimpangan distribusi guru antar wilayah serta keterbatasan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi	

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Isu Strategis 1 : Pemerataan Akses Pendidikan (Daya tampung)

Seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, isu strategis mengenai pemerataan akses pendidikan dan kenaikan daya tampung menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhatikan secara serius. Pemerataan akses pendidikan merupakan upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, untuk

mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi saat ini, antara lain ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan kawasan terpencil, keterbatasan infrastruktur serta fasilitas pendidikan, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata dan berkualitas. Hal ini mengakibatkan disparitas dalam kesempatan belajar yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keluaran pendidikan dan pemerataan pembangunan sumber daya manusia.

Kenaikan daya tampung di satuan pendidikan menjadi salah satu langkah strategis yang harus dilaksanakan guna menjawab kebutuhan peserta didik yang terus meningkat. Namun, sekalipun kuantitas harus ditingkatkan, kualitas penyediaan layanan pendidikan juga wajib diperhatikan agar tujuan pemerataan dapat tercapai secara optimal.

Isu Strategis 2 : Capaian Mutu Pembelajaran

Capaian mutu pembelajaran merupakan salah satu isu strategis utama dalam pembangunan pendidikan karena secara langsung menentukan kualitas hasil belajar peserta didik serta daya saing sumber daya manusia daerah. Mutu pembelajaran tidak hanya diukur dari input pendidikan, tetapi juga dari proses, output, dan outcome pembelajaran yang tercermin dalam kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta keterampilan abad ke-21 peserta didik.

Saat ini, capaian mutu pembelajaran masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Hasil Rapor Pendidikan, Asesmen Nasional, serta indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan menunjukkan bahwa kompetensi dasar peserta didik pada aspek literasi, numerasi, dan karakter belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Disparitas mutu pembelajaran juga masih terjadi antar satuan pendidikan, antar wilayah, serta antara satuan pendidikan negeri dan swasta.

Dalam konteks global, mutu pembelajaran menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing bangsa di tengah dinamika globalisasi, revolusi industri 4.0, transformasi digital, perubahan iklim, serta tantangan geopolitik dan sosial dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat menuntut sistem

pendidikan untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan abad ke-21 (critical thinking, creativity, communication, collaboration), literasi digital, karakter, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Kondisi ini menempatkan capaian mutu pembelajaran sebagai isu strategis yang harus diperkuat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, disrupti teknologi dan digitalisasi pendidikan pascapandemi telah mengubah secara fundamental pola pembelajaran di seluruh dunia. Pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan platform digital, kecerdasan buatan (AI), serta sumber belajar terbuka (open educational resources) menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran global. Namun, tidak semua satuan pendidikan memiliki kesiapan yang sama dalam mengadopsi transformasi ini, sehingga memunculkan digital divide yang berdampak pada kesenjangan mutu pembelajaran antarwilayah dan antarkelompok sosial. berkaitan dengan bonus demografi dan mobilitas tenaga kerja internasional. Dunia kerja global menuntut lulusan yang adaptif, inovatif, berkarakter, dan memiliki keterampilan lintas budaya. Apabila mutu pembelajaran tidak ditingkatkan secara sistematis, maka lulusan pendidikan berpotensi tertinggal dan tidak mampu bersaing di pasar kerja regional maupun global.

Selain itu, tantangan global seperti perubahan iklim, krisis lingkungan, pandemi, serta isu kemanusiaan universal menuntut penguatan pembelajaran yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (Education for Sustainable Development), pendidikan karakter, serta kewarganegaraan global (global citizenship education). Mutu pembelajaran dituntut tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga sikap, nilai, dan tanggung jawab sosial peserta didik sebagai warga dunia.

Isu Strategis 3 : Tata Kelola Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Tata kelola tenaga pendidik dan kependidikan merupakan aspek krusial dalam menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan dan profesional. Pengelolaan ini mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pembinaan, hingga pemberhentian dan pemensiunan

tenaga pendidik. Implementasi tata kelola yang baik sangat berpengaruh terhadap kinerja pendidik dan hasil belajar peserta didik.

Analisa menunjukkan bahwa tata kelola yang efektif didukung oleh beberapa elemen strategis, antara lain transparansi, akuntabilitas, standarisasi layanan pendidikan, sistem pengendalian manajemen, serta sistem informasi manajemen yang memadai. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen tenaga pendidik, seperti sistem berbasis data Dapodik dan aplikasi pelaporan yang terintegrasi, menjadi kunci dalam pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran di RPJMD merupakan acuan dalam penyusunan *logical framework* dinas pendidikan kabupaten Bandung. Dalam rangka pencapaian misi ke 1 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berakhlak serta penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak, maka tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung misi 1 tersebut yang termuat dalam RPJMD yaitu Terwujudnya kualitas hidup sumberdaya manusia yang unggul, berakhlak dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra merupakan penjabaran teknis dan lebih spesifik dari tujuan yang dirumuskan dalam RPJMD, yang sesuai dengan bidang tugas perangkat daerah. Tujuan Renstra dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD. Sasaran dalam RPJMD merupakan target-target pembangunan jangka menengah yang harus dicapai oleh daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Sasaran ini menggambarkan capaian hasil yang konkret dan terukur dalam kurun waktu lima tahun dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah, sasaran RPJMD dijadikan acuan langsung untuk dirumuskan kembali menjadi tujuan Renstra yang lebih spesifik dan operasional. Tujuan Renstra adalah penjabaran teknis dan lebih terukur dari sasaran RPJMD yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah, dengan demikian sasaran RPJMD yang bersifat makro dan strategis dijabarkan menjadi tujuan Renstra yang bersifat mikro dan sebagai tolok ukur kinerja instansi pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini memastikan bahwa seluruh langkah kerja perangkat daerah selaras dengan sasaran

pembangunan daerah secara menyeluruh yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Secara singkat, sasaran dalam RPJMD menjadi dasar perumusan tujuan Renstra, sehingga tujuan Renstra merupakan turunan konkret dan terukur dari sasaran RPJMD yang memandu program serta kegiatan perangkat daerah untuk mencapai hasil pembangunan yang diharapkan.

Berdasarkan pemaparan dari isu strategis yang ada di sub bab sebelumnya, serta sasaran RPJMD yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan maka disusun Tujuan Renstra Dinas Pendidikan yang disusun secara spesifik untuk menjawab dan mengatasi isu strategis tersebut guna mewujudkan peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan yaitu :

Meningkatkan akses mutu pendidikan dan kompetensi dasar masyarakat.

3.1.2 Sasaran

Sasaran dalam Renstra adalah target yang lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai selama periode Renstra. Sasaran ini berfungsi sebagai indikator pencapaian tujuan yang sudah dirumuskan dalam RPJMD dan Renstra. Sasaran Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pendidikan serta arahan dari RPJMD daerah. RPJMD sendiri merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dalam jangka menengah.

Dengan demikian, Renstra Dinas Pendidikan menjadi dokumen perencanaan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan strategis daerah yang sudah dirumuskan di RPJMD. Sasaran strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan disusun untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan nyata di sektor pendidikan yang juga menjadi perhatian dalam RPJMD. di dokumen RPJMD menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sasaran Renstra Dinas Pendidikan fokus pada peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan peningkatan fasilitas pendidikan. sehingga dirumuskan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Meningkat nya peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan
2. Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan
3. Meningkatnya capaian minimum layanan dasar pendidikan

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya akses mutu pendidikan dan kompetensi dasar masyarakat		Rata Rata Lama Sekolah (RLS)	9,23	9,41	9,52	9,63	9,74	9,85	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia tertentu (biasanya 15 tahun ke atas atau 25 tahun ke

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										atas) dalam menjalani atau menyelesaikan pendidikan formal yang pernah dijalani
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	11 2,76	11 2,83	11 2,89	11 2,96	11 3,02	11 3,09	Lamanya sekolah (dalam tahun)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang . perhitungan HLS diasumsikan dengan peluang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										anak untuk tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah pada umur yang sama saat ini.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas
		Meningkatnya capaian minimum layanan dasar pendidikan	Indeks SPM Pendidikan	76,25	76,85	77	77	77	88	Indeks SPM pendidikan dihitung berdasarkan capaian mutu minimal

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										layanan dasar dan jumlah penerima layanan dasar pendidikan yang terpenuhi
		Meningkatnya pemerataan kualitas	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,23	9,41	9,52	9,63	9,74	9,85	Jumlah tahun yang digunakan oleh

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		pendidikan								penduduk usia tertentu (biasanya 15 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas) dalam menjalani atau menyelesaikan pendidikan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										formal yang pernah dijalani
		Meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,76	12,83	12,89	12,96	13,02	13,09	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										masa mendatang . perhitungan HLS diasumsikan dengan peluang anak untuk tetap bersekolah pada umur berikutnya sama

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										dengan peluang penduduk yang bersekolah pada umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas

3.2 Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah disajikan dalam Bab 2 serta dikaitkan dengan target-target yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam sub bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Dinas Pendidikan selama 5 (lima) Tahun 2025-2029 untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang memungkinkan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah – langkah dan pedoman yang berisikan perencanaan pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan, maka dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) memiliki peran penting dalam penyusunan Renstra DISDIK karena membantu mengidentifikasi posisi strategis organisasi secara menyeluruh. Melalui analisis ini, dinas dapat memahami kekuatan internal (*Strengths*) yang harus dimaksimalkan, seperti kapasitas sumber daya manusia, program unggulan, atau fasilitas yang dimiliki. Di sisi lain, kelemahan (*Weaknesses*) organisasi, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang kurang optimal, atau kendala regulasi, dapat diidentifikasi untuk diperbaiki. Dari perspektif eksternal, peluang (*opportunities*) seperti dukungan kebijakan nasional, potensi kolaborasi dengan pihak swasta, atau tren pembangunan yang relevan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Sementara itu, ancaman (*Threats*) seperti perubahan regulasi, dinamika ekonomi, atau risiko bencana, dapat diantisipasi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pelaksanaan program.

Setelah komponen SWOT diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah memetakan hubungan antara faktor – faktor tersebut untuk merumuskan strategi yang relevan. Strategi SO (*Strengths* –

Opportunities) memanfaatkan kekuatan internal untuk merebut peluang eksternal. Strategi WO (*Weakness - Opportunities*) mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ST (*Strengths - Threats*) menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi dampak ancaman eksternal. Dan strategi WT (*Weakness - Threats*) meminimalkan kelemahan internal sambil memitigasi ancaman eksternal. Analisis SWOT berperan sebagai jembatan antara tahap identifikasi masalah dan tahap perumusan rencana aksi strategis. Dengan mengintegrasikan hasil analisis SWOT, dinas dapat merumuskan strategi yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat menjawab permasalahan utama sekaligus memanfaatkan peluang secara optimal. Analisis ini juga membantu dalam menyusun prioritas program dan kegiatan yang sejalan dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah yang lebih luas.

Tabel 3.2 Strategi berdasarkan Analisis Kekuatan (*Strength*) dan Peluang (*Opportunity*)

	Kekuatan (<i>Strength</i>) 1. Memiliki jumlah pegawai yang besar 2. Adanya tenaga ahli yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 3. Adanya payung hukum yang melandasi pelaksanaan pelayanan pendidikan (perda pendidikan) 4. Terdapat prosedur dan SOP yang mengatur pelaksanaan pelayanan pendidikan 5. memiliki akses ke data statistik dan data spasial melalui pemanfaatan sistem informasi 6. Berpengalaman dalam melaksanakan program program strategis nasional hingga program prioritas Bupati 7. Memiliki Alokasi anggaran dari APBD dan memiliki sumberdana lain dari pemerintah provinsi dan pusat 8. prioritas pembangunan SDM dalam hal ini pelayanan pendidikan tercantum dalam RPJMD
--	---

Peluang (<i>Opportunity</i>) 1. Adanya dukungan pemerintah pusat melalui pendanaan alternative 2. Kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga non pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan 3. Diimpelementasikannya kebijakan tata kelola satu data Indonesia (SDI) 4. Dibentuknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 5. Terdapat basis data regsosek untuk pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran 6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pendidikan	Strategi S - O 1. Melakukan pengelolaan data sesuai kebijakan satu data Inonesia (SDI) melalui pemanfaatan akses data statistik dan spasial untuk mendukung perencanaan program yang lebih tepat sasaran 2. Melakukan Sinkronisasi Perencanaan pendidikan di semua jenjang 3. Meningkatkan Kordinasi, kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pusat dan lembaga non pemerintah untuk optimalisasi pendanaan 4. Memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi geospasial untuk mendukung layanan bidang pendidikan 5. Membangun platform digital berbasis data real time yang mengintegrasikan seluruh informasi mengenai kebutuhan , ketersediaan , perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan pendidikan
---	--

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Tabel 3.3 Strategi berdasarkan Analisis Kelemahan (*Weakness*) dan Peluang (*Opportunity*)

	Kelemahan (<i>Weakness</i>) 1. jumlah satuan pendidikan belum mencukupi daya tampung penduduk usia sekolah 2. Distribusi guru yang belum merata 3. Masih banyak guru jenjang SD yang belum berkualifikasi S1/D4 4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah 5. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah belum ideal 6. Masih banyak satuan pendidikan aset pemda yang belum bersertifikat 7. Proses Verifikasi dan Validasi anak tidak sekolah baik yg drop out maupun tidak melanjutkan masih rendah
Peluang (<i>Opportunity</i>) 1. Adanya dukungan pemerintah pusat melalui pendanaan alternative 2. Kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga non pemerintah yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan	Strategi W -O 1. Mengembangkan platform digital berbasis sistem informasi geospasial untuk mendata dan memonitor tingkat kerusakan sarana prasarana sekolah 2. Inventarisasi dan sertifikasi aset satuan pendidikan sebagai aset pemerintah daerah untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan pemanfaatan fasilitas

3. Diimplementasikannya kebijaksanaan tata kelola satu data Indonesia (SDI)	3. menerapkan sistem informasi geospasial berbasis digital untuk memetakan kebutuhan dan ketersediaan satuan pendidikan
4. Dibentuknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	4. Fokus pada pembangunan dan penambahan kapasitas satuan pendidikan terutama di daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan agar distribusi pendidikan lebih merata.
5. Terdapat basis data regsosek untuk pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran	5. Mendorong dan memfasilitasi penin gkatan kualifikasi guru jenjang SD ke tingkat minimal S1 /D4 melalui beasiswa, pelatihan dan pendidikan lanjutan.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pendidikan	

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Tabel 3.4 Strategi berdasarkan analisis Kekuatan (*Strength*) dan Ancaman (*Threat*)

	Kekuatan (<i>Strength</i>) 1. Memiliki jumlah pegawai yang besar 2. Adanya tenaga ahli yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 3. Adanya payung hukum yang melandasi pelaksanaan pelayanan pendidikan (perda pendidikan) 4. Terdapat prosedur dan SOP yang mengatur pelaksanaan pelayanan pendidikan 5. memiliki akses ke data statistik dan data spasial melalui pemanfaatan sistem informasi 6. Berpengalaman dalam melaksanakan program program strategis nasional hingga program prioritas Bupati 7. Memiliki Alokasi anggaran dari APBD dan memiliki sumberdana lain dari pemerintah provinsi dan pusat prioritas pembangunan SDM dalam hal ini pelayanan pendidikan tercantum dalam RPJMD
--	--

Ancaman (<i>Threat</i>) 1. pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi 2. Tingginya arus informasi di era globalisasi tanpa bisa disaring batasan usia 3. perubahan regulasi pada tatanan pemerintahan pusat 4. keterbatasan lahan untuk menambah fasilitas pendidikan 5. Pengentasan kemiskinan ekstrim 6. Tingginya prevelansi stunting	Strategi S-T 1. Mengoptimalkan tenaga ahli dan jumlah pegawai untuk merancang dan mengelola program pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap peningkatan populasi dan urbanisasi yang pesat, misalnya melalui perencanaan kapasitas sekolah dan program peningkatan kualitas guru 2. Mengadaptasi dan meng-update prosedur dan SOP berdasarkan perubahan regulasi pusat, dengan dukungan payung hukum (perda pendidikan) agar pelayanan pendidikan tetap berjalan efektif dan sesuai aturan yang berlaku
--	---

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung disusun berdasarkan tugas dan fungsi dinas serta kesesuaian dengan konsep pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka terdapat 4 strategi utama Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Strategi Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan akses mutu pendidikan dan kompetensi dasar masyarakat	Meningkatnya peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pendidikan	Melaksanakan Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan pra sekolah dan 12 tahun wajib pendidikan dasar dan menengah) sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Memperkuat Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan berkualitas
	Meningkatnya capaian minimum layanan dasar pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
		Mendorong Revitalisasi dan Optimalisasi Pendidikan Non Formal

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Strategi Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Pendidikan.

Penahapan pembangunan pendidikan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Penahapan Renstra Pendidikan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemetaan kondisi wajib belajar 13 tahun dan perumusan kurikulum berbasis talenta, karakter, loiterasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor	Peningkatan wajib belajar 13 tahun dan perumusan kurikulum berbasis talenta, karakter, loiterasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor	Peningkatan wajib belajar 13 tahun dan perumusan kurikulum berbasis talenta, karakter, loiterasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor	Peningkatan wajib belajar 13 tahun dan perumusan kurikulum berbasis talenta, karakter, loiterasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor	Peningkatan wajib belajar 13 tahun dan perumusan kurikulum berbasis talenta, karakter, loiterasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor
Pemetaan dan perumusan kebutuhan sarana pendidikan anak usia dini, dasar dan	Peningkatan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar	Peningkatan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar	Peningkatan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar	Peningkatan sarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
menengah yang memenuhi standar kualitas serta aman bencana.	kualitas serta aman bencana.	kualitas serta aman bencana.	kualitas serta aman bencana.	standar kualitas serta aman bencana.
Pemetaan kondisi pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan peningkatan akses masyarakat terhadap PKBM	Peningkatan kualitas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan akses masyarakat terhadap PKBM melalui kolaborasi multipihak dan multi sektor	Peningkatan kuantitas dan kualitas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan akses masyarakat terhadap PKBM melalui kolaborasi multipihak dan multi sektor	Peningkatan kuantitas dan kualitas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan akses masyarakat terhadap PKBM melalui kolaborasi multipihak dan multi sektor	Peningkatan kuantitas dan kualitas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang inklusif
Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan	Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan	Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan	Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan	Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
masyarakat berbasis nasional	masyarakat berbasis nasional	masyarakat berbasis nasional	masyarakat berbasis nasional	lokal berbasis nasional
kurikulum nasional	kurikulum nasional	kurikulum nasional	kurikulum nasional	kurikulum nasional
lokal	lokal	lokal	lokal	
Pemetaan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah terluar perbatasan.	pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah terluar perbatasan.	pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah terluar perbatasan.	pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah terluar perbatasan.	pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah terluar perbatasan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung, tahun 2025 - 2029

Tahapan pembangunan ini mencerminkan arah pembangunan yang terstruktur dengan fondasi yang kuat di awal dan berlanjut ke peningkatan aksesibilitas, infrastruktur, hingga penguatan manajemen kinerja dan pemantapan sistem tata kelola pendidikan. kelima tahap pembangunan ini tidak dimaksudkan sebagai tahapan linier, melainkan sebagai siklus yang saling memperkuat. Pembangunan aksesibilitas dapat dimulai sejak tahap awal namun kualitas dan keberlanjutannya ditingkatkan melalui penguatan data, regulasi dan kapasitas anggaran.

3.3 Lokus Renstra Dinas Pendidikan

Lokus Renstra DISDIK merujuk pada wilayah wilayah atau entitas spasial tertentu yang menjadi fokus utama intervensi program dan kegiatan selama periode renstra 2025 -2029. Penetapan lokus bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Penetapan lokus akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran, perencanaan kegiatan, serta penentuan prioritas pembangunan setiap tahun. Dengan adanya fokus spasial yang jelas, intervensi diharapkan lebih terarah, berdampak nyata, dan memperkuat prinsip keadilan spasial dan inklusivitas pembangunan. Namun, lokus pembangunan ini bersifat dinamis dan akan ditinjau ulang secara berkala sesuai perkembangan kondisi lapangan, evaluasi capaian tahunan, dan ketersediaan anggaran. Mekanisme penyesuaian akan merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi, masukan pemangku kepentingan, serta dinamika sosial ekonomi wilayah.

Penetapan lokus dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria teknis, spasial, dan sosial ekonomi, antara lain Tingkat kebutuhan masyarakat (satuan pendidikan) dan urgensi intervensi, Kondisi eksisting wilayah, termasuk akses terhadap prasarana dasar dan status kepemilikan tanah, Data spasial tematik dan hasil kajian perencanaan serta hasil penjangkaran aspirasi melalui musrenbang, pokok – pokok pikiran DPRD, dan laporan masyarakat.

Tabel 3.7 Penyajian Lokus Kebutuhan Ruang Kelas jenjang Sekolah Dasar

Lokasi wilayah Kecamatan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Ruang kelas yang tersedia	Kebutuhan ruang kelas
Arjasari	389	319	70
Baleendah	845	494	351
Banjaran	414	292	122
Bojongsoang	356	246	110
Cangkuang	243	181	62
Cicalengka	482	350	132
Cikancung	354	286	68
Cilengkrang	194	101	93
Cileunyi	646	477	169
Cimaung	284	232	52
Cimenyan	361	278	83
Ciparay	571	455	116
Ciwidey	308	245	63
Dayeuhkolot	418	269	149
Ibun	323	302	21
Katapang	451	258	193
Kertasari	305	278	27
Kutawaringin	359	270	89
Majalaya	569	449	120
Margaasih	372	264	108
Margahayu	410	245	165
Nagreg	252	207	45
Pacet	407	373	34
Pameungpeuk	257	206	51
Pangalengan	571	535	36
Paseh	488	400	88
Pasirjambu	338	267	71
Rancabali	231	195	36
Rancaekek	703	550	153
Solokanjeruk	318	293	25

Lokasi wilayah Kecamatan	Jumlah Rombongan Belajar	Jumlah Ruang kelas yang tersedia	Kebutuhan ruang kelas
Soreang	399	266	133
Grand Total	12618	9583	3035

Sumber data : dapodikdasmen, kemdikdasmen , cut off desember 2024

Lokus prioritas intervensi peningkatan aksesibilitas difokuskan pada wilayah yang rasio rombongan belajar terhadap ruang kelas nya masih tinggi, hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran selain meningkatkan daya tampung. selain pembangunan ruang kelas baru , fokus pembangunan infrastruktur juga dilaksanakan rehabilitasi ruang kelas serta pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan.

Lokus prioritas selanjutnya yaitu penanganan anak tidak sekolah, baik yang drop out, tidak melanjutkan maupun belum pernah bersekolah. Lokus penanganan anak tidak sekolah merupakan langkah strategis yang ditempuh sebagai bentuk peningkatan angka partisipasi pendidikan. Penetapan lokus ini dilakukan di wilayah-wilayah dengan konsentrasi tinggi anak tidak sekolah (ATS), sehingga penanganan bisa lebih terfokus dan efektif. Dalam lokus tersebut, berbagai program dan kegiatan dirancang dan dilaksanakan secara holistik, mulai dari pendataan ATS, sosialisasi, pendampingan, hingga pengembalian anak-anak ATS ke jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

Penanganan ATS di lokus ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan dinas pendidikan, tetapi juga melibatkan multi pihak seperti UNICEF, dinas sosial, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan nonformal. Strategi yang diterapkan mencakup pendekatan persuasif kepada anak dan orang tua, pemberian bantuan pendidikan, pelaksanaan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C), serta inovasi pelatihan keterampilan hidup untuk memotivasi anak kembali bersekolah.

Dengan adanya lokus penanganan anak tidak sekolah, diharapkan anak-anak yang selama ini tidak mendapatkan akses

pendidikan dapat terjangkau secara langsung, sehingga mereka bisa kembali ke jenjang pendidikan yang sesuai usia atau mendapatkan alternatif pendidikan nonformal. Hal ini berdampak positif pada peningkatan angka partisipasi pendidikan yang selanjutnya memperkuat capaian tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan merata.

Secara singkat, lokus penanganan anak tidak sekolah adalah upaya terarah dan terintegrasi yang menjadi media efektif dalam mengurangi angka anak putus atau tidak bersekolah, yang pada akhirnya meningkatkan angka partisipasi pendidikan secara keseluruhan. Program ini didukung oleh langkah-langkah sistematis mulai dari pendataan hingga monitoring evaluasi, dengan pendekatan multisektoral dan kolaborasi lintas stakeholders di tingkat desa, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Tabel 3.8 Penyajian Lokus Penanganan Anak Tidak Sekolah

No	Kecamatan	Alasan tidak sekolah (hasil verifikasi)													Sudah Verifikasi	Belum Verifikasi	Total
		k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6	k_7	k_8	k_9	k_10	k_11	k_12	k_13			
1	Kec Ciwidey	97	4	1	80	26	0	299	4	1	0	0	8	57	577	1,461	2,038
2	Kec Pasirjambu	60	15	4	5	25	0	117	4	0	0	0	5	38	273	1,656	1,929
3	Kec Cimaung	123	23	5	14	12	0	260	20	1	0	0	6	23	487	1,306	1,793
4	Kec Pangalengan	364	167	12	47	60	0	582	6	2	0	0	12	53	1,305	2,409	3,714
5	Kec Kertasari	103	10	3	66	19	0	215	15	3	0	0	8	75	517	12	529
6	Kec Pacet	90	36	0	26	9	0	174	4	0	0	0	8	93	440	1,733	2,173
7	Kec Ibun	100	16	6	18	21	0	188	1	1	0	0	0	87	438	1,155	1,593
8	Kec Paseh	226	16	10	36	14	0	99	40	1	0	0	3	80	525	1,932	2,457
9	Kec Cikancung	141	9	4	17	10	0	200	7	0	0	0	6	48	442	1,431	1,873
10	Kec Cicalengka	130	18	4	50	19	0	178	5	1	0	0	1	28	434	1,175	1,609
11	Kec Rancaekek	88	18	4	62	10	0	130	19	0	0	0	9	37	377	1,955	2,332
12	Kec Majalaya	183	60	2	72	13	1	156	32	2	0	3	4	135	663	1,966	2,629
13	Kec Ciparay	185	66	2	29	33	0	396	29	0	0	0	9	120	869	2,037	2,906
14	Kec Baleendah	194	177	6	130	37	0	520	43	2	0	1	13	129	1,252	2,843	4,095
15	Kec Arjasari	129	37	2	35	15	0	137	1	7	0	0	2	14	379	1,352	1,731
16	Kec Banjaran	170	89	0	14	6	0	179	17	1	0	0	3	33	512	188	700
17	Kec Pameungpeuk	58	88	0	30	6	0	236	4	0	0	0	6	34	462	878	1,340

18	Kec Katapang	110	151	3	20	13	0	329	4	0	0	1	3	137	771	1,356	2,127
19	Kec Soreang	53	105	1	6	5	0	177	1	0	0	0	1	57	406	1,483	1,889
20	Kec Margaasih	159	40	20	80	24	0	444	28	2	0	0	2	53	852	222	1,074
21	Kec Margahayu	70	53	3	11	5	0	215	8	0	0	0	2	42	409	986	1,395
22	Kec Dayeuhkolot	56	26	1	15	5	0	123	7	0	0	0	2	78	313	951	1,264
23	Kec Bojongsoang	114	17	10	24	12	0	53	4	0	0	0	2	26	262	873	1,135
24	Kec Cileunyi	84	15	16	14	8	1	59	5	0	0	0	3	51	256	1,399	1,655
25	Kec Cilengkrang	63	28	2	8	15	0	119	0	0	0	0	0	7	272	527	799
26	Kec Cimenyan	96	17	3	15	5	0	68	12	0	0	0	5	1	252	1,153	1,405
27	Kec Rancabali	68	2	0	18	14	0	395	1	0	0	0	11	4	593	1,003	1,596
28	Kec Nagreg	33	4	1	6	5	0	22	4	0	0	0	2	8	115	572	687
29	Kec Solokanjeruk	40	6	1	3	5	0	146	1	0	0	0	3	7	222	1,303	1,525
30	Kec Cangkuang	83	63	0	13	14	0	165	0	0	0	0	1	9	358	1,017	1,375
31	Kec Kutawaringin	95	36	9	48	15	1	179	4	1	0	0	5	17	510	1,875	2,385
															15,543	40,209	55,752

sumber data : vervalpd.dapodikdasmen.go.id, pusdatin kemendikdasmen, Agustus 2025

Implementasi lokus program pendidikan yang terkait dengan program prioritas dan alokasi dana dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang terintegrasi. Implementasi lokus program pendidikan dalam konteks program prioritas dan alokasi dana diarahkan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Upaya integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi kunci keberhasilannya.

Tabel 3.9 Lokus intervensi program dan pagu indikatif

No	Program	Pagu Anggaran	Lokus
1	Program Pengelolaan Pendidikan	386.383.688.078	seluruh kecamatan di Kab. Bandung
2	Program Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	1.150.000.000	seluruh kecamatan di Kab. Bandung
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	750.000.000	seluruh kecamatan di Kab. Bandung
4	Program pengendalian Perizinan Pendidikan	500.362.152	seluruh kecamatan di Kab. Bandung
5	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam Bahasa Daerah Kab/Kota	800.000.000	seluruh kecamatan di Kab. Bandung

Sumber: Analisa Dinas Pendidikan, tahun 2025

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan dalam penyusunan Renstra DISDIK Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran atas strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Arah kebijakan ini dirancang untuk memberikan panduan yang lebih operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi daerah dapat dicapai secara optimal.

Sebagai langkah strategis, arah kebijakan ini disusun dengan merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini mencakup kebijakan yang sistematis dan terukur, sebagai kerangka acuan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam mewujudkan prioritas pembangunan di bidang pendidikan.

Untuk mewujudkan tahap pembangunan tahunan yang telah ditetapkan selama lima tahun ke depan, diperlukan langkah – langkah konkret yang terukur dan berorientasi pada hasil. Langkah – langkah ini dirancang sebagai bentuk implementasi strategi yang telah disusun, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah – langkah ini tidak hanya berfungsi untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan berjalan secara sistematis, terkoordinasi, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Tabel ini bawah ini akan menjelaskan secara rinci mengenai strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan selama periode lima tahun mendatang untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bandung.

Tabel 3.10 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelaksanaan kebijakan, prosedur administratif, standar kualitas pendidikan, serta kriteria teknis yang menjadi pedoman bagi berbagai kegiatan, termasuk manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia pendidikan, dan penyelenggaraan layanan pendidikan	Peningkatan wajib belajar 13 tahun melalui kolaborasi lintas sektor dengan penguatan kurikulum berbasis talenta, karakter, literasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak. Melalui kolaborasi multipihak dan lintas sektor.	1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas Pembelajaran pendidikan anak usia dini 2. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah 3. Penyaluran Bantuan Pendidikan yang tepat sasaran 4. Peningkatan Daya Tampung	
		Peningkatan penyediaan sarana prasarana	1. pembangunan satuan pendidikan baru negeri di wilayah	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang memenuhi standar kualitas dan aman bencana	yang padat penduduk dan belum mempunyai sekolah negeri 2. revitalisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan 3. penyediaan sarana pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan 4. penyediaan sarana prasarana satap PAUD-SD	
		Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) yang inklusif	1. pemenuhan standar lulusan pendidikan non formal 2. penjaminan satuan pendidikan non formal berkualitas	
		Pemenuhan, pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga pendidik	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang berkualitas, terutama di Daerah Terluar dan Perbatasan.	pendidikan dasar 2. Peningkatan Sebaran dan Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui pemetaan PTK, pendidikan, pelatihan dan pemenuhan kesejahteraan PTK	
		Pengembangan kegiatan belajar mengajar melalui pemberdayaan masyarakat lokal berbasis kurikulum nasional.	1. Pemberian biaya personil afirmasi bagi peserta didik semua jenjang 2. Pemberian beasiswa prestasi akademik dan non akademik	

Sumber: Analisa data Dinas Pendidikan, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung serta mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, diperlukan penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang sistematis dan terintegrasi. Program ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan tantangan yang ada. Program-program yang dirancang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang layak, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan karakter siswa, serta pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, setiap program juga perlu disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya yang tersedia, serta dapat diukur capaian dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Indikasi program yang disusun diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	(1)	TUJUAN	(2)	SASARAN	(3)	OUTCOME	(4)	OUTPUT	(5)	INDIKATOR	(6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	(7)	DO	(8)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		Meningkatnya akses mutu pendidikan dan kompetensi dasar masyarakat								Rata Rata Lama Sekolah				jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia tertentu (biasanya 15 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas) dalam	

							menjalani atau menyelesaikan pendidikan formal yang pernah dijalani
							Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa
						Harapan Lama Sekolah	

						mendatang. perhitungan HLS diasumsikan dengan peluang anak untuk tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah pada umur yang sama saat ini. HLS
--	--	--	--	--	--	--

						dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas
	Meningkatnya capaian minimum layanan dasar pendidikan			Indeks Pendidikan		Indeks SPM pendidikan dihitung berdasarkan capaian mutu minimal layanan dasar dan jumlah penerima layanan dasar pendidikan yang terpenuhi

	Meningkatnya peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan				Harapan Lama Sekolah (HLS)		
	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		
		Meningkatnya partisipasi			presentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	Program Pengelolaan Pendidikan	proporsi anak usia 5-6 tahun yang masih

		anak usia sekolah		dalam pendidikan anak usia dini (APS)		bersekolah dalam pendidikan anak usia dini dibandingkan dengan total populasi anak usia 5-6 tahun. Secara lebih rinci, angka partisipasi murni (APM) ini dihitung dari rasio antara jumlah anak usia 5-6 tahun yang
--	--	-------------------	--	---------------------------------------	--	---

						dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase
		Meningkatnya proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang	

						Telah Dibangun
			Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

				Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia
				Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga PAUD Tersedia	Jumlah Praktik Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga

			Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golong an, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golong an, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golo ngan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan

							dan Manajemen	
						Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD
						Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara

				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
				Koordinasi, Perencanaan,	Terlaksananya Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Dokumen

				Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Sosialisasi Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
				Komunitas Belajar dan Pendidik Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi Komunitas Belajar dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
				Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

				Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia
				Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata
				Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
				Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomb	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang

				Akademik dan Non Akademik	a Akademik dan Non Akademik		Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik
				Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik
				Perpustakaan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Terlayannya satuan pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan	Pemberian layanan	Jumlah kegiatan

				dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
				Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat
				Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan,	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan,	Bimbingan Teknis, Pelatihan,	Jumlah Peserta Bimbingan

				dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan
				Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
				Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan

					Peserta Didik yang Tersedia	Peserta Didik yang Tersedia
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
			Meningkatnya Angka Partisipasi ANak Usia Sekolah		Presentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di jenjang SD	Persentase anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar (SD / MI)

							dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada wilayah tertentu
							ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa sekolah dasar dalam membaca dan memahami teks secara
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
							Skor kemampuan literasi SD
							Meningkatnya Kompetensi literasi siswa

							interaktif. diambil dari Asesmen nasional dan capaian terdapat di rapor pendidikan
							nilai yang diperoleh siswa sekolah dasar setelah mengikuti tes literasi numerasi yang mengukur kemampuan
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
							Skor kemampuan Numerasi SD
							Meningkatnya KOMPETENSI Numerasi siswa

							mereka dalam memahami, menafsirkan, dan menggunakan angka serta simbol matematika dalam konteks sehari-hari. Iambil dari Asesmen nasional dan capaian terdapat di rapor pendidikan
--	--	--	--	--	--	--	--

				Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	Iklm Inklusivitas SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	iklim inklusivitas di SD diukur berdasarkan indeks yang mencakup aspek layanan disabilitas, penerapan pembelajaran berbasis karakter inklusif (CBI), sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas
--	--	--	--	--	--	--	--

							yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Nilai iklim inklusivitas ini biasanya dinyatakan dalam skor atau persentase yang merefleksikan seberapa baik satuan pendidikan
--	--	--	--	--	--	--	--

							kepala sekolah serta guru dalam menerapkan toleransi terhadap keberagaman agama, budaya, serta komitmen terhadap kebangsaan.
							Pengukuran skor iklim keamanan dilakukan berdasarkan
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
							Iklim Keamanan SD

							data administrasi pendidikan dan survei lingkungan belajar yang menilai tingkat kesejahteraan psikologis, rendahnya kasus perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, serta penyalahguna
--	--	--	--	--	--	--	---

							an narkoba di sekolah. Skor ini biasanya dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan seberapa kondusif lingkungan sekolah terhadap keamanan peserta didik
--	--	--	--	--	--	--	--

				Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
				Ruang Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

				Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
				Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang

							Telah Dibangun
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Ruang Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Perpustakaan Sekolah yang	Jumlah Perpustakaan	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan

				Alat Tangga Rumah Sekolah yang Tersedia	Jumlah Rumah Sekolah yang Tersedia	Alat Tangga Rumah Sekolah	Pengadaan Rumah Sekolah	Jumlah Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
				Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
				Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah	Penyediaan Biaya Personil	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik

					Sekolah Menengah Atas Diterima Peserta Didik	Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik Sekolah Dasar	Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
					Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik Peraga Siswa yang Tersedia	Pengadaan Alat Praktik Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik Peraga Siswa yang Tersedia
					Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan

								Non Akademik
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas

				Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Dibangun	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun
				Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

				Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi
				Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

				Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan
				Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
				Terlaksananya Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil	Koordinasi, Perencanaan,	Jumlah Dokumen

				Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Sosialisasi Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

				Komunitas Belajar dan Pendidik Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi Komunitas Belajar dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
				Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia
				Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan

					kekerasan, dan intoleransi	perundungan, kekerasan, dan intoleransi
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik
			Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

				Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
			Meningkatnya Angka Partisipasi ANak Usia Sekolah		Presentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di jenjang SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	daya serap pendidikan di jenjang SMP terhadap

							pendidikan inklusif. Nilai iklim inklusivitas ini biasanya dinyatakan dalam skor atau persentase yang merefleksikan seberapa baik satunya pendidikan mampu menyediakan suasana pembelajaran
--	--	--	--	--	--	--	--

								yang inklusif bagi semua peserta didik
								nilai rerata yang mencerminkan kondisi satuan pendidikan dasar yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah serta guru dalam menerapkan
								Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
								Iklim kebinekaan SMP

							toleransi terhadap keberagaman agama, budaya, serta komitmen terhadap kebangsaan.
							Pengukuran skor iklim keamanan dilakukan berdasarkan data administrasi pendidikan dan survei
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
							Iklim Keamanan SMP

							lingkungan belajar yang menilai tingkat kesejahteraan psikologis, rendahnya kasus perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, serta penyalahgunaan narkoba di sekolah. Skor ini biasanya dinyatakan
--	--	--	--	--	--	--	--

							dalam persentase yang menunjukkan seberapa kondusif lingkungan sekolah terhadap keamanan peserta didik
							Persentase anak usia 13- 15 tahun yang sudah tamat atau sedang
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
							Angka Partisipasi Sekolah usia 13- 15 tahun (APS)
							Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Bandung

			Sekolah/TU yang Terbangun	Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Guru/Kepala Sekolah/TU	Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
			Ruang Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun
			Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium

						yang Dibangun	Telah Dibangun	yang Dibangun	Telah Dibangun
					Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	
					Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	
					Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang	

								Telah Dibangun
				Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	
				Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	
				Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	

							Telah Dibangun
			Ruang kelas yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah kelas yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			Ruang Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
			Perpustakaan Sekolah yang	Jumlah Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah	

					Terehabilitasi Sedang/Berat	yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Perpustakaan Sekolah	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
					Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
					Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	
					Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjah Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Gur	

				yang Terehabilitasi Sedang/Berat	yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sekolah/Guru/P enja Sekolah	u/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Fasilitas yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat
				Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana,

				Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
				Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia
				Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah

								Sekolah yang Tersedia
								Jumlah Sarana, Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
								Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
								Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

				Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
				Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik Peraga Siswa yang Tersedia	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia
				Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golonga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golong	Pengembangan Karir dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan

				n, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	an, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Menengah Pertama	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan
				Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang	Pengelolaan Dana Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang

				Ruang Kepala Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
				Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Peningkatan profesi perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi

				Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
				Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah digital konten untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Pengembangan konten digital konten untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

				Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

				Meningkat nya Angka Partisipasi ANak Usia Sekolah			Presentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi di jenjang Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Presentase anak usia 7- 18 tahun yang berpartisipasi di jenjang Pendidikan Kesetaraan
					Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk usia 7- 18 tahun di Kabupaten Bandung		Angka Partisipasi Sekolah usia 7- 18 tahun (APs)	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 tahun (APs)
					Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Keseta		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Keset	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Jumlah Gedung/Rua ng Kelas/Ruang Guru

				raan yang Terbangun	araan yang Telah Dibangun	Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Ke setaraan yang Telah Dibangun
				Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
				Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia

				Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan

				Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		ngan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
				Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keseta raan	Jumlah Sekolah Nonformal/Keset araan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keset araan	Jumlah Sekolah Nonformal/Ke setaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
				Terlaksananya Pengelolaan Dana	Jumlah Sekolah Nonformal/Keset	Pengelolaan Dana BOP	Jumlah Sekolah

				BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan	araan yang Mengelola Dana BOP	Sekolah Nonformal/Keset araan	Nonformal/Ke setaraan yang Mengelola Dana BOP
				Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapabilitas dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keset araan	Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keset araan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapabilitas dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Ke setaraan
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Keset araan yang	Pemeliharaan Mebel Pendidikan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Ke setaraan yang

				Nonformal/Keseta raan	Dilaksanakan Pemeliharaan	Nonformal/Keset araan	Dilaksanakan Pemeliharaan
				Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi
				Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

					untuk Pendidikan		(TIK) untuk Pendidikan
				Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan telah dikembangkan	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan
				Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

				Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
				Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan

								yang dilaksanakan
				Komunitas Belajar dan Pendidik Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	
				Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	

							kekerasan, dan intoleransi	dan intoleransi
						Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan yang mendapat sertifikat kompetensi
						Tersedianya infrastruktur TIK	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia
						Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata

				Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik Mengikuti Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
				Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
				Peserta Didik Menerima Perlengkapan	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Tersedia	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Tersedia

				Dasar Buku Teks dan Non Teks	Diterima Peserta Didik		Diterima Peserta Didik
				Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun
				Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
				Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
				Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana,

				Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

								yang dilaksanakan
				Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Sedang/Berat Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
				Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun
				Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Rumah Sekolah yang Tersedia	Jumlah Rumah Sekolah yang Tersedia	Pengadaan Alat Rumah Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia

				Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
				Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
				Mebel Pendidikan Nonformal/Keseta raan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan
			Meningkat nya kualitas kurikulum pendidikan		Presentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Program Pengembangan kurikulum muatan lokal	Presentase satuan pendidikan yang mengembang kan kurikulum muatan lokal
				Tersedianya kurikulum muatan lokal di	jumlah kurikulum muatan lokal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	jumlah kurikulum muatan lokal

				jenjang pendidikan dasar	jenjang pendidikan dasar tersusun	Pendidikan Dasar	jenjang pendidikan dasar yag tersusun
				Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun
				Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia

				Penyusun Kurikulum Muatan Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensi Penyusun Kurikulum Muatan Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensi Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensi	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Pendidikan Dasar Penyusun Kurikulum Muatan Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensi Penyusun Kurikulum Muatan Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensi Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensi
			Buku muatan Pendidikan yang dinilai/ditelaah teks lokal Dasar telah dinilai/ditelaah Jumlah teks muatan lokal Pendidikan Dasar telah dinilai/ditelaah	Jumlah teks muatan lokal Pendidikan Dasar telah dinilai/ditelaah Penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah Penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah

				Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun
				Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaia n Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun

				Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan	jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF yang ditetapkan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF yang ditetapkan
				Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

								yang Tersusun
				Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak dan Usia Dini Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak dan Usia Dini Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Jumlah Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak dan Usia Dini Pendidikan Nonformal yang Tersedia		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak dan Usia Dini Pendidikan Nonformal yang Tersedia
				Buku teks muatan Pendidikan Anak dan Usia Dini Pendidikan Nonformal yang	Jumlah teks muatan lokal Pendidikan Anak dan Usia Dini dan Pendidikan	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak dan Usia Dini dan		Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak dan Usia Dini dan

				telah dinilai/ditelaah	Nonformal yang telah dinilai	Pendidikan Nonformal	Pendidikan Nonformal yang telah dinilai
				Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun
				Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian n

				Muatan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Muatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Muatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	index pemerataan guru	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	index pemerataan guru

					presentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	presentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
				Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	index refleksi guru SD/SMP	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	index refleksi guru SD/SMP

				Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset araan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagiSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset araan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusi an Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Ke setaraan
			Meningkat nya kualitas		presentase usulan izin satuandipendidikan	PROGRAM PENGENDALIAN	presentase usulan izin satuandipendidik

				dan distribusi institusi pendidikan		yang diterbitkan/di rbarui	PERIZINAN PENDIDIKAN	an yang diterbitkan/di perbarui
							Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Penilaian Kelayakan Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan		

						Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
						Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

				Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
			Terlestarikan bahasa dan sastra daerah		presentase pengembangan bahasa dan sastra	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	presentase pengembangan bahasa dan sastra
				Terlaksananya Pembinaan,	Jumlah dokumen	Pembinaan, Pengembangan	Jumlah dokumen

				Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Sastra Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Sastra Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan Perlindungan Bahasa Sastra Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Kamus Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusun	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun
				Bahasa Sastra Daerah	Jumlah Bahasa Sastra dan	Vitalitas, Konservasi dan	Jumlah Bahasa dan

				Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Revitalisasi Bahasa Sastra Kabupaten/Kota	Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi
				Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Publikasi Bahasa Sastra Kabupaten Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan

							Kabupaten/Kota
				Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan
				Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan	Jumlah Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi

				Kabupaten/Kota yang Tersedia dan terdistribusi	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Literasi Kabupaten / Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedia dan Terdistribusi
				Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
				Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan	Penyusunan Modul dan Bahan Bahasa Daerah	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah

				Kabupaten/Kota yang Tersusun	Kabupaten/Kota yang Tersusun	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun
				Kamus Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Tersusun	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun
	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah	Index Reformasi birokrasi general Perangkat daerah	Meningkatnya tata kelola internal Dinas Pendidikan		Nilai AKIP	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai AKIP
					Nilai BMD	Program Penunjang urusan	Nilai BMD

							pemerintahan daerah kabupaten/kota	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

				Dokumen SKPD	Dokumen DPA-SKPD		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

				Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun
				Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

								Pembangunan
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu
			Tersedianya Gaji Tunjangan dan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji		Jumlah Orang yang menerima Gaji

					dan Tunjangan ASN		dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Tersedianya Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan	Administrasi Barang Daerah pada	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan

				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Laporan Hasil	Jumlah Laporan Hasil	Koordinasi dan Penilaian	Jumlah Laporan Hasil	Jumlah Laporan Hasil

				Penilaian Milik dan Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penilaian Milik dan Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penilaian Milik dan Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Barang Daerah SKPD	Penilaian Milik dan Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Daerah SKPD	Jumlah Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Daerah SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Daerah SKPD

				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian

					Kepegawaian yang tepat waktu	Kepegawaian yang tepat waktu		yang tepat waktu
					Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
					Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan

								Administrasi Kepegawaian
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

					Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai Pensiun	Jumlah Pegawai yang Dipulangkan
					Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
					Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah yang dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan

				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Tersedianya Dokumen pemenuhan	Persentase Dokumen pemenuhan	Administrasi Umum	Persentase Dokumen pemenuhan

				Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Umum Kantor
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

							yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

				Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

					Tersedianya Alat Besar	Jumlah Alat yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat yang Disediakan
					Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan
					Tersedianya Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin

								Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Lainnya yang Disediakan	Unit Tetap yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Berwujud yang Disediakan	Unit Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Berwujud yang Disediakan
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Kantor Bangunan atau Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

				Tersusunnya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

				Sumber Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan	Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

				atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besarnya Dipelihara dan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besarnya yang Dipelihara

				Pemeliharaan dan PerizinanAlat Besar	dibayarkan Perizinannya	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	dan dibayarkan Perizinannya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin

				Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Tetap yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Tetap Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Berwujud	Jumlah Tak Berwujud yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

								Dipelihara/Di rehabilitasi
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi
								Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi
								Terlaksananya Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34.63	19 Unit	78.6 19.8 00	19 Unit	78.61 9.800	19 Unit	78.619. 800	1 9 Unit	78.61 9.800	19 Unit	78.61 9.800	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	93.24	1 Unit	150. 000. 000	1 Unit	150.0 00.00 0	1 Unit	150.00 0.000	1 Unit	150.0 00.00 0	1 Unit	150.0 00.00 0	

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU	
			1 Unit	60.5 06.2 05	1 Unit	122.8 67.40 5	1 Unit	122.86 7.405	1 Unit	122.8 67.40 5	1 Unit	122.8 67.40 5	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99.38	1 Unit	60.5 06.2 05	1 Unit	122.8 67.40 5	1 Unit	122.86 7.405	1 Unit	122.8 67.40 5	1 Unit	122.8 67.40 5	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		98.57	-	386 .38 3.6 88. 078	-	221.6 75.31 5.288	-	##### ##### ##	-	#### #### #### ##	-	231.6 75.31 5.288	S.1.1; S.1.2; S.1.4; S.2.3; SPM1.01; TPB4

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET		
			2026		2027		2028		2029			2030	
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU		TA RG ET	PAGU
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	SPM1.01; TPB4		
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		0 Ruang	-	0 Ruang	-	0 Ruang	-	0 Ruang	-	SPM1.01; TPB4		
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		0 Ruang	-	0 Ruang	-	0 Ruang	-	0 Ruang	-	SPM1.01; TPB4		
Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		2 Ruang	1.30 0.00 0.00 0	2 Ruang	1.300.0 000.0 00	2 Ruang	1.300.0 00.000	2 Ruang	1.300. 000.0 00	SPM1.01; TPB4		

[illegible]

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	96.59	0 Unit	1.54 3.46 2.40 0	0 Unit t	200.0 00.00 0	0 Unit t	200.00 0.000	0 Unit t	200.0 00.00 0	0 Unit t	200.0 00.00 0	SPM1.01; TPB4
Bimbingan Teknis, Pelatihan, Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100.00	0 Orang	200. 000. 000	0 Ora ng	200.0 00.00 0	0 Ora ng	200.00 0.000	0 O r a n g	200.0 00.00 0	0 Ora ng	200.0 00.00 0	SPM1.01; TPB4
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	99.80	0 Satua n Pendid ikan	55.4 98.8 34.1 00	0 Sat ua n Pen	49.91 7.600. 000.0 0	0 Sat ua n Pen	##### ##### ##### #	0 S a t u a	#### #### #### #	0 Sat ua n Pen	49.91 7.600. 000.0 0	SPM1.01; TPB4

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU	
			200 Satua n Pendid ikan	628. 590. 800	200 Sat ua n Pen didi kan	478.4 32.00 0	200 Sat ua n Pen didi kan	478.43 2.000	2 0 0 S a t u a n P e n d i d i k a n	478.4 32.00 0	200 Sat ua n Pen didi kan	478.4 32.00 0	
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	98.63											SPM1.01; TPB4
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	99.96	76 Satua n Pendid ikan	200. 000. 000	76 Sat ua n Pen didi kan	200.0 00.00 0	76 Sat ua n Pen didi kan	200.00 0.000	7 6 S a t u a	200.0 00.00 0	76 Sat ua n Pen didi kan	200.0 00.00 0	SPM1.01; TPB4

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	99.62	364 Satuan Pendidikan	18.4 14.4 58.4 00	364 Satuan Pendidikan	25.56 4.000. 000	364 Satuan Pendidikan	25.564. 000.00 0	3 6 4 6 4 3 6				

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET		
			2026		2027		2028		2029			2030	
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU		TA RG ET	PAGU
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
Terkelompoknya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	88.00	1 Orang	200.000.000	1 Orang	200.000.000	1 Orang	200.000.000	1 Orang	200.000.000	1 Orang	200.000.000	SPM1.01; TPB4
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik													
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		0 Buku	-	0 Buku	-	0 Buku	-	0 Buku	-	0 Buku	-	SPM1.01; TPB4
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	SPM1.01; TPB4

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET			
			2026		2027		2028		2029			2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU		TA RG ET	PAGU	
Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah														
Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat		0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	SPM1.01; TPB4
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	98.51	1 Ruang	500. 000. 000	1 Ru ang	500.0 00.00 0	1 Ru ang	500.0 00.00 0	1 Ru ang	500.0 00.00 0	1 Ru ang	500.0 00.00 0	SPM1.01; TPB4	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	99.47	0 Paket	2.38 9.64 2.99 2	0 Pak et	1.000. 000.0 00	0 Pak et	1.000.0 00.000	0 Pak et	1.000. 000.0 00	0 Pak et	1.000. 000.0 00	SPM1.01; TPB4	

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OINPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Meningkatnya proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	proporsi jumlah pendidikan terakreditasi PAUD min B												
Meningkatnya daya tampung PAUD	proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4												
	Angka Partisipasi Sekolah usia 5 - 6 tahun												
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	98.97	10 Unit	100. 000. 000	10 Unit	100.0 00.00 0	100.00 0.000	10 Unit	100.0 00.00 0	10 Unit	100.0 00.00 0	10 Unit	SPM1.01; TPB4
Pengadaan Mebel PAUD													
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	99.93	25 Paket	3.43 2.16	25 Paket	500.0 00.00 0	500.00 0.000	25 Paket	500.0 00.00 0	25 Paket	500.0 00.00 0	25 Paket	SPM1.01; TPB4

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET		
			2026		2027		2028		2029			2030	
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU		TA RG ET	PAGU
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	77.82	300 Orang	605.000.000	300 Orang	405.000.000	300 Orang	405.000.000	300 Orang	405.000.000	300 Orang	405.000.000	SPM1.01; TPB4
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	98.84	200 Satuan Pendidikan	750.000.000	200 Satuan Pendidikan	250.000.000	200 Satuan Pendidikan	250.000.000	200 Satuan Pendidikan	250.000.000	200 Satuan Pendidikan	250.000.000	SPM1.01; TPB4

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET		
			2026		2027		2028		2029			2030	
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU		TA RG ET	PAGU
									i d i k a n				
Pengelolaan Dana BOP PAUD													
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	99.05	200 Satua n Pendid ikan	200. 000; 000	200 Sat ua n Pen didi kan	200.0 00.00 0	200 Sat ua n Pen didi kan	200.0 00.00 0	2 0 0 S a t u a n P e n d i d i k	200.0 00.00 0	200 Sat ua n Pen didi kan	SPM1.01; TPB4	

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET		
			2026		2027		2028		2029			2030	
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU		TA RG ET	PAGU
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	99.18	4 Ruang	1.00 0.00 0.00 0	4 Ru ang	1.000. 000.0 00	4 Ru ang	1.000.0 00.000	4 Ru ang	1.000. 000.0 00	SPM1.01; TPB4		
Penyediaan infrastruktur TIK													
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia		0 Paket	-	0 Pak et	-	0 Pak et	-	0 P a k e t	-	SPM1.01; TPB4		
Penataan Ruang/Sudut Baca													
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata		0 Ruang	-	0 Ru ang	-	0 Ru ang	-	0 R u a n g	-	SPM1.01; TPB4		
Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		0 Ruang	-	0 Ru ang	-	0 Ru ang	-	0 R u a	-	SPM1.01; TPB4		

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET			
			2026		2027		2028		2029			2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	TA R G E T		TA R G E T	PAGU	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		0 Ruang	-	0 Ru ang	-	0 Ru ang	-	0 R u a n g	0 Ru ang	-	0 Ru ang	SPM1.01; TPB4	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		0 Kegiat an	-	0 Keg iata n	-	0 Keg iata n	-	0 K e g i a t a n	0 Keg iata n	-	0 Keg iata n	SPM1.01; TPB4	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		0 Ruang	-	0 Ru ang	-	0 Ru ang	-	0 R u a n g	0 Ru ang	-	0 Ru ang	SPM1.01; TPB4	

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU		
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	70.69	150 Satua n Pendid ikan	200. 000. 000	150 Sat ua n Pen didi kan	200.0 00.00 0	150 Sat ua n Pen didi kan	200.00 0.000	1 5 0 S a t u a n P e n d i d i k a n	200.0 00.00 0	150 Sat ua n Pen didi kan	200.0 00.00 0	SPM1.01; TPB4	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat													
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	300. 000. 000	6 Ru ang	300.0 00.00 0	6 Ru ang	300.00 0.000	6 Ru ang	300.0 00.00 0	6 Ru ang	300.0 00.00 0	6 Ru ang	300.0 00.00 0	SPM1.01; TPB4

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU		
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		95.42	46 %	27.6 11.2 88.2 48	46 %	17.57 6.430. 720	46 %	17.576. 430.72 0	4 6 %	##### ##### ##	4 6 %	17.57 6.430. 720	SPM1.01; TPB4	
Meningkatnya Angka Partisipasi ANak Usia Sekolah	Presentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi di jenjang Pendidikan Kesetaraan													
Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk usia 7-18 tahun di Kabupaten Bandung	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 tahun (APs)													
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		0 Pesert a Didik	-	0 Pes ert a Did ik	-	0 Pes ert a Did ik	0 Pes ert a Did ik	-	0 P e s e r t a D	0	0 Pes ert a Did ik	SPM1.01; TPB4	

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU	
											</		

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET		
			2026		2027		2028		2029			2030	
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU		TA RG ET	PAGU
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	SPM1.01; TPB4
Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi		0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	SPM1.01; TPB4
Penyediaan infrastruktur TIK													
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia		1 Paket	3.24 3.83 1.60 0	1 Paket	600.0 00.00 0	1 Paket	600.00 0.000	1 Paket	600.0 00.00 0	1 Paket	600.0 00.00 0	SPM1.01; TPB4

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET		
			2026		2027		2028		2029			2030	
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU		TA RG ET	PAGU
Penataan Ruang/Sudut Baca													
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata		0 Ruang	-	0 Ruang	-	0 Ruang	-	0 Ruang	-	0 Ruang	-	SPM1.01; TPB4
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik													
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		0 Peserta Didik	-	0 Peserta Didik	-	0 Peserta Didik	-	0 Peserta Didik	-	0 Peserta Didik	-	SPM1.01; TPB4
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	SPM1.01; TPB4

SPM1.01;
TPB4

SPM1.01;
TPB4

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET			
			2026		2027		2028		2029			2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU		TA RG ET	PAGU	
Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
Peserta Didik Menerima Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		0 Buku	-	0 Bu ku	-	0 Bu ku	-	0 B u k u	-	0 Bu ku	-	SPM1.01; TPB4	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		0 Ruang	-	0 Ru ang	-	0 Ru ang	-	0 R u a n g	-	0 Ru ang	-	SPM1.01; TPB4	
Pembangunan Ruang Kelas Baru														
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		1 Ruang	1.01 3.15 3.60 0	1 Ru ang	1.013. 153.6 00	1 Ru ang	1.013.1 53.600	1 R u a	1.013. 153. 600	1 Ru ang	1.013. 153.6 00	SPM1.01; TPB4	

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET		
			2026		2027		2028		2029			2030	
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU		TA RG ET	PAGU
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun		0 unit	356. 482. 134	0 uni t	-	0 uni t	-	0 u n i t	-	0 uni t	-	SPM1.01; TPB4
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan													
Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	98.16	1 Paket	-	1 Pak et	500.0 00.00 0	1 Pak et	500.00 0.000	1 P a k e t	500.0 00.00 0	1 Pak et	500.0 00.00 0	SPM1.01; TPB4
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	96.66	1 Ruang	303. 224. 537	1 Ru ang	300.0 00.00 0	1 Ru ang	300.00 0.000	1 R u a n g	300.0 00.00 0	1 Ru ang	300.0 00.00 0	SPM1.01; TPB4
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		93.65	42 POIN 43 POIN	1.1 50. 000	42 POI N 43	1.150. .000. 000	42 POI N 43	1.150. 000.00 0	42 P O	1.15 0.00 0	42 POI N 43	1.150 .000. 000	

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		2 Doku men	50.0 00.0 00	2 Do ku me n	50.00 0.000	2 Do ku me n	50.000. 000	2 Do ku me n	50.00 0.000	2 Do ku me n	50.00 0.000	
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	86.74	1500 Buku	300. 000. 000	150 0 Bu ku	300.0 00.00 0	150 0 Bu ku	300.00 0.000	1 5 0 0 B u k u	300.0 00.00 0 0	150 0 Bu ku	300.0 00.00 0	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	95.95	100 Orang	100. 000. 000	100 Ora ng	100.0 00.00 0	100 Ora ng	100.00 0.000	1 0 0 0 O r a n g	100.0 00.00 0 0	100 Ora ng	100.0 00.00 0	

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun		1 Doku men	150. 000. 000	1 Do ku me n	150.0 00.00 0	1 Do ku me n	150.00 0.000	1 Do ku me n	150.0 00.00 0	1 Do ku me n	150.0 00.00 0	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	index pemerataan guru	94.09	0,22 Indeks 0,43 indeks 0,43 poin 0,46 Indeks 0,47 indeks 0,48 indeks 0,94 indeks	750 .00 0.0 00	0,2 2 Ind eks 0,4 3 ind eks 0,4 3 poi n 0,4 6 Ind eks 0,4	750.0 00.00 0	0,2 2 Ind eks 0,4 3 ind eks 0,4 3 poi n 0,4 6 Ind eks 0,4	750.00 0.000	0 , 2 2 I n d e k s 0 , 4 3 i n d	750.0 00.00 0	0,2 2 Ind eks 0,4 3 ind eks 0,4 3 poi n 0,4 6 Ind eks 0,4	750.0 00.00 0	

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU		
			7 ind eks 0,4 8		7 ind eks 0,4 8		7 ind eks 0,4 8		7 ind eks 0,4 8		7 ind eks 0,4 8		7 ind eks 0,4 8	

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OUIPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	99.90	2 Doku men	50.0 00.0 00	2 Do ku me n	50.00 0.000	2 Do ku me n	50.000. 000	2 D o k u m e n	50.00 0.000	2 Do ku me n	50.00 0.000	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	90.32	4 Doku men	50.0 00.0 00	4 Do ku me n	50.00 0.000	4 Do ku me n	50.000. 000	4 D o k u m e n	50.00 0.000	4 Do ku me n	50.00 0.000	
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memiliki ijin operasional	72.63	125 lembag a	400. 362. 152	125 lem bag a	400.2 72.16 1	125 lem bag a	400.27 2.161	1 2 5 le m b	400.2 72.16 1	125 lem bag a	400.2 72.16 1	

URUSAN/BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN /OUTCOME /OIUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAG U	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TA RG ET	PAGU	
Media publik berbahasa daerah terfasilitasi	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi		1 Media	150. 000. 000	1 Me dia	150.0 00.00 0	1 Me dia	150.00 0.000	1 Me dia	150.0 00.00 0	1 Me dia	150.0 00.00 0	

Sumber:Analisa Dinas Pendidikan, tahun 2025

Ket:

S.1.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

SPM 1.01 = Indikator Standar Pelayanan Minimal: Urusan Pendidikan

TPB 1 = Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tanpa Kemiskinan

4.2 Program Dinas Pendidikan yang Mendukung Program prioritas pembangunan daerah

Program prioritas pembangunan daerah bidang pendidikan yang ada di RPJMD merupakan perumusan program prioritas pembangunan daerah yang didasarkan pada agenda pembangunan Kabupaten Bandung untuk memenuhi sasaran pembangunan selama 5 tahun. Adapun program prioritas bidang pendidikan yang mendukung misi ke 1 RPJMD yaitu Peningkatan kualitas SDM yang unggul, berakhlak, berdaya saing. program prioritas ini diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan perkembangan dunia usaha dan industri, serta penguatan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral dan integritas. Berikut program prioritas pembangunan daerah yang menunjang prioritas pembangunan daerah pada misi 1 dan sasaran 1.1

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	R1
			1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	R1
			1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	R1
			1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	R1

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	R1
			1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	R1
			1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	R1
			1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	R1
			1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	R1
			1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	R1
			1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	R1
			1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	R1
			1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	R1

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	R1
			1.01.02.2.03.0033 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	R1
			1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	PN4;R1
			1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	R1
			1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	R2
			1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	R2
			1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	R2
			1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	R2
			1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar dan	R3

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Ujian bagi Peserta Didik Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	R3
2	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	R7
			1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	R7
			1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	R7
			1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	R7
			1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal	R7

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	R7
			1.01.03.2.02.0004 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	R7
			1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	PN 4
			1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	PN 4
			1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	PN 4

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	PN4

Sumber: Analisa Dinas Pendidikan, tahun 2025

Ket:

PN 1 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita:

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi Manusia (HAM)

R 1 : Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Reformasi Layanan Pendidikan berstandar Nasional

4.3 Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025 - 2030

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan jangka menengah Disdik Kabupaten Bandung dalam periode 2025–2029. IKU Dinas Pendidikan terdiri dari dua indikator utama: (1) Rata Rata Lama Sekolah (RLS) , serta (2) Harapan Lama Sekolah (HLS) . Masing-masing indikator dilengkapi target tahunan yang menunjukkan tren perbaikan capaian layanan bidang pendidikan. Penetapan target ini penting untuk memastikan arah pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Secara lebih rinci, target untuk IKU Dinas Pendidikan Tahun 2025 – 2029 dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Rata Rata Lama Sekolah (RLS)	poin	9,23	9,41	9,52	9,63	9,74	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia tertentu (biasanya 15 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas) dalam menjalani atau menyelesaikan pendidikan formal yang pernah dijalani
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	poin	12,76	12,83	12,89	12,96	13,02	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. perhitungan HLS diasumsikan dengan peluang anak untuk tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah pada umur yang sama

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	
								saat ini. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas

Sumber: Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci)

Subbab ini memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai instrumen pemantauan atas capaian outcome dan output dari berbagai kegiatan strategis Dinas Pendidikan. Terdapat 1 IKK yang mencerminkan aspek pelayanan pendidikan, yaitu Indeks SPM Pendidikan. Indeks SPM (Standar Pelayanan Minimal) pendidikan menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 adalah ukuran pencapaian standar mutu dan penerima pelayanan dasar pendidikan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rata Rata Lama Sekolah (RLS)	poin	9,23	9,41	9,52	9,63	9,74	9,85	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia tertentu (biasanya 15 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas) dalam menjalani atau menyelesaikan

No.	Indikator	Satua n	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									pendidikan formal yang pernah dijalani
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	poin	12,76	12,83	12,89	12,96	13,02	13,09	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. perhitungan HLS diasumsikan dengan peluang anak untuk tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah pada umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas

Sumber: Badan Pusat Statistik

4.5 Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang Undang no 23 Tahun 2014 , yang mendefinisikan SPM sebagai batasan mengenai jenis dan kualitas pelayanan dasar yang wajib disediakan pemerintah dan menjadi hak minimum setiap warga negara. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya urusan pendidikan sebagaimana diatur dalam permendagri 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM. Dalam bidang pendidikan, SPM mengatur layanan pendidikan dasar yang wajib disediakan dengan mutu dan kuantitas tertentu agar setiap warga negara dapat mengakses pendidikan secara layak dan merata. SPM yang diatur oleh Permendagri 59/2021 berfokus pada:

- Pemerataan akses pendidikan bagi semua anak usia sekolah
- Peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam bidang literasi dan numerasi
- Kualitas pembelajaran
- Kualitas lingkungan sekolah
- Partisipasi dan kualitas tenaga pendidik profesional

Secara umum, pencapaian SPM Pendidikan meliputi dua komponen utama:

1. Capaian Mutu Pelayanan Dasar, yaitu rata-rata pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai standar teknis yang berlaku.
2. Capaian Penerima Pelayanan Dasar, yaitu pencapaian terhadap target jumlah warga yang menerima layanan pendidikan sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.

Capaian Mutu Pelayanan dasar merupakan indikator prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal

pendidikan. ada 15 indikator yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM yaitu :

1. Skor kemampuan literasi SD
2. Skor kemampuan literasi SMP
3. Skor kemampuan numerasi SD
4. Skor kemampuan numerasi SMP
5. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 5-6 tahun di jenjang PAUD
6. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7 - 12 tahun di jenjang dikdas
7. Angka partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun di jenjang kesetaraan
8. Proporsi jumlah satuan pendidikan PAUD terakreditasi minimal B
9. Proporsi guru PAUD berkualifikasi minimal S1/DIV
10. Iklim Inklusivitas SD
11. Iklim Inklusivitas SMP
12. Iklim Keamanan SD
13. Iklim keamanan SMP
14. Iklim kebhinekaan SD
15. Iklim kebhinekaan SMP

Target mutu layanan dasar SPM Pendidikan tahun 2026 - 2030 dijelaskan dalam surat mendikdasmen nomor 1411/MDM.A/PR.07.05/2025 perihal indikator kinerja urusan pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6. Target capaian mutu SPM Pendidikan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Skor Kemampuan Literasi SD	persentase	66.13	68.63	71.13	73.63	76.13	78.63	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
2	Skor Kemampuan Literasi SMP	persentase	74.07	72.22	73.32	74.42	75.52	77.72	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
3	Skor Kemampuan Numerasi SD	persentase	59.67	62.57	65.47	68.37	71.27	74.17	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	persentase	64.24	65.74	67.24	68.74	70.24	71.74	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 5 – 6 Tahun	persentase	98.88	99.28	99.68	100	100	100	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 – 15 Tahun	persentase	64.45	67.49	70.53	73.57	76.61	79.65	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 – 18 Tahun Kesetaraan	persentase	18.74	22.84	26.94	31.04	35.14	39.24	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	persentase	68.31	68.73	69.14	69.55	69.96	70.37	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	persentase	79.49	79.99	80.49	80.99	81.49	81.99	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
10	Iklim Inklusivitas SD	index	63.79	66.29	68.79	71.29	73.79	76.29	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
11	Iklim Inklusivitas SMP	index	59.41	61.81	64.21	66.61	69.01	71.41	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
12	Iklim Keamanan SD	index	77.95	78.85	79.75	80.65	81.55	82.45	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
13	Iklim Keamanan SMP	index	71.93	73.43	74.93	76.43	77.93	79.43	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
14	Iklim Kebinekaan SD	index	73.96	74.96	74.96	75.96	77.96	78.96	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen
15	Iklim Kebinekaan SMP	index	69.79	70.79	71.79	72.79	73.79	74.79	rapor pendidikan pemda, kemendikdasmen

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

Sedangkan cakupan penerima pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan secara formal meliputi beberapa kelompok peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan yang diatur, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditujukan kepada peserta didik yang berusia 5 sampai 6 tahun.
2. Pendidikan dasar mencakup peserta didik usia 7 - 15 tahun yang meliputi jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
3. Pendidikan kesetaraan, yang diperuntukan bagi peserta didik usia 7 sampai 18 tahun mencakup mereka yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Untuk menghitung target cakupan penerima pelayanan dasar, kita harus mengetahui proyeksi pertumbuhan penduduk kelompok usia sekolah di Kabupaten Bandung. Berikut perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk berdasarkan analisa Dinas Pendidikan :

Tabel 4.7. Proyeksi pertumbuhan penduduk kelompok umur usia sekolah

KELOMPOK UMUR	2025 (BASELINE)	PERIODE RENSTRA				
		2026	2027	2028	2029	2030
0	40.121	39.910	39.699	39.488	39.277	39.064
1	55.555	55.262	54.969	54.676	54.383	54.091
2	61.608	61.283	60.959	60.634	60.309	59.985
3	66.592	66.241	66.241	66.241	66.241	64.837
4	67.354	66.999	66.644	66.289	65.934	65.579
5	58.043	57.737	57.431	57.125	56.819	56.513
6	57.148	56.847	56.545	56.244	55.943	55.642
7	57.676	57.372	57.068	56.764	56.460	56.156
8	58.335	58.027	57.720	57.412	57.105	56.797
9	60.030	59.713	59.397	59.080	58.764	58.448
10	58.077	57.771	57.465	57.159	56.853	56.547
11	58.576	58.267	57.958	57.650	57.341	57.032
12	58.657	58.348	58.039	57.730	57.421	57.112
13	59.319	59.006	58.694	58.381	58.068	57.756
14	56.601	56.303	56.005	55.706	55.408	55.110
15	71.797	71.419	71.041	70.662	70.284	69.905
16	87.120	85.197	83.275	81.353	79.430	77.508

17	78.408	76.678	74.948	73.217	71.847	69.757
18	95.831	93.717	91.602	89.488	87.373	85.259

Sumber : Analisis data Dinas Pendidikan berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk disdukcapil

Dari proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah tersebut, ditetapkan target penerima layanan dasar SPM Pendidikan selama 5 tahun (periode renstra) untuk masing masing indikator layanan pendidikan sesuai kewenangan kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 4.8. Tabel target penerima layanan dasar pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target Penerima Layanan Dasar									
				2025		2026		2027		2028		2029	
				Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas	Jumlah Warga Negara yang berhak menerima layanan dasar	Target Jumlah Warga Negara yang menjadi prioritas
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didik yang berusia 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Orang/Warga Negara	134,476	104,224	134,563	77,332	113,976	80,367	113,369	83,606	112,762	86,367
2	Pendidikan Dasar	Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun - SD/	Orang/Warga Negara	617,245	680,192	636,228	632,367	633,586	631,694	630,645	630,245	627,704	627,704
		Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun - SMP/											
3	Pendidikan Menengah	Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun yang berhak melanjutkan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kejuruan	Orang/Warga Negara	38,673	25,065	391,819	74,337	383,211	68,785	378,503	64,138	365,495	61,094

Sumber : Analisa Dinas Pendidikan tahun 2025

4.6 Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2025-2029

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya pada tujuan ke-4 yaitu "Pendidikan Berkualitas" bertujuan untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Pendidikan berkualitas dianggap sangat penting karena dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dan memacu pencapaian tujuan-tujuan SDGs lainnya.

Pendidikan berkualitas tidak hanya tentang akses, tapi juga mengenai mutu pembelajaran yang dapat membuka potensi diri, membekali pikiran, dan mempersiapkan generasi yang cerdas serta

berkarakter. Tujuan ini menekankan pengembangan pendidikan yang inklusif, kesetaraan gender dalam pendidikan, dan pendidikan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan juga diharapkan dapat melahirkan generasi muda sebagai agen perubahan dan inovasi yang dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Beberapa hal utama dari tujuan pendidikan berkualitas SDGs adalah:

- Menjamin akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
- Meningkatkan kualitas pembelajaran yang tidak hanya kognitif tetapi juga spiritual dan budaya.
- Menyediakan kesempatan belajar sepanjang hayat.
- Mendorong sistem pendidikan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman.
- Mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global.

Pendidikan berkualitas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global agar dapat menciptakan generasi yang siap berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa.

Indikator yang harus dipenuhi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4 tentang Pendidikan Berkualitas mencakup beberapa target spesifik yang terdiri dari:

- Target 4.1
Memastikan semua anak, laki-laki dan perempuan, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, setara, dan berkualitas dengan hasil pembelajaran yang relevan dan efektif.
- Target 4.2
Memastikan semua anak usia dini memiliki akses pada pendidikan, pengasuhan, dan pengembangan yang berkualitas sehingga siap masuk pendidikan dasar.

- Target 4.3
Memastikan akses setara bagi semua perempuan dan laki-laki ke pendidikan tinggi, teknik, kejuruan yang terjangkau dan berkualitas.
- Target 4.4
Meningkatkan secara substansial jumlah anak muda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan vokasi yang mendukung pekerjaan layak dan kewirausahaan.
- Target 4.5
Menghapus kesenjangan gender dan memastikan akses pendidikan yang setara bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak dalam situasi rentan.
- Target 4.6
Memastikan semua pemuda dan sebagian besar orang dewasa memiliki kemampuan baca, tulis, dan berhitung.
- Target 4.A
Membangun dan memperbarui fasilitas pendidikan yang ramah terhadap anak, disabilitas, dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, tanpa kekerasan, dan efektif bagi semua.
- Target 4.B
Memperluas jumlah beasiswa yang tersedia secara global bagi negara berkembang untuk pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan.
- Target 4.C
Meningkatkan secara substansial jumlah guru berkualitas, termasuk melalui pelatihan dan kerjasama internasional, terutama di negara berkembang.

Indikator-indikator ini menjadi penanda pencapaian selama implementasi SDG 4, yang juga mencakup peningkatan partisipasi, kualitas guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta pengembangan keterampilan relevan dan inklusi sosial dalam pendidikan.

Tabel 4.9. Indikator TPB/SDGs

No.	Tujuan/ Goals	Kode Indikator	Indikator	Satuan	Target Tahun							Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	78,58	82,51	86,61	90,91	95,34	96,42		
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	59,42	62,4	65,5	68,74	72,12	73,1		
		4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD	Persen	32,51	29,47	26,43	23,39	20,35	20		
			Angka anak tidak sekolah SD/ sederajat	persen	0,78	0,49	0,21	0,19	0,14	0,10		
			Angka anak tidak sekolah SMP/ sederajat	persen	2,98	2,86	2,73	2,34	1,96	1,50		
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Persen	102,74	103,94	105,14	106,34	107,54	108,74		
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	100,21	101,18	102,15	103,12	104,09	105,06		

No.	Tujuan/ Goals	Kode Indikator	Indikator	Satuan	Target Tahun							Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	49.01	51.25	53.49	55.73	57.97	60.21		
		4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	Persen	95.29	95.65	96.01	96.37	96.73	97.09		
			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SMP/MTs/ sederajat;	Persen	78.49	78.82	79.15	79.48	79.81	80.14		
		4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	99,91	100	100	100	100	100		
		4.c.1*	persentase guru TK	Persen	55	56	57	60	61	61.34		

No.	Tujuan/ Goals	Kode Indikator	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase guru SD	Persen	27.34	28.45	29.34	31.24	32	32.67	
			Persentase guru SMP	Persen	39.21	40.34	41.26	42.45	43	43.56	

Sumber: RAD TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, 2025

4.7 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Sub-tema 1 Ketahanan pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan kemandirian ekonomi. Kabupaten Bandung yang memiliki sumber daya alam melimpah serta keragaman komoditas pangan, memegang peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat regional maupun nasional. Dinas Pendidikan dapat berperan aktif dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan dengan menyusun dan melaksanakan program pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya menjaga ketahanan pangan sebagai bagian dari keberlanjutan hidup dan pembangunan nasional. Permasalahan yang Dihadapi Kurangnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya ketahanan pangan Banyak siswa belum memahami peran mereka dalam menjaga ketersediaan dan keberlanjutan pangan. Minimnya integrasi ketahanan pangan dalam pembelajaran sekolah Topik ketahanan pangan belum menjadi tema yang konsisten dalam kurikulum. Terbatasnya sarana/prasarana pembelajaran kontekstual di sekolah Sekolah belum banyak menyediakan media pembelajaran seperti kebun sekolah, alat pertanian sederhana, atau laboratorium pangan. Rendahnya keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam pendidikan ketahanan pangan Program sekolah kurang melibatkan keluarga dan komunitas sekitar dalam pembiasaan hidup hemat dan sadar pangan. Tujuan yang Akan Dicapai. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya ketahanan pangan. Menanamkan nilai-nilai cinta lingkungan, tanggung jawab, dan kemandirian melalui praktik langsung. Mengintegrasikan pendidikan ketahanan pangan dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler di sekolah. Mendorong kolaborasi antara sekolah, dinas pendidikan, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal. CSF (Critical Success Factors), Dukungan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah, Ketersediaan sarana pendukung di sekolah, Kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual, Keterlibatan aktif siswa dan komunitas sekolah, Monitoring dan

evaluasi program secara berkala. Kondisi yang Diperlukan Adanya program resmi dari Dinas Pendidikan yang mendorong pendidikan ketahanan pangan. Guru yang terlatih dan memahami konsep ketahanan pangan. Sarana dan Prasarana Ketersediaan lahan/lokasi di sekolah untuk kebun. Dana BOS atau bantuan khusus untuk pengembangan ketahanan pangan di sekolah.

Sub-tema 2 Kawasan Ekonomi Terpadu Pengembangan perekonomian Kabupaten Bandung dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati Bandung tahun 2025-2029 diwujudkan melalui pendekatan klaster ekonomi. Beberapa permasalahan utama yang menghambat kontribusi optimal Dinas Pendidikan terhadap pengembangan kawasan ekonomi terpadu antara lain: Rendahnya literasi ekonomi masyarakat di sekitar kawasan ekonomi terpadu, yang menyebabkan mereka tidak mampu memanfaatkan peluang ekonomi secara maksimal. Minimnya integrasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan kawasan ekonomi, baik dalam hal kurikulum maupun kompetensi lulusan. Dinas Pendidikan perlu menetapkan beberapa tujuan utama agar keterlibatannya dalam pengembangan KET dapat terukur dan berdaya guna: Meningkatkan kapasitas SDM lokal melalui pendidikan ekonomi wilayah yang relevan dengan kebutuhan kawasan ekonomi. Mendorong keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku aktif dalam kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan pelatihan keterampilan yang mendukung produktivitas ekonomi lokal. CSF (Critical Success Factors) Faktor-faktor kunci keberhasilan yang menentukan efektivitas peran Dinas Pendidikan: Kurikulum adaptif dan kontekstual, sesuai dengan potensi dan kebutuhan kawasan ekonomi terpadu. Sinergi antar pemangku kepentingan: Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, pengelola KET, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan tinggi. Peningkatan kapasitas guru dan tenaga pelatih, agar mampu mengajar materi ekonomi wilayah secara aplikatif. Monitoring dan evaluasi program yang konsisten dan berbasis data. Agar keterlibatan Dinas Pendidikan dapat berjalan optimal, perlu disiapkan kondisi sebagai berikut: Regulasi daerah yang mendukung integrasi pendidikan dan pengembangan kawasan ekonomi. Anggaran

khusus untuk program pendidikan dan pelatihan masyarakat sekitar KET. SDM pendidik dan instruktur yang kompeten dan terlatih. Sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Sub-tema 4 SDM BEDAS merupakan bagian integral dari pendekatan perencanaan tematikspasial yang menjadi landasan utama dalam RPJMD Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu domain implementatif, sub-tema ini memfokuskan intervensi pembangunan pada isuisu strategis di bidang sosial, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. terkait sub tema SDM bedas, dukungan Dinas pendidikan fokus pada simpul peran SDM sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah dengan inklusifitas pembelajaran melalui jalur pendidikan non formal.

Pendidikan non-formal berperan strategis dalam memperluas akses pembelajaran yang inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum atau tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek No. 17 Tahun 2021 dan target SDG 4 yang menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal menjangkau kelompok marginal seperti anak putus sekolah, penyandang disabilitas, pekerja informal, dan perempuan kepala keluarga, dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal melalui program kesetaraan, pelatihan keterampilan, digitalisasi pembelajaran, serta kemitraan dunia kerja. Di Kabupaten Bandung, kebijakan ini diterjemahkan melalui penguatan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) sebagai simpul pendidikan non-formal, alokasi anggaran afirmatif bagi warga rentan, serta integrasi program dengan dunia usaha dan sektor swasta. Pemanfaatan data sosial-ekonomi nasional juga menjadi dasar untuk menyusun program yang lebih terarah dan tepat sasaran. Dukungan lintas OPD dan komunitas desa turut didorong agar pendidikan non-formal menjadi gerakan kolektif yang memperkuat kapasitas masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan, pendidikan non-formal perlu diarusutamakan dalam dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai

bagian penting dari pengembangan SDM. Pendekatan wilayah dan kelompok sasaran prioritas, penguatan kelembagaan, penggunaan teknologi informasi, serta pembiayaan berbasis kinerja menjadi kunci dalam membangun sistem pembelajaran yang responsif, adil, dan berkelanjutan.

Sub-tema 5 Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas Dunia saat ini dihadapkan pada tiga krisis global (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia yaitu perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini tentunya akan menjadi hambatan dalam mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan karena lingkungan hidup berkualitas merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Selaras dengan Visi dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, maka Kabupaten Bandung juga berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Hal tersebut tercermin dari Visi RPJPD Kabupaten Bandung 2025 – 2045 yaitu Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan dan Visi RPJMD Kabupaten Bandung 2025 – 2029 yaitu Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan. Permasalahan yang Dihadapi Kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan pelajar dan masyarakat, terutama dalam hal membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah. Minimnya integrasi materi lingkungan hidup dalam kurikulum formal di sekolah. Kurangnya praktik langsung (*experiential learning*) yang melibatkan siswa dalam pengelolaan lingkungan secara nyata. Belum optimalnya kerja sama antara sekolah dengan instansi lingkungan dan komunitas peduli lingkungan. Tujuan yang Akan Dicapai Menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam pengelolaan sampah, termasuk daur ulang. Mendorong perilaku hidup bersih dan ramah lingkungan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Menciptakan sekolah sebagai model (contoh) kawasan hijau dan bersih, yang menjadi percontohan bagi komunitas sekitarnya. Mendorong partisipasi aktif warga sekolah dalam gerakan pengurangan sampah dan daur ulang. Critical Success Factors (CSF), Integrasi materi

lingkungan dalam kurikulum pendidikan, baik di jenjang dasar maupun menengah. Fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah, komposter, dan bank sampah sekolah. Partisipasi aktif guru, siswa, dan orang tua dalam kegiatan kebersihan dan pengelolaan sampah. Adanya insentif atau penghargaan bagi sekolah yang berhasil mengelola lingkungan dengan baik. Kondisi yang Diperlukan Kebijakan daerah atau peraturan sekolah yang mendukung program lingkungan hidup. Pelatihan dan peningkatan kapasitas guru dalam menyampaikan materi lingkungan secara kreatif. Penyediaan sarana pengelolaan sampah terpilah di setiap sekolah. Materi pembelajaran tematik tentang sampah dan daur ulang yang mudah dipahami dan aplikatif. Kampanye dan kegiatan rutin seperti Hari Bersih Sekolah, Bank Sampah Sekolah, dan Eco School Award. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi program. Program yang Berkaitan Edukasi Lingkungan melalui Kurikulum Integrasi materi pengelolaan sampah dalam mata pelajaran IPA, PPKn, dan Prakarya. Projek berbasis lingkungan (Project-Based Learning) seperti membuat kompos, kerajinan daur ulang, dll. Gerakan Sekolah Peduli Lingkungan (Adiwiyata) Program nasional yang bisa dioptimalkan untuk mendorong pengelolaan lingkungan di sekolah. Pelatihan dan Workshop Pelatihan bagi guru dan siswa tentang pemilahan sampah, daur ulang, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Bank Sampah Sekolah Pengumpulan dan pengelolaan sampah anorganik untuk dijual atau didaur ulang, dengan sistem tabungan.

- Tematik penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari komitmen nasional dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan pertama: menghapus segala bentuk kemiskinan di mana pun. Hal ini ditegaskan melalui Perpres No. 59 Tahun 2017 dan ditindaklanjuti dengan Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang

Optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Arahkan tersebut mendorong keterpaduan program antar pemangku kepentingan, ketepatan sasaran, serta pelibatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, daerah juga mengacu

pada Permendagri No. 53 Tahun 2020 terkait penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Pada Tahap I RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2045, periode tahun 2025–2029 difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, termasuk melalui arah kebijakan penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial bagi kelompok marginal dan rentan, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal layak, serta pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan. Untuk mengoperasionalkan kebijakan ini, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) secara konsisten menyusun

Rencana Aksi Tahunan (RAT) melalui koordinasi lintas sektor, guna memastikan integrasi program antar perangkat daerah dan mitra non-pemerintah. Intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung mengacu pada empat strategi utama: peningkatan pendapatan, penurunan beban pengeluaran, pengurangan kantong kemiskinan, dan perbaikan tata kelola. Dukungan kebijakan nasional juga memperkuat pelaksanaan program daerah, seperti Inpres No. 8 Tahun 2025 yang mendorong pengembangan program Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Selain itu, penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagaimana diamanatkan Inpres No. 4 Tahun 2025 menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program agar tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

Rencana aksi terkait penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan diantaranya melalui program pembelajaran pendidikan keagamaan melalui insentif guru mengaji, Bantuan biaya operasional bagi satuan pendidikan baik di jenjang PAUD, SD, SMP maupun Pendidikan Non formal. selain itu rencana aksi juga berkaitan dengan penyediaan biaya personil bagi peserta didik miskin di jenjang SMP. Untuk menanggulangi kemiskinan secara tematik di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen memastikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh warga, terutama bagi keluarga miskin dan rentan miskin. Program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan ini difokuskan pada peningkatan akses, partisipasi, dan keberlanjutan pendidikan

- Inklusi Pembelajaran – Jalur Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal berperan strategis dalam memperluas akses pembelajaran yang inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum atau tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek No. 17 Tahun 2021 dan target SDG 4 yang menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal menjangkau kelompok marginal seperti anak putus sekolah, penyandang disabilitas, pekerja informal, dan perempuan kepala keluarga, dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal melalui program kesetaraan, pelatihan keterampilan, digitalisasi pembelajaran, serta kemitraan dunia kerja. Di Kabupaten Bandung, kebijakan ini diterjemahkan melalui penguatan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) sebagai simpul pendidikan non-formal, alokasi anggaran afirmatif bagi warga rentan, serta integrasi program dengan dunia usaha dan sektor swasta. Pemanfaatan data sosial-ekonomi nasional juga menjadi dasar untuk menyusun program yang lebih terarah dan tepat sasaran. Dukungan lintas OPD dan komunitas desa turut didorong agar pendidikan non-formal menjadi gerakan kolektif yang memperkuat kapasitas masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan, pendidikan non-formal perlu diarusutamakan dalam dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting dari pengembangan SDM. Pendekatan wilayah dan kelompok sasaran prioritas, penguatan kelembagaan, penggunaan teknologi informasi, serta pembiayaan berbasis kinerja menjadi kunci dalam membangun sistem pembelajaran yang responsif, adil, dan berkelanjutan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra DISDIK Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 disusun sebagai respons atas beragam tantangan dan isu strategis yang kompleks dalam penyelenggaraan urusan pendidikan Terdapat 4 isu strategis utama yang mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat tata kelola, mempercepat pelayanan dasar, dan mendorong inovasi, antara lain: pemerataan akses pendidikan (daya tampung), Capaian mutu pembelajaran, Tata kelola pendidik dan tenaga pendidikan serta Ketimpangan distribusi guru antar wilayah serta keterbatasan pemenuhan kualifikasi dan kompetensi.

Untuk menjawab isu-isu tersebut, Renstra ini menetapkan tujuan utama yaitu “Meningkatnya akses mutu pendidikan dan kompetensi dasar masyarakat” Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis: 1). Meningkatkan capaian minimum layanan dasar pendidikan. 2). Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. 3). Meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan

Renstra ini menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk merumuskan strategi utama, yaitu : 1). wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan pra sekolah dan 12 tahun wajib dikedasmen) sesuai kewenangan Dinas Pendidikan, 2). Memperkuat pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas. 3). Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dan 4). mendorong revitalisasi dan optimalisasi pendidikan non formal.

Implementasi dari strategi tersebut dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun (2026–2030), diawali dengan pemetaan kondisi wajib belajar 13 tahun, kurikulum, sarana prasarana, PKBM, serta kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Tahap berikutnya difokuskan pada penguatan dan peningkatan berkelanjutan wajib belajar 13 tahun berbasis talenta, karakter, literasi digital, kearifan lokal, serta pendidikan keagamaan dan akhlak melalui kolaborasi

multipihak dan lintas sektor, peningkatan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar kualitas dan aman bencana, penguatan kualitas dan akses PKBM yang inklusif, pengembangan pembelajaran berbasis pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, khususnya di daerah terluar dan perbatasan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan strategi, Renstra ini menetapkan dua program prioritas yang dijabarkan ke dalam sejumlah subkegiatan kunci, antara lain program pengelolaan pendidikan dan program pengembangan kurikulum muatan lokal . Program-program ini dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi berkelanjutan bagi pengembangan layanan pendidikan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini diukur melalui dua indikator kinerja utama: Rata Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dengan perencanaan yang menyeluruh dan berbasis data, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Renstra Disdik 2025–2029 diharapkan dapat menjadi instrumen transformasi tata kelola pendidikan di Kabupaten Bandung yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra DISDIK Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung. Renstra ini memiliki peranan penting sebagai dasar dalam mengoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinergikan berbagai program lintas sektor yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan berbagai tantangan yang ada dapat diatasi secara terarah dan berkesinambungan untuk memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

Pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh aparaturnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, serta kolaborasi yang erat dengan para pemangku kepentingan lainnya. Komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk merespons berbagai dinamika perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan inovasi, Renstra ini dirancang untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya yang optimal, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan.

Penting untuk dipahami bahwa keberhasilan implementasi Renstra ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh komitmen semua pihak dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sinergi yang solid antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih bangkit, edukatif, Dinamis, Agamis Sejahtera (BEDAS) maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Dengan semangat kebersamaan, mari kita jadikan Renstra ini sebagai langkah nyata untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

Sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Renstra yang terarah, diperlukan penerapan kaidah-kaidah pelaksanaan yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan berkelanjutan. Transparansi diharapkan dapat menjamin bahwa setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Partisipasi memberikan ruang bagi semua pemangku

kepentingan untuk berkontribusi secara aktif, sementara keberlanjutan menjamin bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah tersebut, diharapkan pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan secara optimal, efisien, dan berdaya guna. Keberhasilan ini tentunya memerlukan komitmen kuat dari seluruh pihak terkait untuk bekerja secara konsisten dan kolaboratif, demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung serta tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program dan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk memantau efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Pengendalian Renstra dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK), termasuk target tahunan, pelaksanaan program prioritas, serta efektivitas penggunaan sumber daya. Pengendalian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, peluang perbaikan, serta memastikan responsivitas pelaksanaan terhadap dinamika yang terjadi di lapangan. Proses ini akan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh unit perencanaan, sesuai siklus manajemen kinerja berbasis hasil (*result-based management*).

Evaluasi terhadap Renstra dilakukan setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk evaluasi kinerja tahunan, serta secara menyeluruh pada pertengahan periode dan akhir periode Renstra. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran

strategis, dampak pelaksanaan strategi, serta keberlanjutan intervensi yang telah dilakukan. Evaluasi ini mendasarkan pada data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan serta pencapaian indikator kinerja, yang kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan berikutnya serta penyesuaian kebijakan apabila diperlukan.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, seiring dengan berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, proses pengendalian dan evaluasi juga harus memperhatikan prinsip integrasi lintas sektor, transformasi digital pengelolaan kinerja, serta penguatan evidence-based policy. Inmendagri ini menekankan pentingnya penguatan sistem monitoring berbasis indikator utama pembangunan (IUP), pemanfaatan data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), serta keterlibatan aktif Bappeda dan Inspektorat Daerah dalam menjamin kualitas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi kinerja Renstra akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP), yang menjadi dokumen akuntabilitas tahunan serta dasar penilaian Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi juga menjadi bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah provinsi serta Kementerian Dalam Negeri.

Dengan pengendalian dan evaluasi yang terstruktur, berbasis data, dan partisipatif, diharapkan pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan, sehingga

seluruh sasaran pembangunan bidang pendidikan dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Soreang, 19 September 2025

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Ttd

ASEP KUSUMAH


BUPATI BANDUNG,
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	- 10 -
1.1 Latar Belakang.....	- 10 -
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	- 13 -
1.3 Maksud dan Tujuan.....	- 15 -
1.3.1 Maksud	- 15 -
1.3.2 Tujuan.....	- 15 -
1.4 Sistematika Penulisan.....	- 16 -
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN	- 17 -
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan.....	- 17 -
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pendidikan.....	- 17 -
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan.....	- 26 -
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pendidikan	- 40 -
2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pendidikan.....	- 164 -
2.1.5 Mitra Dinas Pendidikan dalam pemberian pelayanan.....	- 167 -
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan...	- 168 -
2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029	- 168 -
2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.....	- 169 -
2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029	- 171 -
2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung.....	- 172 -
2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas Pendidikan.....	- 174 -
2.2.6 Permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan	- 174 -
2.2.7 Isu Strategis	- 180 -
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	- 186 -
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.....	- 186 -
3.1.1 Tujuan.....	- 186 -
3.1.2 Sasaran	- 187 -

3.2	Strategi Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 ...	199 -
3.3	Lokus Renstra Dinas Pendidikan.....	212 -
3.4	Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029. -	219 -
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN.....		
4.1	Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	223 -
4.2	Program Dinas Pendidikan yang Mendukung Program prioritas pembangunan daerah	464
4.3	Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Pendidikan tahun 2025 - 2030	469
4.4	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK (Indikator Kinerja Kunci)	471
4.5	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	473
4.6	Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2025-2029	479
4.7	Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029	486
BAB V PENUTUP.....		493
5.1	Kesimpulan.....	493
5.2	Kaidah Pelaksanaan.....	494
5.3	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	496
DAFTAR ISI.....		499
DAFTAR GAMBAR.....		501

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.....	- 21 -
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan status kepegawaian.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Struktural berdasarkan gender .	- 30 -
Gambar 2.4 Jumlah Pegawai JFT berdasarkan gender	- 32 -
Gambar 2.5 Staff/Pelaksana berdasarkan Gender	- 34 -
Gambar 2.6 Staff/Pelaksana berdasarkan Status Kepegawaian	- 35 -
Gambar 2.7 Guru berdasarkan Gender	- 38 -
Gambar 2.8 Guru berdasarkan Status Kepegawaian	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.9 Data Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)	- 53 -
Gambar 2.10 Data Perkembangan angka Partisipasi Murni (APM)	- 54 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekap Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan	- 28 -
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Struktural Dinas Pendidikan..	- 30 -
Tabel 2.3 Jumlah Pengawas dan Penilik Dinas Pendidikan-	32
-	
Tabel 2.4 Jumlah Staff Dinas Pendidikan	- 33 -
Tabel 2.5 Jumlah Guru	- 37 -
Tabel 2.6 Proyeksi Perubahan Jumlah Penduduk Kelompok Umur Usia Sekolah	- 41 -
Tabel 2.7 Data Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMP status Negeri di Kabupaten Bandung	- 42 -
Tabel 2.8 Data Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD di Kabupaten Bandung.....	- 45 -
Tabel 2.9 Penyajian Gap (Kebutuhan) Ruang Kelas jenjang Sekolah Dasar.....	- 46 -
Tabel 2.10 Penyajian Gap (Kebutuhan) Ruang Kelas jenjang Sekolah Menengah Pertama	- 47 -
Tabel 2.11 Perkembangan APK dan APM menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019/2020 – 2023/2024.....	- 53 -
Tabel 2.12 Rasio Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023/2024.....	- 56 -
Tabel 2.13 Capaian Indikator Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2023/2024.....	- 60 -
Tabel 2.14 Capaian HLS dan RLS Di kabupaten Bandung Tahun 2020-2024	- 62 -
Tabel 2.15 Tabel penyajian hasil evaluasi capaian SPM Tahun 2021-2024	- 63 -
Tabel 2.16 Capaian SPM Pendidikan, Nilai AKIP dan Nilai BMD Tahun 2020-2024	- 74 -
Tabel 2.17 Realisasi Capaian Indikator Prioritas.....	- 74 -
Tabel 2.18 Hasil evaluasi capaian TPB/SDGs Tahun 2022-2024	- 79 -
Tabel 2.19 Evaluasi capaian dan kinerja Dinas Pendidikan pada Renstra Tahun 2021-2026	- 90 -

Tabel 2.20 Perkembangan sekolah/lembaga menurut jenjang -	165 -
Tabel 2.21 Perkembangan Guru Menurut Jenjang Pendidikan -	166 -
Tabel 2.22 Perkembangan Siswa Menurut Pendidikan Tahun 2021/2022 - 2024/2025	166 -
Tabel 2.23 Permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan ..	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 2.24 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pendidikan.....	181 -
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan.....	189 -
Tabel 3.2 Strategi berdasarkan Analisis Kekuatan (<i>Strength</i>) dan Peluang (<i>Opportunity</i>)	201 -
Tabel 3.3 Strategi berdasarkan Analisis Kelemahan (<i>Weakness</i>) dan Peluang (<i>Opportunity</i>)	203 -
Tabel 3.4 Strategi berdasarkan analisis Kekuatan (<i>Strength</i>) dan Ancaman (<i>Threat</i>)	205 -
Tabel 3.5 Strategi Jangka Menengah Dinas Pendidikan. -	207 -
Tabel 3.6 Penahapan Renstra Pendidikan.....	209 -
Tabel 3.7 Penyajian Lokus Kebutuhan Ruang Kelas jenjang Sekolah Dasar.....	213 -
Tabel 3.8 Penyajian Lokus Penanganan Anak Tidak Sekolah ..	216 -
Tabel 3.9 Lokus intervensi program dan pagu indikatif . -	218 -
Tabel 3.10 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan.....	220 -
Tabel 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	224
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	371
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	464

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029	469
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci.....	471
Tabel 4.6. Target capaian mutu SPM Pendidikan.....	475
Tabel 4.7. Proyeksi pertumbuhan penduduk kelompok umur usia sekolah.....	478
Tabel 4.8. Tabel target penerima layanan dasar pendidikan	479
Tabel 4.9. Indikator TPB/SDGs	483